

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Probolinggo

4.1.1 Kondisi Geografis

Kondisi geografis memuat informasi yang terdiri dari daratan, hidrografi, iklim, serta daerah rawan bencana. Berbagai informasi tersebut perlu mendapat perhatian serius dan bijaksana dalam menyikapinya karena memiliki arti penting dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan di masa-masa mendatang.

4.1.1.1 Daratan

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Probolinggo terletak pada posisi $7^{\circ} 40'$ s/d $8^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai $1.696,16 \text{ km}^2$.

Batas Administrasi Kabupaten Probolinggo disebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan.

Dilihat dari topografinya Kabupaten Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung membujur dari barat ke timur, yakni Gunung Semeru, Gunung Argopuro, Gunung Tengger dan Gunung Lamongan.

Kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian 0-2500 m di atas permukaan laut. Hal ini menyebabkan tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi yang berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan.

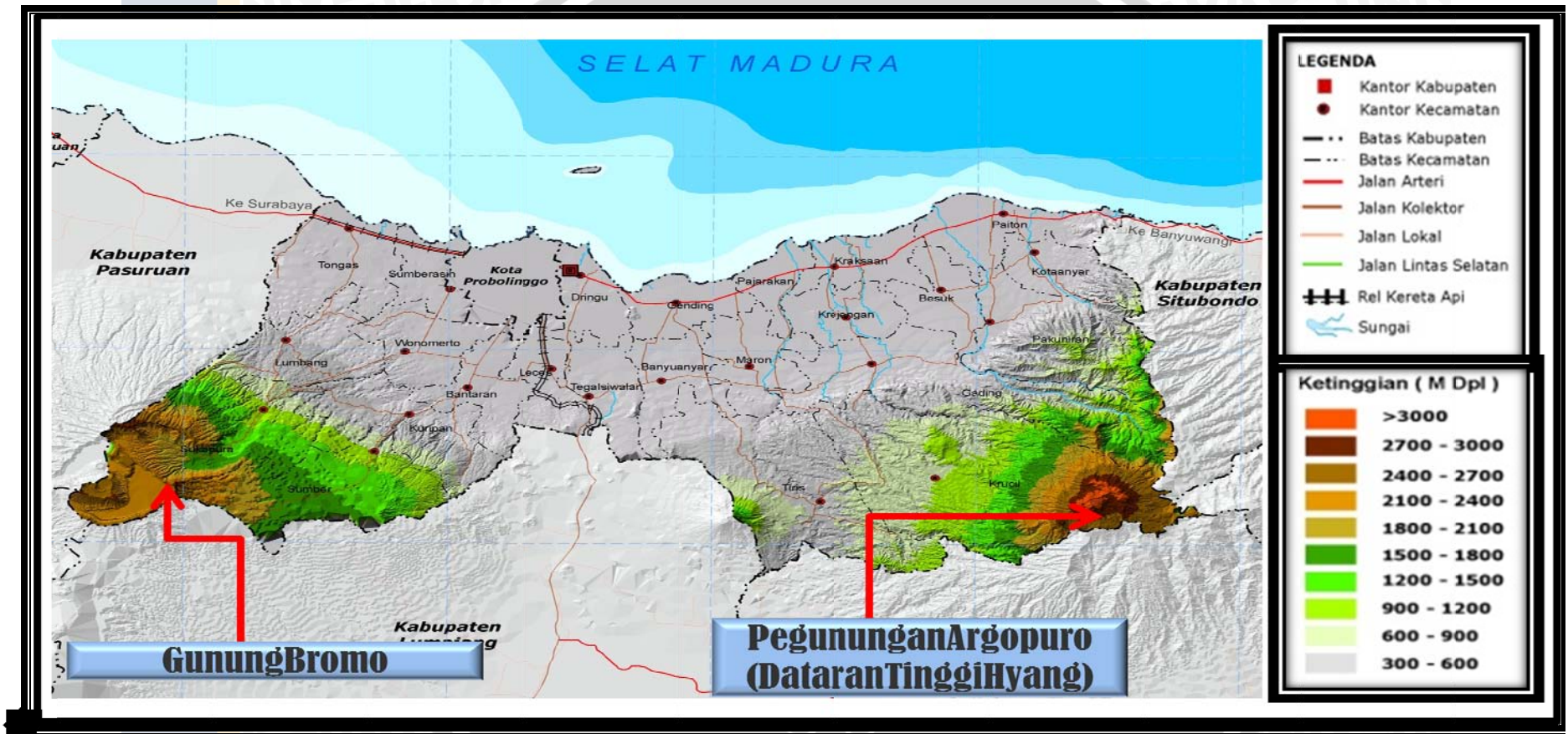
Sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran seperti di sekitar Pegunungan Tengger yang mempunyai ketinggian antara 750-2500 m di atas permukaan laut.

Tanah yang membujur dari barat ke Timur di bagian Selatan yang berada di kaki Pegunungan Argopuro dan berketinggian antara 150-750 m di atas permukaan laut sangat cocok untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti durian, alpukat dan buah-buahan lainnya. Wilayah kecamatan yang sangat tepat untuk tanaman buah-buahan ini adalah kecamatan krucil dan tiris.

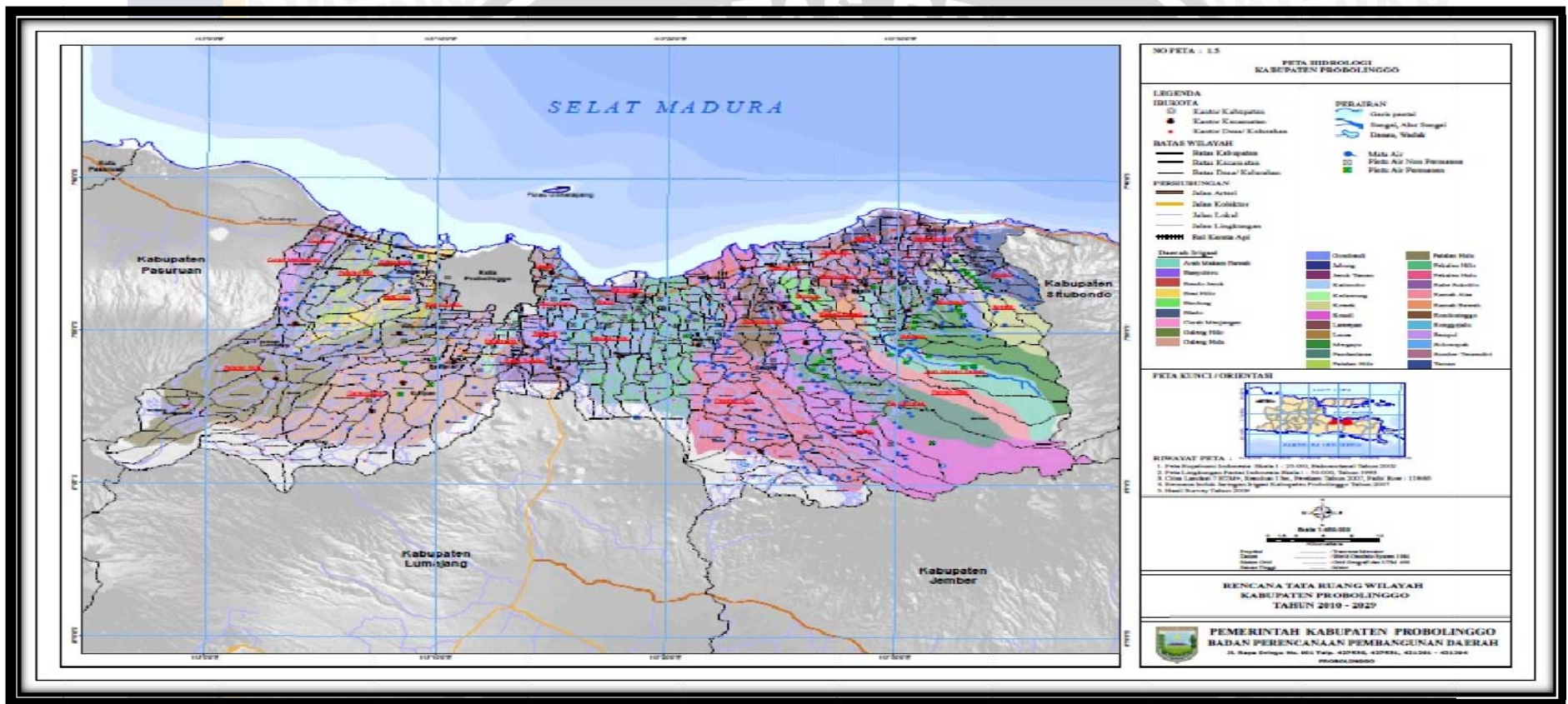
4.1.1.2 Hidrografi

Menurut Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Probolinggo, terdapat 25 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 kilometer. Sedangkan sungai terpendek adalah Ranu Bujel dengan panjang hanya 2 kilometer saja. Selain itu di Kabupaten Probolinggo juga terdapat Danau/Ranu yaitu Dabau/Ranu Segaran, Danau/Ranu Agung dan Danau/Ranu Petak.





Gambar 5 Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Probolinggo
 Sumber : Data BPBD Kabupaten Probolinggo 2012

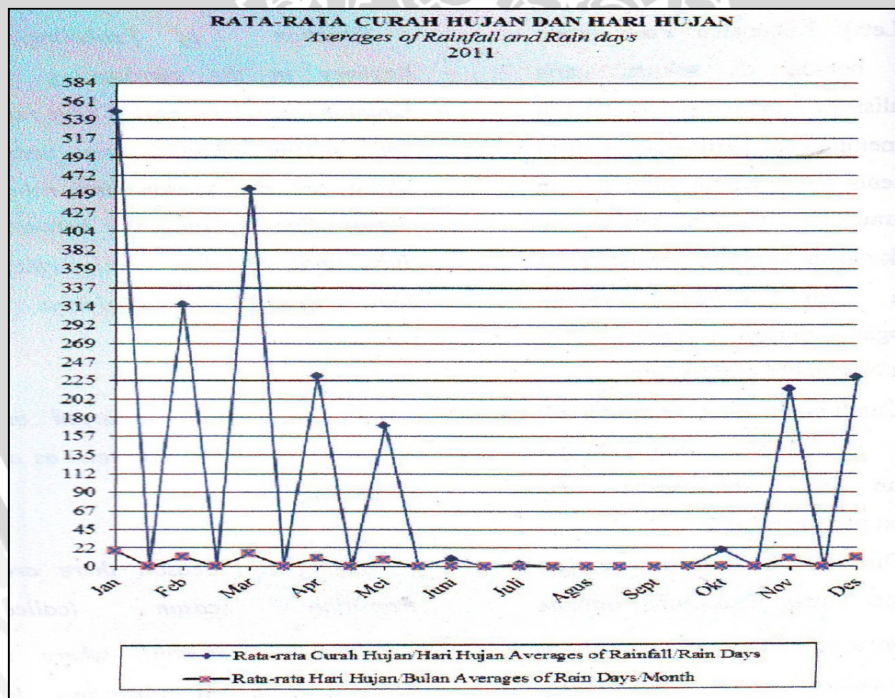


Gambar 6 Peta Hidrologi Kabupaten Probolinggo
Sumber : *Data BPBD Kabupaten Probolinggo 2012*

4.1.1.3 Iklim

Letak Kabupaten Probolinggo berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan daerah ini mempunyai perubahan musim dua jenis tiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan juli hingga oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan November hingga Juni.

Curah Hujan yang tinggi terjadi pada bulan November sampai dengan Mei, sebagaimana yang terlihat pada gambar 9 diantaranya musim tersebut terdapat musim pancaroba, dimana biasanya terjadi tiupan angin yang cukup kencang, biasa disebut angin gending.



Gambar 7 Rata-Rata Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Probolinggo
Sumber: Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2012

4.1.1.4 Jenis Tanah

Jenis tanah penting untuk diketahui terutama usaha pengembangan budidaya pertanian. Dilihat dari tekstur tanahnya, maka jenis tanah yang mendominasi adalah tanah latosol yang berasal dari tanaman perkebunan, sawah dan hutan tropika. Jenis tanah lainnya adalah alluvial, regosol, andosol, mediteran dan gromossol.

A. Aluvial

Jenis tanah ini mempunyai bahan induk dari bahan Aluvial dan koluvial yang asalnya beraneka macam. Tanah ini banyak dijumpai di daerah dataran hingga sedikit bergelombang dan daerah cekungan dan daerah aliran sungai. Di daerah Kabupaten Probolinggo jenis tanah ini terbagi dalam: Aluvial kelabu, Aluvial kecoklatan, glei humus, asosiasi glei humus rendah dan regosol kelabu hidromofik kelabu.

B. Andosol

Jenis tanah ini berasal dari induk abu dan tuf vulkan yang berada di daerah bersuhu rendah di dataran bergelombang dan berbukit. Corak tanah ini bertekstur dari lempung hingga debu berkadar bahan organik tinggi dan mempunyai sifat kepekaan terhadap erosi yang besar, baik terhadap erosi air maupun erosi angin.

C. Grumosol

Jenis tanah ini berasal dari pelapukan batuan kapur yang mengendap di dataran rendah yang memiliki tingkat produktivitas sedang, pemanfaatannya untuk pertanian dan perkebunan. Teksturnya liat berat dan warna tanah kelabu sampai hitam.

D. Latosol

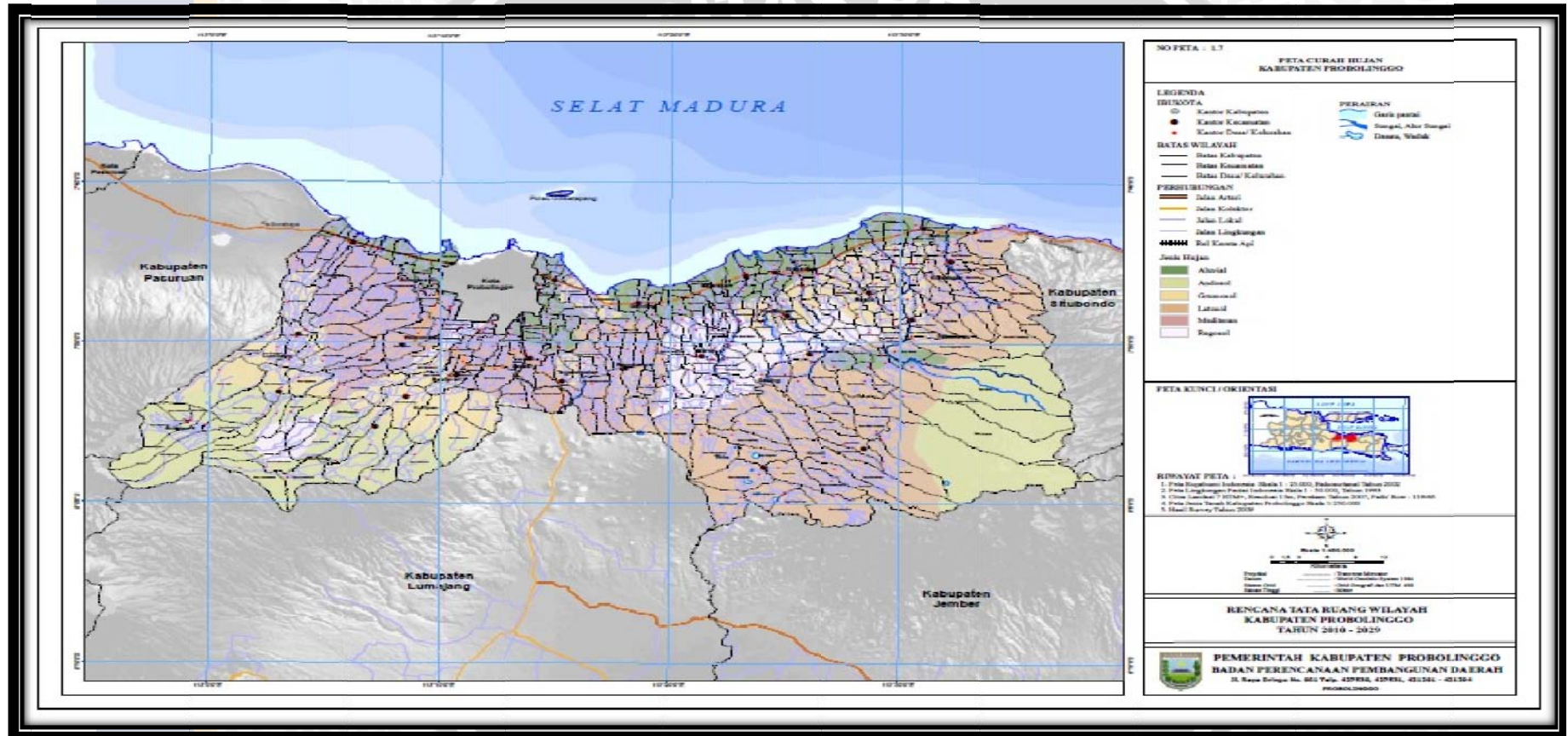
Jenis tanah latosol berasal dari bahan induk tuf vulkan dan bahan vulkan lainnya, jenis tanah ini hanya di jumpai di daerah bergelombang dan berbukit pada ketinggian 10 – 1000 dpl. Corak tanahnya bertekstur liat dalam keadaan tetap dari atas hingga ke bawah. Sifat kepekaan terhadap erosi adalah kecil.

E. Mediteran

Jenis tanah ini memiliki tingkat produktivitas sedang sampai tinggi, pemanfaatannya untuk tanah sawah, tegalan, perkebunan dan kehutanan. Warna tanah ini adalah merah kecoklatan.

F. Regosol

Jenis tanah ini bersal dari bahan induk abu vulkan, mergel dan pasir pantai tanah ini banyak di jumpai pada darah tanah bergelombang, berombak. Corak teksturnya berbentuk pasir dengan kadar liat 4 % dan sikap kepekaan terhadap erosi besar. Di daerah kabupaten Probolinggo hanya terdapat regosol kelabu tanah ini dapat di gunakan untuk tanaman pangan padi sawah, dan palawija, sayuran.



Gambar 8 Peta Jenis Tanah Kabupaten Probolinggo
Sumber: Data BPBD Kabupaten Probolinggo 2012

4.1.1.4 Daerah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana alam dan wilayah kritis merupakan wilayah yang sering dan atau mempunyai potensi bencana alam, seperti letusan gunung berapi, Angin Gending, banjir dan kebakaran yang disebabkan oleh alam.

A. Letusan Gunung Berapi

Berdasarkan informasi geologi dan tingkat risiko letusan gunung berapi, tipologi kawasan rawan letusan gunung berapi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe sebagai berikut:

1. Tipe A
 - a. Kawasan yang berpotensi terlanda banjir lahar dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava. Selama letusan membesar, kawasan ini berpotensi tertimpa material jatuhan berupa hujan abu lebat dan lontaran batu pijar.
 - b. Kawasan yang memiliki tingkat risiko rendah (berjarak cukup jauh dari sumber letusan, melanda kawasan sepanjang aliran sungai yang dilaluinya, pada saat terjadi bencana letusan, masih memungkinkan manusia untuk menyelamatkan diri, sehingga risiko terlanda bencana masih dapat dihindari).
2. Tipe B
 - a. Kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu pijar, hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun.

- b. Kawasan yang memiliki tingkat risiko sedang (berjarak cukup dekat dengan sumber letusan, risiko manusia untuk menyelamatkan diri pada saat letusan cukup sulit, kemungkinan untuk terlanda bencana sangat besar)

3. Tipe C

- a. Kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu (pijar), hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun. Hanya diperuntukkan bagi kawasan rawan letusan gunung berapi yang sangat giat atau sering meletus.
- b. Kawasan yang memilki risiko tinggi (sangat dekat dengan sumber letusan. Pada saat terjadi aktivitas magmatis, kawasan ini akan dengan cepat terlanda bencana, makhluk hidup yang ada disekitarnya tidak mungkin untuk menyelamatkan diri).

Kabupaten Probolinggo yang berada di sekitar gunung berapi mempunyai dampak rawan gunung berapi terutama akibat letusan gunung berapi, yaitu Gunung Bromo dan Gunung Lamongan. Diantaranya Kecamatan Kuripan, Kecamatan Sukapura dan Kecamatan Tiris.

Tabel 1 Daerah Rawan Gunung Berapi di Kabupaten Probolinggo

No	Kecamatan	Desa	Gunung
1	Wonomerto	1. Pekalen	Bromo
2	Kuripan	1. Wringinanom	Bromo
		2. Meryono	Bromo
3	Sukapura	1. Ngegung	Bromo
		2. Sepikerep	Bromo
		3. Sariwani	Bromo
		4. Ngadisari	Bromo
		5. Ngedes	Bromo
		6. Ngadirejo	Bromo
4.	Tiris	1. Ranuagung	Lamongan dan Raung
		2. Tlogosari	Lamongan dan Raung

Sumber: Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2012

B. Gerakan Tanah (Longsor)

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Probolinggo berupa tanah longsor yang terdapat di berbagai kecamatan. Wilayah yang peka terhadap bahaya ini adalah wilayah yang memiliki tingkat erosi tinggi, kawasan pantai dan tanah-tanah gundul di kawasan hutan lindung, serta kawasan yang mempunyai kelereng tanah lebih dari 40 %. Berdasarkan Studi identifikasi kawasan rawan bencana Kab. Probolinggo tahun 2007, kawasan dengan tipologi gerakan tanah tertinggi adalah Kecamatan Gading, Krucil, Lumbang, Pakuniran, Sukapura, Sumber, Kota Anyardan Tiris.

C. Banjir

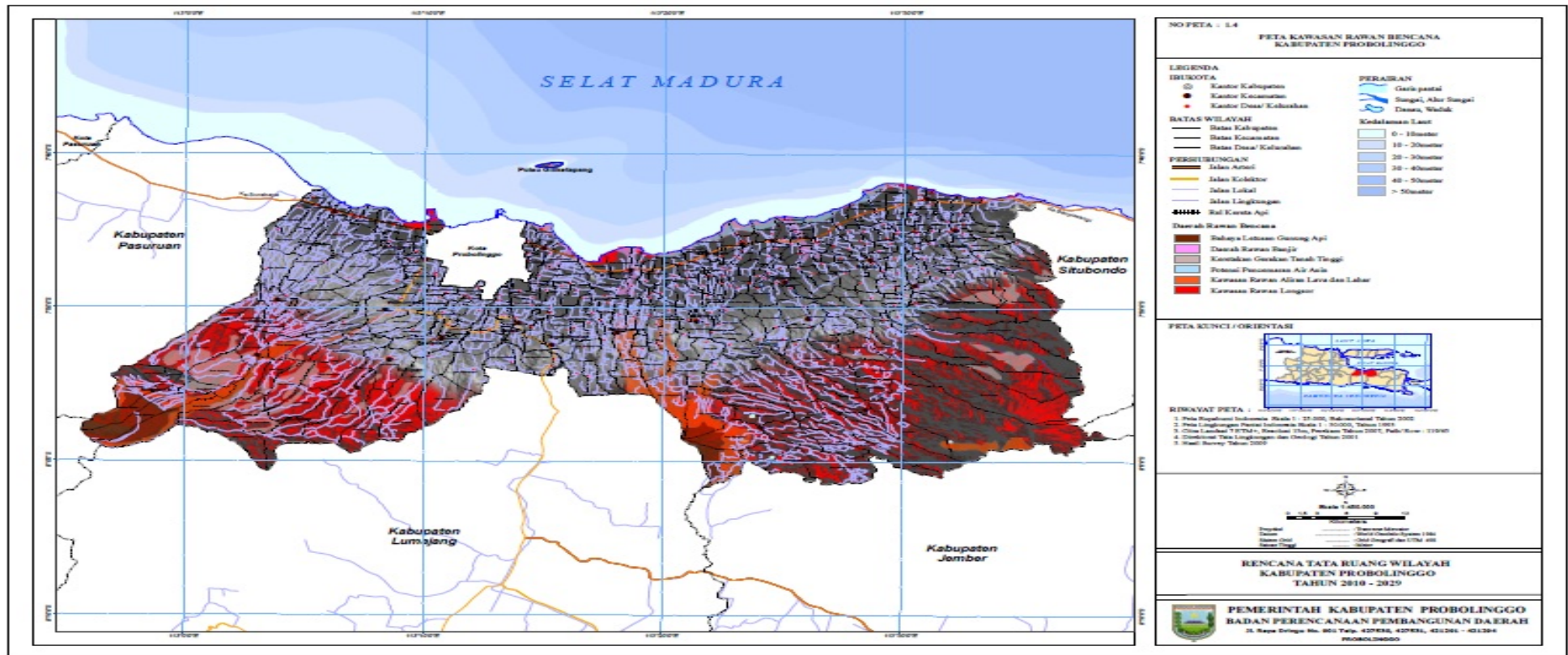
Kawasan-kawasan yang berada di sepanjang daerah aliran sungai perlu mewaspadaai kemungkinan terjadinya banjir. Demikian pula perluasan kawasan permukiman di perkotaan akan mengurangi luas wilayah resapan air, sehingga tanpa sistem drainase yang baik akan dapat menimbulkan banjir. Wilayah yang potensial terhadap bahaya banjir adalah Perkotaan Gending, Dringu, Kraksaan, Tongas, Sumberasih, Krejengan dan Kotaanyar.

D. Daerah Rawan Abrasi Pantai

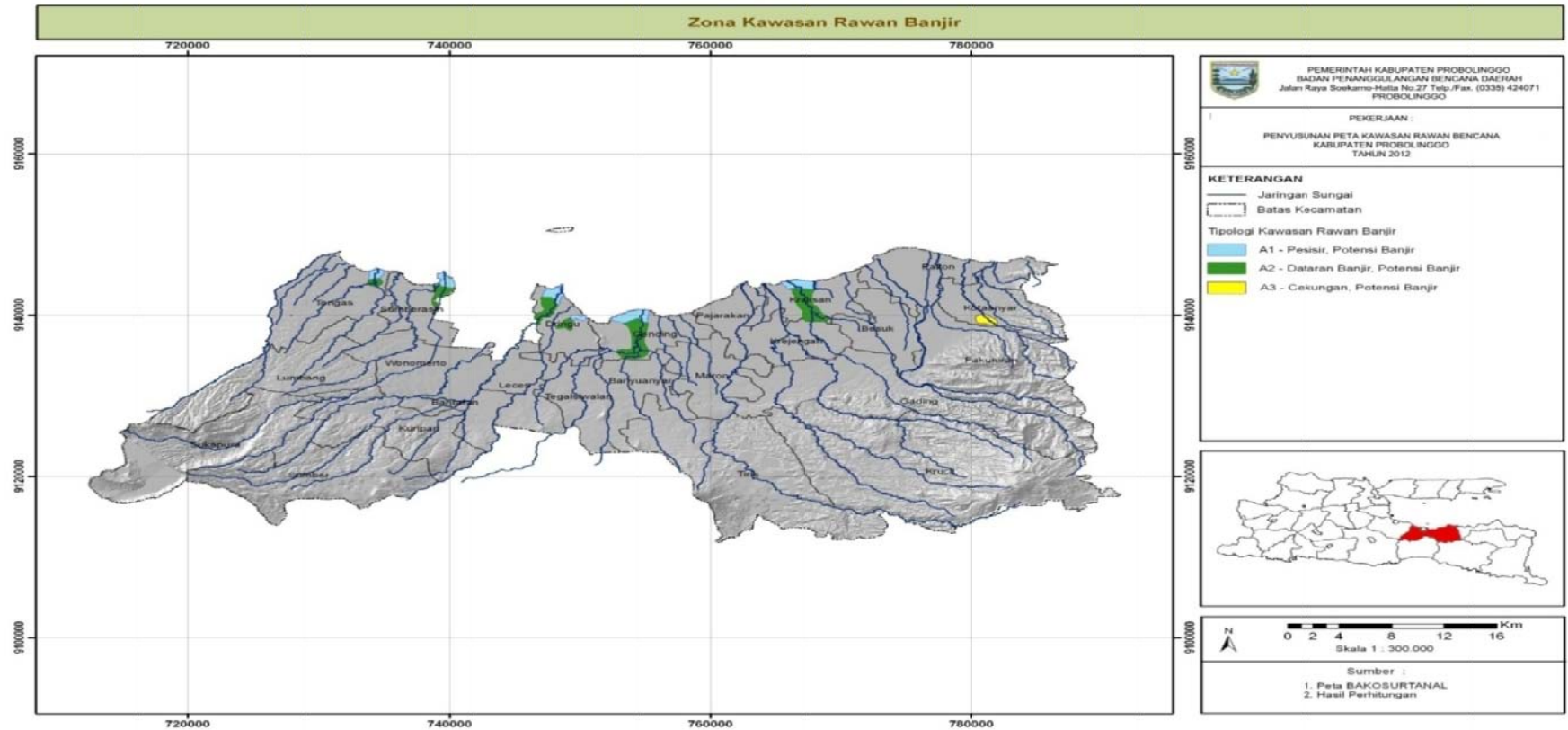
Kabupaten Probolinggo memiliki panjang kawasan pesisir sekitar 71,893 Km dan seperti kabupaten lain di Indonesia juga memiliki masalah dengan ekosistem pantainya terutama dengan masalah abrasi pantai.

Ada banyak faktor yang mengakibatkan sebuah pantai mengalami abrasi, dari sekian faktor yang mempengaruhi ada satu faktor yang sangat dominan yaitu ketahanan pantai itu sendiri dalam menghadapi gelombang air laut. Ketahanan pantai akan tercipta dengan sendirinya jika ekosistem di kawasan tersebut masih terjaga, salah satu ekosistem pantai yang berperan penting dalam menciptakan ketahanan pantai adalah keberadaan dari hutan mangrove atau rawa di wilayah pantai tersebut.

Dari beberapa hal di atas maka, deliniasi kawasan rawan abrasi pantai dicari dengan menganalisa kawasan pantai yang tidak mempunyai vegetasi rawa atau mangrove di pesisirnya. Dari hasil analisa spasial pada peta tata guna lahan didapat distribusi kawasan rawan abrasi pantai meliputi Kecamatan-kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Kraksaan, Gending, Pajarakan dan Paiton.

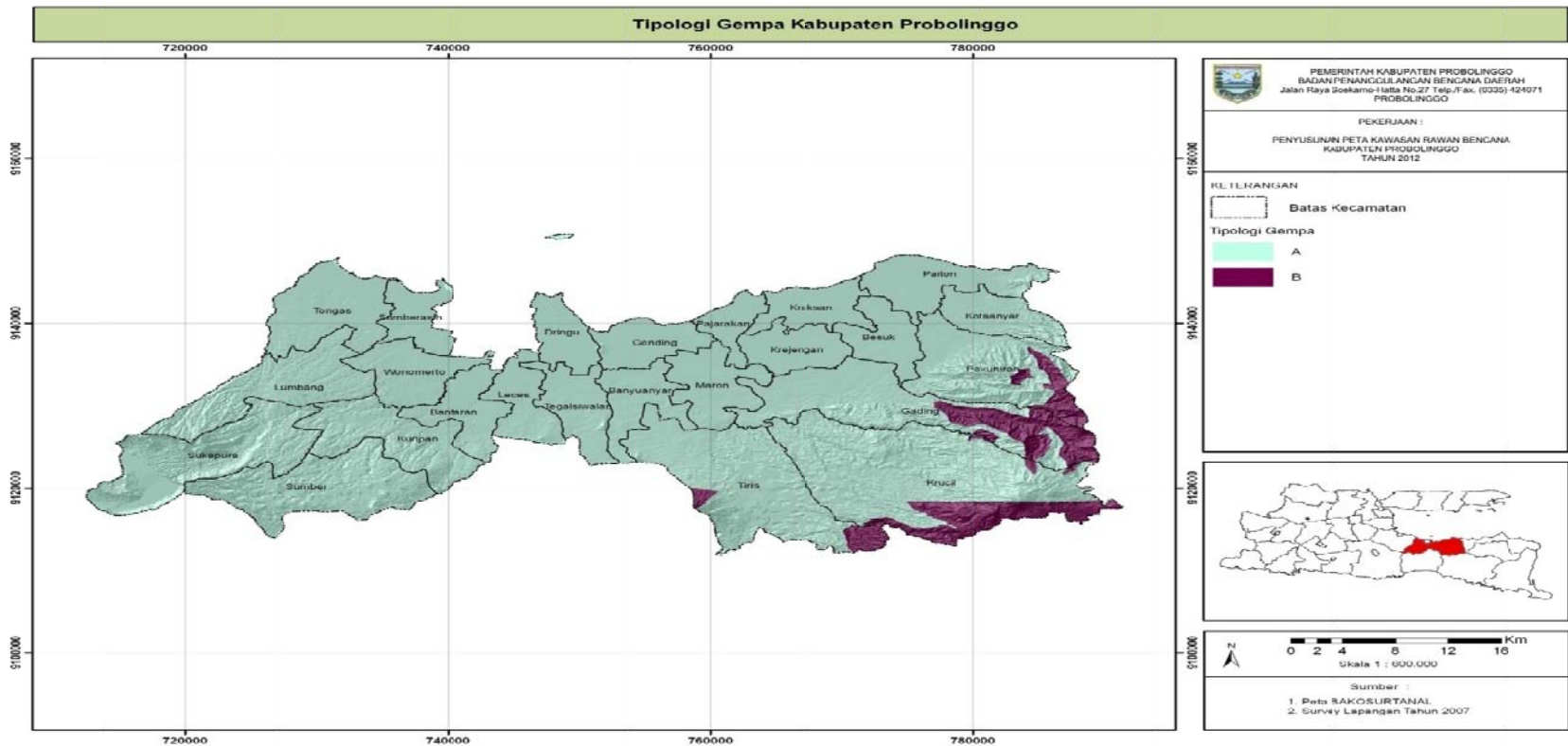


Gambar 9 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Probolinggo
Sumber: Data BPBD Kabupaten Probolinggo 2012

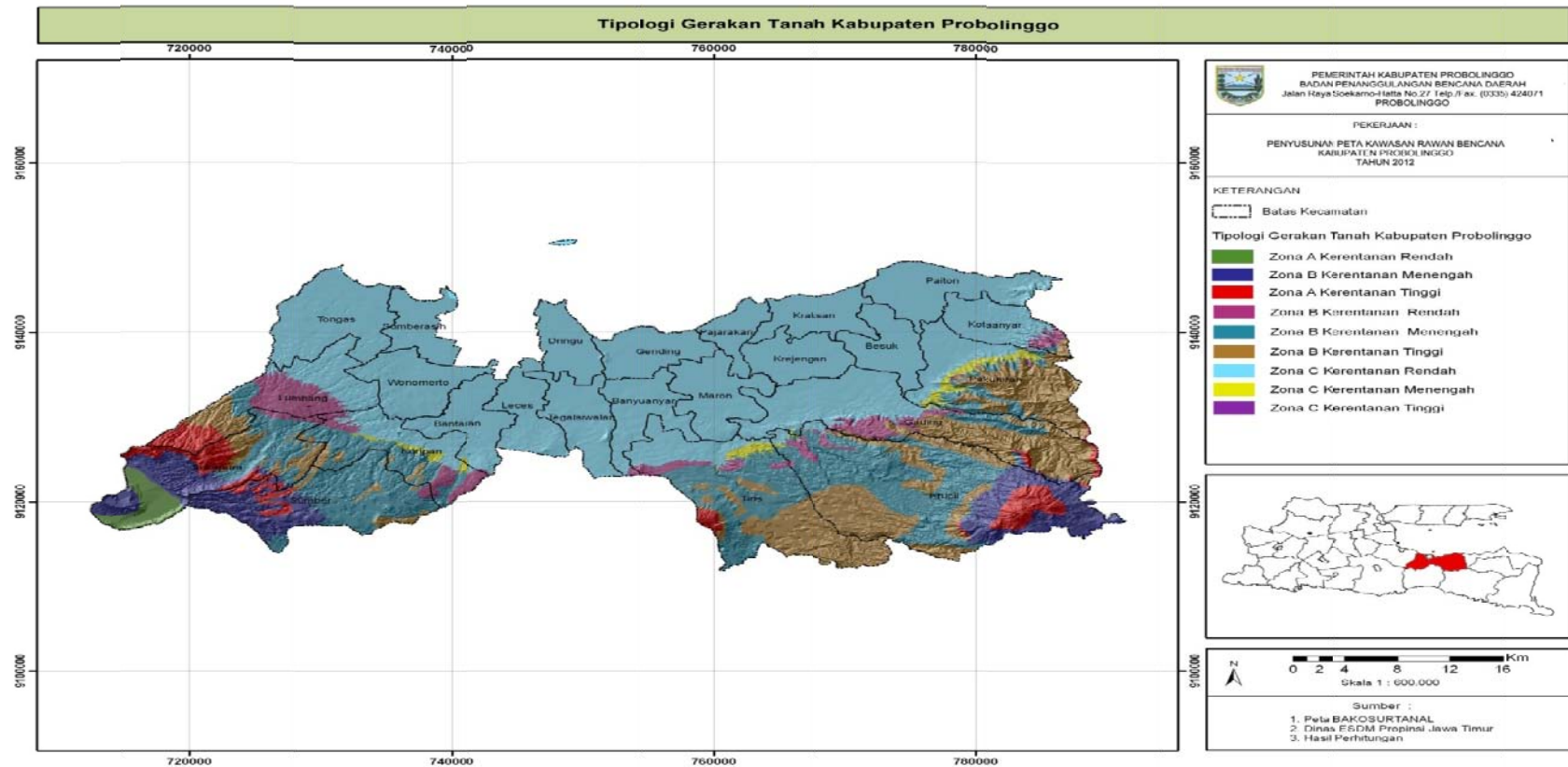


Gambar 10 Zona Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi

Sumber: Data Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo 2012



Gambar 11 Peta Tipologi Gempa Kabupaten Probolinggo
 Sumber: Data Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo 2012



Gambar 12 Peta Tipologi Gerakan Tanah Kabupaten Probolinggo
 Sumber : Data Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo 2012

Tabel 2 Kejadian Bencana Alam Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2011

No	Kecamatan	FREKUENSI KEJADIAN BENCANA PERTAHUN TH.2010								
		GA/E	GB	BJ	LS	AP	KBH	EP	KK	AB
1	Sukapura	1	-	-	2	1	1	-	1	-
2	Sumber	1	-	-	4	1	1	-	1	-
3	Kuripan	1	-	5	1	2	-	-	1	-
4	Bantaran	-	-	2	-	-	-	1	1	-
5	Leces	-	-	2	-	-	-	1	1	-
6	Tegalsiwalan	-	-	1	-	2	-	1	1	-
7	Banyuanyar	-	-	-	-	1	-	-	1	-
8	Tiris	-	-	-	2	2	1	-	1	-
9	Krucil	-	-	-	2	2	1	-	-	-
10	Gading	-	-	2	1	1	-	-	-	-
11	Pakuniran	-	-	2	1	-	-	-	-	-
12	Kotaanyar	-	-	1	1	-	-	-	-	-
13	Paiton	-	-	1	-	1	-	-	-	1
14	Besuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kraksaan	-	-	5	-	1	-	-	-	1
16	Krejengan	-	-	2	-	1	-	-	-	-
17	Pajarakan	-	-	4	-	2	-	-	-	1
18	Maron	-	-	-	-	1	-	-	-	-
19	Gending	-	-	2	-	2	-	-	-	1
20	Dringu	-	-	2	-	1	-	1	-	1
21	Wonomerto	-	-	-	-	1	-	1	1	-
22	Lumbang	1	-	-	3	-	-	-	1	-
23	Tongas	-	-	7	-	6	-	-	1	1
24	Sumberasih	-	-	2	-	1	-	1	1	1
	Jumlah	4	-	39	17	29	4	6	12	7

Keterangan :

GA/E : Erupsi Gunung

EP : Epidemi Ulat Bulu

AB : Abrasi

GB : Gempa Bumi

AP : Angin Puting Beliung

KK : Kekeringan

LS : Longsor

KBH : Kebakaran Hutan

BJ : Banjir

Sumber: Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2012

4.1.2 Penduduk dan Tenaga Kerja

4.1.2.1 Penduduk

Data penduduk sebagaimana data yang lain, sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan sebab penduduk merupakan subyek dan sekaligus obyek dari suatu pembangunan. Menurut hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk tahun 2011 tercatat 1.185.711 jiwa. Dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 583.209 jiwa dan perempuan 602.502 jiwa. Jumlah penduduk yang paling banyak terdapat di Kecamatan Tiris yaitu 76.719 jiwa sedangkan yang paling sedikit yaitu Kecamatan Sukapura sebanyak 21.176 jiwa.

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Probolinggo mencapai 646 jiwa. Kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk paling tinggi dibanding kecamatan lainnya yaitu Sumberasih (1.966 jiwa/km²), Kraksaan (1.630 jiwa/km²).

4.1.2.2 Tenaga kerja

Jumlah pencari kerja pada tahun 2011 tercatat 3.025 orang, yang terdiri dari laki-laki 613 orang dan perempuan 2.412 orang. Dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 3.445 orang, jumlah pencari kerja ini mengalami penurunan sebesar 12,19%. Sama halnya dengan pencari kerja, lowongan yang tersedia di tahun 2011 mengalami peningkatan dibanding tahun 2010. Besarnya penempatan kerja di tahun 2010 mencapai 43,64% dari total seluruh pencari kerja. Ini berarti ada peningkatan sekitar 48,91% dibandingkan tahun lalu.

4.1.2.3 Pegawai Negeri Sipil

Data jumlah PNS di pemerintahan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2011 secara keseluruhan berjumlah 10.699 orang. PNS Golongan III masih menduduki presentase tertinggi (34,51%), selanjutnya Golongan IV (33,77%), Golongan II (27,98%) dan terakhir Golongan I (3,75%). Untuk pegawai honorer di Kabupaten Probolinggo dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil Registrasi 2011

Kecamatan <i>District</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sukapura	10.377	10.799	21.176
2. Sumber	12.734	13.462	26.196
3. Kuripan	15.791	16.700	32.491
4. Bantaran	21.728	23.352	45.081
5. Leces	29.927	30.696	60.623
6. Tegalsiwalan	17.722	18.909	36.631
7. Banyuanyar	27.670	28.978	56.648
8. Tiris	38.296	38.423	76.729
9. Krucil	28.766	28.408	57.174
10. Gading	27.938	28.524	56.462
11. Pakuniran	22.523	23.294	45.817
12. Kotaanyar	18.447	19.414	37.861
13. Paiton	34.864	34.995	69.859
14. Besuk	24.684	26.336	51.020
15. Kraksaan	33.896	34.730	68.626
16. Krejengan	20.126	20.899	41.025
17. Pajarakan	17.257	17.763	35.020
18. Maron	32.461	33.731	66.192
19. Gending	21.018	21.731	42.731
20. Dringu	27.076	27.091	54.167
21. Wonomerto	21.323	22.407	43.730
22. Lumbang	15.764	16.630	32.394
23. Tongas	32.420	34.029	66.449
24. Sumberasih	30.401	31.218	61.619
Jumlah / Total	583.209	602.502	1.185.711

Sumber: Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2012

4.1.3 Sosial

4.1.3.1 Pendidikan

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar di segala tingkatan baik formal maupun informal. Data pendidikan meliputi banyaknya sekolah, murid dan guru yang dirinci menurut tingkatan TK, SD, SLTP, dan SLTA. Pada tahun 2011 jumlah TK tercatat sebanyak 482, jumlah guru sebanyak 1.337 orang dengan jumlah murid sebanyak 9.925. Ratio murid dan guru terhitung sebesar 1:7. Di tingkat SD, jumlah sekolah turun dari 636 di Tahun 2010 menjadi 570. Adapun jumlah guru turun dari 7.509 di Tahun 2010 menjadi 6.615, jumlah murid turun dari 94.489 di tahun 2010 menjadi 78.227. Ratio murid dan guru yaitu 1:12.

Pada tingkat SLTP, jumlah sekolah, meningkat dari 149 di tahun 2010 menjadi 172. Jumlah guru bertambah dari 2.697 di tahun 2010 menjadi 2.780. Jumlah murid meningkat dari 28.302 menjadi 30.823. Adapun ratio murid dan guru yaitu 1:11.

Di tingkat SLTA/SMK, jumlah sekolah turun dari 66 di tahun 2010 menjadi 43. Adapun jumlah guru meningkat dari 989 di tahun 2010 menjadi 1.049. Sedangkan jumlah murid mengalami peningkatan dari 10.828 di tahun 2010 menjadi 11.617. Ratio antara guru dan murid menjadi 1:11.

4.1.3.2 Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan tidak lepas dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Berikut adalah beberapa konsep yang sering digunakan dalam bidang kesehatan adalah:

A. Rumah Sakit

Adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan, biasanya berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, tidak termasuk puskesmas.

B. Puskesmas

Merupakan unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat disekitar wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan

C. Pasangan Usia Subur

Adalah suami isteri yang masih berpotensi untuk mempunyai keturunan lagi atau biasanya ditandai dengan belum datangnya menopause (terhenti menstruasi).

D. Imunisasi dan Vaksinasi

Adalah memasukkan kuman atau racun tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara disuntik atau diminum (diteteskan dalam mulut), dengan maksud agar terjadi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu.

E. Apotik

Adalah tempat penjualan obat yang mempunyai izin operasi dari departemen kesehatan, Cq. Ditjen POM di bawah pengawasan Apoteker.

Banyaknya balita menurut kepemilikan Kartu Menuju Sehat (KMS) yakni sekitar 91,7%. Sementara prosentase pengunjung posyandu tahun 2010 sebesar 69,94% dan tahun 2011 sebesar 70,54%.

Rata-rata lebih dari 90% bayi di setiap kecamatan di Kabupaten Probolinggo telah diimunisasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Probolinggo menyadari pentingnya kesehatan khususnya imunisasi untuk bayi agar terjadi kekebalan tubuh

terhadap penyakit tertentu. Selain itu dapat dilihat juga dengan naiknya pengunjung Posyandu dibanding tahun sebelumnya.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tercatat 251.494 namun yang menjadi peserta KB aktif sebanyak 188.726 atau sekitar 76,27%. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 terjadi peningkatan KB aktif sekitar 4,56%.

Dari keseluruhan jenis alat kontrasepsi, tiga jenis alat kontrasepsi yang diminati masyarakat, yang diamati dari tiga tertinggi persentase pemakaian adalah suntik (47,85%), tablet (25,50%), dan susuk (12,73%).

Tabel 4 Jumlah Fasilitas Kesehatan 2011

Kecamatan <i>District</i>	Rumah Sakit <i>Hospital</i>	Balai Pengobatan & Rumah bersalin	Puskesmas <i>Public health</i>	Pustu	Polindes	Ponkesdes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Sukapura	-	-	1	2	4	5
2. Sumber	-	-	1	5	3	1
2. Kuripan	-	-	1	3	-	3
3. Bantaran	-	-	1	3	4	2
4. Leces	-	2	2	2	5	1
5. Tegalsiwalan	-	-	1	5	3	3
6. Banyuanyar	-	-	2	4	5	3
7. Tiris	-	-	2	4	5	5
8. Krucil	-	-	1	4	2	7
9. Gading	-	-	2	4	8	5
10. Pakuniran	-	-	2	3	7	5
11. Kotaanyar	-	-	1	3	5	4
12. Paiton	-	6	2	4	13	1
13. Besuk	-	-	2	4	7	4
14. Kraksaan	3	2	1	4	12	1
15. Krejengan	-	-	1	4	8	4
16. Pajajaran	-	1	1	3	7	1
17. Maron	-	-	2	4	9	3

Kecamatan <i>District</i>	Rumah Sakit <i>Hospital</i>	Balai Pengobatan & Rumah bersalin	Puskesmas <i>Public health</i>	Pustu	Polindes	Ponkesdes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18. Gending	-	2	1	4	7	1
19. Dringu	1	2	1	5	7	1
20. Wonomerto	-	-	1	3	5	2
21. Lumbang	-	-	1	2	2	5
22. Tongas	1	-	2	4	3	5
23. Sumberasih	-	-	1	4	5	-
Jumlah/total	5	15	33	87	136	75

Sumber: Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2012

4.1.3.3 Agama

Mayoritas penduduk Kabupaten Probolinggo adalah pemeluk Agama Islam 98,30%, diikuti oleh Hindu 1,43%, Protestan 0,14%, Katolik 0,10%, Budha 0,02%, lainnya 0,001%.

4.1.3.4 Sosial Lainnya

Untuk perkara tindak pidana umum di tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 87,52% disbanding setahun yang lalu, dan semua sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Sednagkan untuk perkara tindak pidana narkoba ada 7 perkara di tahun 2011, dimana semua perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

4.1.4 Perekonomian Wilayah

Kondisi Kabupaten Probolinggo sangat terpengaruh kondisi makro, dimana belum sepenuhnya stabil yang sangat tergambar dari tingginya inflasi, melemahkan nilai tukar rupiah dan tergejolaknya harga minyak mentah dunia yang ditandai dengan kenaikan harga BBM di dalam negeri. Kondisi ini sudah barang tentu akan sangat

mempengaruhi perekonomian regional Jawa Timur, termasuk Probolinggo. Walaupun kondisi makro sangat menentukan, namun demikian tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo secara umum ditentukan oleh faktor-faktor lokal seperti sumber daya manusia, teknologi, permodalan dan kewirausahaan.

Perekonomian Kabupaten Probolinggo masih didominasi oleh 3 sektor besar, antara lain Sektor Pertanian sebesar 30,41 %; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 29,74 % dan Sektor Industri Pengolahan sebesar 12,07 %. Selanjutnya untuk Sektor Jasa-Jasa sebesar 9,45 %; Sektor Bangunan 7,98 %; Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 3,91 %; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 3,67 %; Sektor Pertambangan dan penggalian 1,44 % dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 1,33 %.

Kondisi perekonomian daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang dapat digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan di suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo yang diukur dari PDRB atas dasar harga konstan 2000, selama periode 2005 – 2009 mengalami peningkatan yang signifikan. Tercatat sejak Tahun 2005 sudah mengalami pertumbuhan sebesar 4,73 %, Tahun 2006 sebesar 5,69 %, Tahun 2007 mengalami pertumbuhan sebesar 5,97 %, Tahun 2008 meningkat menjadi sebesar 5,78 % dan pada Tahun 2009 juga meningkat sebesar 5,72 %. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian secara umum tumbuh positif namun pada Tahun 2008 dan 2009 laju pertumbuhannya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo ini terjadi hampir pada

semua sektor kecuali sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air bersih, bangunan, pengangkutan dan komunikasi.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo tersebut didorong oleh 9 sektor ekonomi, terutama disumbangkan oleh lima sektor terbesar yaitu Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 10,44 %; Sektor Jasa-jasa sebesar 7,31 %; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 6,93 %; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 6,68 %; Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 5,78 %. Sedangkan untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,74 %; Sektor Pertanian sebesar 4,79 %; Sektor Bangunan/konstruksi sebesar 4,17 %, dan Sektor Industri Pengolahan sebesar 4,10 %. Sementara itu laju inflasi Tahun 2009 berada pada angka 5,48 % yang lebih rendah dibanding Tahun 2008 sebesar 9,02 %.

Dalam periode lima tahun terakhir ini, pendapatan regional Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada Tahun 2005 pendapatan regional atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 7.860.596,79 menjadi Rp.13.326.304,44 pada Tahun 2009. Nilai pendapatan regional ini bila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan menghasilkan pendapatan regional perkapita. Sedangkan pendapatan regional perkapita Kabupaten Probolinggo Tahun 2005 adalah sebesar Rp. 7.556.565,92 dan pada Tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 12.761.762,36.

Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, kenaikan pendapatan regional perkapita tersebut memiliki makna sebagai kenaikan status ekonomi masyarakat pula. Dengan lain kata, kondisi empiris tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Kabupaten Probolinggo memang mengalami pergerakan positif hingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduknya.

Sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Gubernur Jawa Timur dengan para Bupati/Walikota se-Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Mei 2010 perihal Percepatan Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 dan Tahun 2011 telah ditetapkan dengan Instruksi Bupati Probolinggo Nomor: 02 Tahun 2010 tentang Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 dan Tahun 2011, sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian Dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-Tahun 2011

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROV / KAB	2009	2010	2011
1	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	Jawa Timur	5.01	(6.10 – 5.50)	(6.25 – 6.75)
		Kabupaten Probolinggo	5.72	5.92	6.44
2	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)	Jawa Timur	5.08	(6.00 – 6.20)	(5.80 – 6.00)
		Kabupaten Probolinggo	5.08	4.35	3.42
3	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	Jawa Timur	70.98	(69.00 – 69.50)	(69.50 – 70.10)
		Kabupaten Probolinggo	61.79	62.14	62.49
4	ANGKA KEMISKINAN (RTM) (%) Tahun Dasar 2008 = 35.55%	Jawa Timur	-	-	-
		Kabupaten Probolinggo	34.5	33.5	32.0

Sumber : Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2012

4.1.5 Pertanian

4.1.5.1 Tanaman Bahan Makanan

Tanaman bahan makanan dalam publikasi ini meliputi tanaman padi dan palawija yang terdiri dari tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Produksi padi pada tahun 2011 mencapai 308.371 ton, dengan luas panen 60.107 hektar. Luas panen yang terbesar berada di Kecamatan Gading, sedangkan produktivitas tertinggi berada di Kecamatan Krejengan yang mencapai 57,92 kwintal/hektar. Sedangkan untuk produksi

jagung 247.298 ton, kacang kedelai 891,99 ton, kacang tanah 476,84 ton, ubi kayu 118,918 ton dan ubi jalar 244 ton.

Secara umum, keenam jenis tanaman palawija ini mengalami penurunan produksi dibandingkan dengan tahun 2010, kecuali untuk tanaman padi dan jagung yang naik sebesar 1,14% dan 2,64%.

Untuk tanaman hortikultura, Kabupaten Probolinggo terkenal sebagai sentra tanaman bawang merah. Luas panen dan produktivitasnya tertinggi berada di Kecamatan Tegalsiwalan dan Leces, yaitu masing-masing sebesar 1.722 hektar dan 11,23 ton/hektar. Jika disbanding dengan tahun 2010, terjadi kenaikan produktivitas bawang merah sebesar 7,25%.

4.1.5.2 Kehutanan

Menurut fungsinya, hutan dibagi menjadi hutan lindung, hutan produksi, LDTI, TBP dan KPS. Total luas hutan di wilayah Kabupaten Probolinggo menurut data yang diperoleh dari Perum Perhutani Unit II/KPH Probolinggo adalah 45.987,30 Hektar yang dirinci menjadi hutan lindung seluas 22.574,40 hektar, hutan produksi seluas 22.574,40 hektar dan hutan lainnya 762,1 hektar. Jenis tanaman yang diusahakan di hutan tersebut adalah rumba dan jati.

4.1.5.3 Perikanan

Produksi sub sektor perikanan laut pada tahun 2011 tercatat 9.550.200 kilogram dengan nilai produksi 67.818,08 juta rupiah, atau dapat dikatakan ada kenaikan sebesar 0,80% dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan produksi perikanan tambak mengalami kenaikan sebesar 4,74%, sementara produksi perikanan kolam turun 6,81% dan perikanan kolam turun 6,81% dan perikanan darat/rawa turun sebesar 18,03%.

4.1.5.4 peternakan

Perkembangan populasi ternak besar pada umumnya mengalami peningkatan. Begitu pula untuk produksi susu sapi perah naik hingga 6,09%. Untuk populasi ternak kecil, jenis ternak kambing mengalami peningkatan 2,10% dan domba naik 1,79%. Sementara produksi telur secara keseluruhan juga mengalami kenaikan hingga 0,67% dibandingkan tahun lalu.

4.1.6 Pertambangan

Bahan galian tambang di Kabupaten Probolinggo berupa bahan galian (pertambangan batuan) yaitu galian sungai dan galian daratan yaitu berupa pasir dan batu, dengan jenisnya berupa batu gunung pasir, tanah urug, tras dan pasir/kerikil batu. Selain itu juga terdapat tambang panas bumi. Lokasi galian daratan berada di Kecamatan Tongas, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Bantaran dan Kecamatan Maron. Sedangkan galian sungai berada di Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Paiton, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Pakuniran dan Kecamatan Gading.

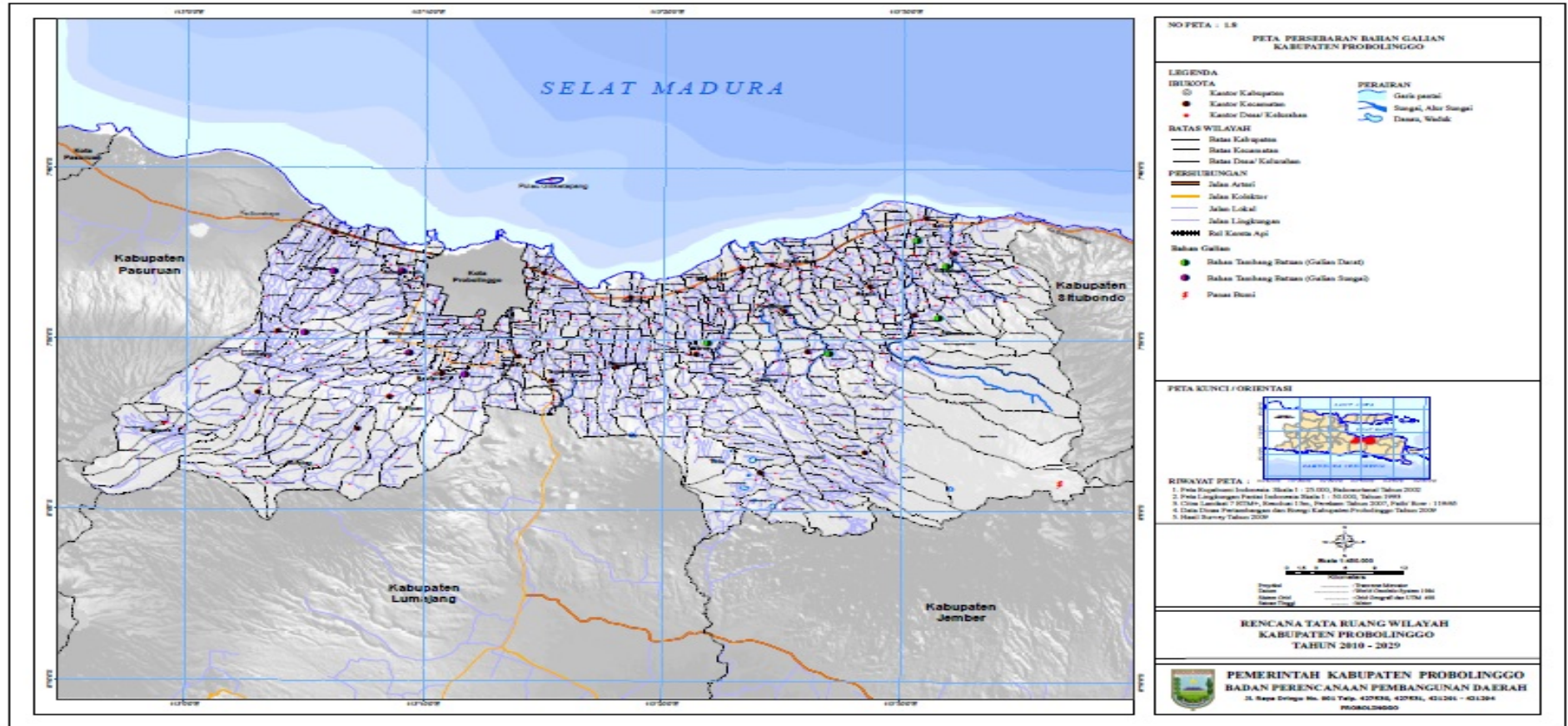
Saat ini sektor pertambangan yang diusahakan di kabupaten Probolinggo adalah sektor pertambangan mineral. Pertambangan mineral yang ada meliputi bahan galian darat yaitu pertambangan batuan dan bahan galian sungai yaitu penambangan pasir dan batuan. Selain itu di Kabupaten Probolinggo terdapat potensi pertambangan gas bumi terbesar di Jawa Timur yang terdapat di kawasan pegunungan Hyang/ pegunungan Argopuro. Untuk bahan galian dapat dilihat pada

Kegiatan penggalian bahan tambang sebagian besar masih berupa pertambangan rakyat yang dikelola secara tradisional. Kegiatan penggalian ini, khususnya pasir dan batu kali, sering kali masyarakat setempat kurang memperhatikan aspek pelestarian lingkungan sehingga menimbulkan perubahan morfologi sungai pada saat penggalian batu kali dan pasir. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengancam/merusak struktur bangunan yang terdapat di sepanjang aliran sungai, misalnya jembatan, saluran irigasi dan sebagainya.

Tabel 6 Luas dan Produksi Daerah Pertambangan Batuan di Kabupaten Probolinggo

No.	Uraian	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Batu Gunung	57,00	25.000,00
2.	Pasir	70,00	30.000,00
3.	Tanah Urug	92,00	95.000,00
4.	Pasir/Kerikil Batu	60,00	45.000,00
5.	Hasil Tambang Lainnya	-	0

Sumber : Dispenda Kab Probolinggo, 2008



Gambar 13 Peta Persebaran Bahan Galian Kabupaten Probolinggo

Sumber: Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo 2012

4.1.7 Industri

4.1.7.1 Perusahaan Industri

Berdasarkan hasil survei Industri Besar/Sedang yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo terjadi penurunan jumlah perusahaan, tercatat pada tahun 2010 terdapat 17 industri besar dan 41 industri sedang sedangkan di tahun 2011 ada 17 industri besar dan 40 industri sedang, dengan catatan bahwa industri besar adalah industri yang memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih dan industri sedang memiliki tenaga kerja antara 20 sampai dengan 99 orang.

4.1.7.2 Listrik

kebutuhan listrik dari tahun ketahun terus meningkat sejalan dengan berkembangnya perekonomian suatu wilayah dan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan terus bertambahnya jumlah pelanggan listrik dari bulan ke bulan pada tahun 2010 yaitu pada bulan Januari 2011 tercatat 138.215 pelanggan (71.964 pelanggan pada PLN UPJ Probolinggo) dan pada bulan Desember 2011 bertambah menjadi 151.366 pelanggan (81.760 pelanggan pada PLN UPJ Kraksaan dan 69.606 pelanggan pada PLN UPJ Probolinggo).

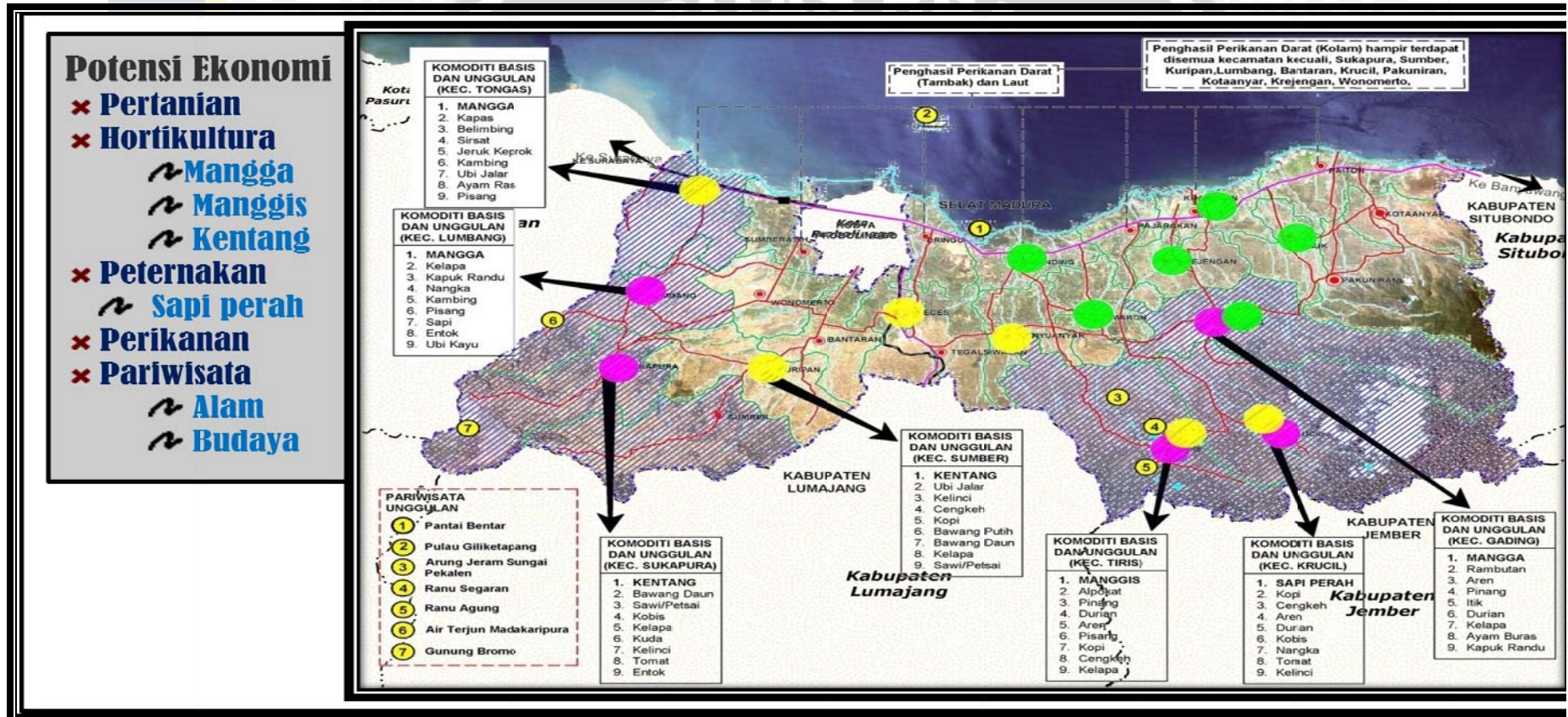
4.1.7.3 Air Minum

Pertumbuhan ekonomi serta tingkat kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari presentase masyarakat mengkonsumsi air bersih. Ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat mengkonsumsi air bersih. Ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut tercermin dari rata-rata konsumsi air bersih oleh masyarakat. Jika dilihat dari jumlah pelanggan air bersih PDAM mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2010 sebanyak 14.680 pelanggan menjadi 15.902 pelanggan di tahun 2011.

Rumah tangga merupakan jenis pelanggan PDAM terbanyak yaitu 13.765 rumah tangga atau sekitar 86,56% dari seluruh pelanggan PDAM. Namun jika dilihat dari banyaknya air minum yang diproduksi turun sebesar 1,02% dari tahun sebelumnya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA





Gambar 14 Peta Hidrologi Kabupaten Probolinggo

Sumber : Data Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo



4.1.8 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo

Rencana pola pemanfaatan ruang meliputi batas-batas kawasan lindung dan kawasan budidaya, letak, ukuran dan fungsi kawasan lindung dan budidaya.

4.1.8.1 Rencana pola ruang kawasan lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian kemampuan lingkungan hidup mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.

Pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo secara umum ditujukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya berbagai kerusakan fungsi lingkungan hidup terintegrasi antara kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dengan pelestariannya. Dalam konteks ini diharapkan bahwa penempatan ruang dalam rangka pengembangan wilayah diserasikan dengan kemampuan dan daya dukung wilayahnya.

Adapun kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo dapat dibagi menjadi: kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung lainnya. Adapun rencana pola pelestarian kawasan lindung adalah sebagai berikut.

Tabel 7 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

No	Pola Ruang Wilayah	Luas (Ha)
1.	Kawasan Hutan Lindung	22.650,80
2.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya:	
	a. Kawasan bergambut	
	b. Kawasan resapan air	2.507,794
3.	Kawasan perlindungan setempat:	
	a. Sempadan Pantai	1.087,622
	b. Sempadan Sungai	2.507,794
	c. Kawasan sekitar danau atau waduk	237,906
	d. Kawasan sekitar mata air	899,208
	e. Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal	-
	f. Kawasan perlindungan setempat lainnya	
	1) Sempadan Rel Kereta Api	72,827
	2) Sempadan SUTET	0,003
	3) Hutan mangrove	209,310
4.	Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya:	
	a. Kawasan suaka alam	-
	b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya	-
	c. Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut	7.452.000
	d. Cagar alam dan cagar alam laut	18,8
	e. Kawasan pantai berhutan bakau	258,459
	f. Taman nasional {BTS (Bromo, Tengger, Semeru} dan taman nasional laut	5.828,10
	g. Taman hutan raya	-
	h. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut	-
	i. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	-
5.	Kawasan rawan bencana alam	
	a. Kawasan rawan tanah longsor	32.423,5
	b. Kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir	1.461,072
	c. Kawasan rawan bencana alam lainnya	
	✓ Abrasi Pantai	596,742
6.	Kawasan lindung geologi:	
	a. Kawasan cagar alam geologi	-
	b. Kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah:	
	- Gempa tipe A	166.546,52
	- Gempa tipe B	5.891,08
	- Letusan Gunung :	
	Tipe A	3.165,45
	Tipe B	2.356,89
	Tipe C	2.364,95

Sumber: Kabupaten Probolinggo Dalam Angka

4.1.8.2 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan berupa kayu dan non kayu (damar,jati, mahoni,

pinus, rotan dan hasil hutan lainnya). Kawasan hutan produksi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air, berarti bahwa kawasan ini tidak boleh dialih fungsikan untuk kegiatan lain, dan harus dikendalikan secara ketat. Berdasarkan jenisnya, hutan produksi terbagi 3 (tiga) yaitu hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi konversi.

Tabel 8 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

No	Pola Ruang Wilayah	Luas (Ha)
1	Kawasan Hutan Produksi:	22.696,50
	a. Peruntukan Hutan Produksi Terbatas	-
	b. Peruntukan Hutan Produksi Tetap	-
	c. Peruntukan Hutan Produksi yang dapat dikonversi	-
2	Kawasan Hutan Rakyat	-
3	Kawasan Peruntukan Pertanian:	-
	a. Peruntukan Pertanian Lahan Basah	29.009,563
	b. Peruntukan Pertanian lahan Kering	697,644
	c. Peruntukan Peruntukan Hortikultura	-
4	Kawasan Peruntukan Perkebunan	28.137,581
5	Kawasan Peruntukan Perikanan:	-
	a. Peruntukan Perikanan Tangkap	51.908,79
	b. Peruntukan Budi daya Perikanan	1.996,76
	c. Peruntukan Kawasan Pengolahan Ikan	-
6	Kawasan Peruntukan Pertambangan:	-
	a. Peruntukan Mineral dan Batu Bara	-
	b. Peruntukan Minyak dan Gas Bumi	-
	c. Peruntukan Panas Bumi	-
	d. Peruntukan Air Tanah di kawasan Pertambangan	-
7	Kawasan Peruntukan Industri:	-
	a. Peruntukan Industri Besar	77,801
	b. Peruntukan Industri Sedang	1,204,53
	c. Peruntukan Indutri Rumah Tangga	-
8	Kawasan Peruntukan Pariwisata:	-
	a. Peruntukan Pariwisata Budaya	-
	b. Peruntukan Pariwisata Alam	-
	c. Peruntukan Pariwisata Buatan	-
9	Kawasan Peruntukan Permukiman:	-
	a. Peruntukan Permukiman Perkotaan	4.715,23
	b. Peruntukan Permukiman Perdesaan	12.052,56
10	Kawasan Peruntukan lainnya:	-
	a. Kawasan Peternakan	-
	b. Kawasan Khusus	-
	c. Rencana Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir dan Pulau Gili	-
	Ketapang:	-
	d. Kawasan Terbuka Hijau	13.368,75
	e. Lahan Cadangan	2.714,24

Sumber: Data Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo

4.1.8 Perhubungan

4.1.8.1 Jalan Raya

Jalan raya merupakan salah satu prasarana yang penting bukan hanya untuk memperlancar mobilitas penduduk melainkan juga untuk memperlancar perekonomian suatu daerah. Secara konsep, klasifikasi kondisi jalan adalah sebagai berikut:

A. Jalan Baik

Adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan 60 km/jam dan selama 2 tahun mendatang tanpa pemeliharaan/rehabilitas pada pengerasan jalan.

B. Jalan Sedang

Adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan 40-60 km/jam dan selama 1 tahun mendatang tanoa pemeliharaan/rehabilitasi pada pengerasan jalan.

C. Jalan Rusak

Adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan 20-40 km/jam dan perlu perbaikan pondasi.

D. Jalan Rusak Berat

Adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan dibawah 20 km/jam dan perlu perbaikan pondasi.

Jenis permukaan jalan dan kelas jalan mengalami perubahan kualitas dengan tahun lalu.Tetapi kondisi jalan yang baik mengalami perbaikan sepanjang 55,428 kilometer.Kondisi jembatan mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, hal ini terbukti dari jumlah dan panjang jembatan jenis beton yang bertambah.Sedangkan

peningkatan jumlah kendaraan yang diperiksa, dari 5.704 di tahun 2010 menjadi 6.099 di tahun 2011, atau ada kenaikan sebesar 6,92%.

4.1.8.2 Pos

Tidak ada perubahan dalam hal sarana perhubungan pos selama setahun terakhir ini, yaitu kantor pos sebanyak 21 buah dan bis surat sebanyak 58 buah bis surat. Sedangkan untuk kegiatan penjualan benda pos dan produk jasa, mulai dari jasa pengiriman surat baik dalam negeri maupun luar negeri hampir semuanya mengalami peningkatan yang cukup besar dibanding tahun 2010.

4.1.9 Hotel dan Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata terus digalakkan oleh pemerintah kabupaten probolinggo dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pembangunan obyek wisata dan segenap fasilitasnya. Untuk hotel, mengelompok di Kecamatan Sukapura karena disana ada obyek wisata yang terkenal dan merupakan salah satu obyek wisata primadona Jawa Timur yaitu Gunung Bromo yang sering dikunjungi oleh wisatawan asing maupun domestic. Sedangkan Kecamatan Kraksaan merupakan ibukota kabupaten sehingga relative lebih ramai dibandingkan kecamatan lainnya. Jumlah hotel yang ada di Kabupaten Probolinggo seluruhnya pada tahun 2011 sebanyak 23 hotel.

4.1.9.1 Sarana Wisata

Kabupaten Probolinggo merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pariwisata sebagai salah satu alternatif daerah tujuan wisata unggulan Jawa Timur maupun Nasional karena keanekaragaman obyek wisata yang dimilikinya. Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kabupaten

Probolinggo ini meliputi keseluruhan potensi atraksi atau sumber daya wisata, baik berupa sumber daya wisata alam (antara lain: hutan, air terjun, sungai, pegunungan, flora dan sebagainya) maupun budaya (antara lain: candi, bangunan bersejarah, adat-istiadat dan tradisi, dan sebagainya), serta potensi lainnya yang dapat dikembangkan untuk menarik kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Berdasarkan karakteristik daya tarik wisatanya, maka Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di kabupaten ini terbagi dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) **Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam** (*natural attractions*) yaitu obyek dan daya tarik yang berhubungan dengan lingkungan alam, termasuk di dalamnya adalah iklim, pemandangan alam, pantai dan laut, flora dan fauna. Fenomena alamiah lain (pegunungan, fenomena geologis, gua, geyser, aktivitas vulkanologis, sumber air panas dan lainnya), taman dan area konservasi (taman nasional, cagar alam), wisata kesehatan (tempat-tempat dengan sumber air panas, dan lainnya)
- 2) **Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya** (*cultural attractions*) yaitu obyek dan daya tarik yang berhubungan dengan aktivitas manusia. Atraksi-atraksi yang termasuk di dalamnya adalah situs arkeologis, sejarah, dan budaya (monumen, bangunan/ kota/ (Daerah bersejarah, bangunan ibadah), budaya, tradisi, gaya hidup yang unik (kebiasaan, pakaian, upacara, cara hidup, kepercayaan/agama), kesenian dan kerajinan, aktivitas ekonomi, kawasan perkotaan, museum dan fasilitas budaya lainnya, festival budaya, keramahan penduduk, dan lainnya.

3) **Obyek dan Daya Tarik yang Bersifat Khusus** (*special types of attractions*),

yaitu obyek dan daya tarik wisata yang tidak termasuk dalam kategori obyek dan daya tarik wisata alam dan budaya, yang diciptakan secara artifisial (buatan), mencakup di dalamnya antara lain taman bertema, gedung konvensi, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas belanja/shopping, fasilitas olah raga.

Gunung Bromo merupakan objek wisata primadona di Jawa Timur yang sangat populer dan selalu ramai dikunjungi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Gunung Bromo terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan pemandangan sangat indah dan mudah di jangkau. Berada pada ketinggian 1.000 – 3.676 mdpl terletak di kecamatan Sukapura. Di bagian utara pegunungan Tengger terdapat Kaldera Tengger yang sangat indah, garis tengah mencapai 8 – 10 km, sedangkan dindingnya yang terjal tinggi antara 200 – 700 m. Dasar Kaldera Tengger berupa laut pasir seluas 5.290 ha terdapat Gunung Bromo (2.610 m), gunung Batok (2.470 m), Gunung Kursi (3.392), Gunung Watangan (2.610 m), Gunung Widodaren (2.600).

Untuk mencapai Gunung Bromo dapat melalui route : Probolinggo – Tongas/ Ketapang – Sukapura – Ngadisari – Cemorolawang berjarak 42 km, dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi atau angkutan umum.

Gambar 16**Wisata Gunung Bromo**

Wisata Pantai Bentar merupakan objek dan daya tarik wisata dengan konsep Taman Rekreasi dan Hiburan keluarga yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti souvenir shop yang menyajikan produk unggulan serta pusat jajanan. Terletak di Kecamatan Gending.

Gambar 17**Wisata Pantai Bentar**

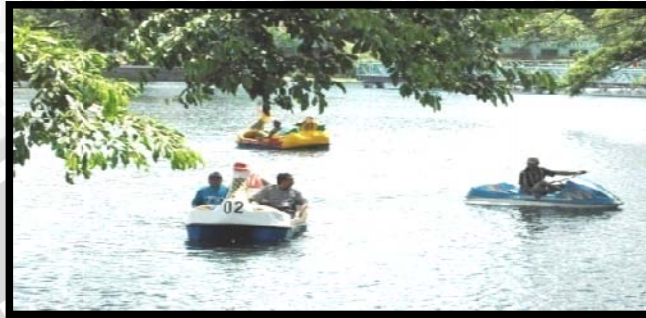
Kabupaten Probolinggo juga mempunyai tempat wisata minat khusus berupa arung jeram di arus sungai Pekalen dengan ketinggian 500 mdpl, dengan jarak tempuh 9 km ditempuh selama 2,5 -3 jam. Terletak di Kecamatan Tiris. Selain Arung jeram juga terdapat tempat wisata Ranu Segaran + Air Panas, Danau Ranu Agung dan Kebon Teh (wisata agro).

Gambar 18**Arung Jeram**

Air Terjun Madakaripura terletak di Kecamatan Lumbang merupakan tempat wisata yang mengandalkan pemandangan alamnya. Konon tempat tersebut merupakan tempat bertapanya Patih Gajahmada.

Gambar 19**Air Terjun Madakaripura**

Wisata Tirta Ronggojalu di Kecamatan Tegal Siwalan merupakan salah satu wisata air yang menarik di Kabupaten Probolinggo.

Gambar 20**Danau Ronggojalu**

Pulau Giliketapang yang terletak di Kecamatan Sumberasih, merupakan tempat wisata religi merupakan tempat persinggahan Sunan Gresik. Di sana terdapat tempat wisata pasir putih, wisata karang, dan ikan hias.

Gambar 21**Pulau Giliketapang**

Dalam usaha mengembangkan pembangunan kepariwisataan, sektor pariwisata telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan melalui program/kegiatan utama yaitu menggerakkan usaha-usaha meningkatkan arus kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Sedangkan untuk mewujudkan program kerja/kegiatan, dikemukakan program penunjang yang terkait dengan kepariwisataan, adalah:

1. Meningkatkan pemasaran dan promosi kepariwisataan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan, kenyamanan, kebersihan dan keindahan disekitar obyek daya tarik wisata.

Secara operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sub sektor pariwisata tahun anggaran 2008, dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pengembangan dan peningkatan fasilitas dan aksesibilitas di sekitar obyek daya tarik wisata yang dilaksanakan sejalan dengan upaya memelihara nilai-nilai budaya dan kelestarian lingkungan hidup yang berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar dan peningkatan PAD.
- 2) Mengikutsertakan masyarakat yang berada di sekitar obyek daya tarik wisata untuk secara aktif dalam upaya pengembangan dan pelestarian obyek wisata.
- 3) Mendorong terciptanya organisasi yang menangani usaha dan jasa bidang pariwisata.
- 4) Memberikan pelatihan, pendidikan dan membina insan pariwisata dalam upaya menggalakkan pelaksanaan Sapta Pesona.

Potensi pariwisata di Kabupaten Probolinggo sangat prospektif untuk terus dikembangkan, khususnya wisata alam yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik wisatawan Nusantara maupun Mancanegara. Adapun peranan perekonomian daerah yang mendukung sektor pariwisata, yaitu sektor perdagangan hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 19,01 % atau sebesar Rp. 885.776.460.000,- serta sektor pengangkutan dan komunikasi

memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 3,25 % atau sebesar Rp. 151.239.450.000,-.

Sedangkan potensi pariwisata yang sudah dikenal hingga ke mancanegara adalah Gunung Bromo, Air Terjun Madakaripura, Ranu Segaran, Ranu Agung, Wisata Laut Pulau Gili Ketapang dan Pantai Bentar, serta Arung Jeram Sungai Pekalen.

Adapun jumlah kunjungan wisatawan ke daerah wisata di Kabupaten Probolinggo, Wisatawan Nusantara 101.263 orang dan wisatawan mancanegara pada tahun 2006, yaitu sebesar 4.911 orang. Pada tahun 2007 wisatawan nusantara mengalami peningkatan sebesar 63.69 %, yaitu sebesar 64.494 orang. Sedangkan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan 3.487 orang.

(Data Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo:2012)

4.1.10 Potensi Sosial Budaya

Potensi sosial budaya di Kabupaten Probolinggo antara lain :

1. Masyarakat Tengger

Masyarakat Tengger berada di lereng gunung bromo yang sarat dengan acara yang selalu dikaitkan dengan upacara keagamaan maupun upacara adat. Karena sesanti “Titi Luri” yang mereka pegang teguh, maka setiap upacara dilakukan tanpa perubahan persis seperti yang dilaksanakan oleh para leluhurnya berabad-abad yang lalu (“Titi Luri”, berarti mengikuti jejak para leluhur atau meneruskan Agama, Kepercayaan dan Adat-istiadat nenek moyang secara turun temurun).

Selain taat beribadah dan sangat patuh menjalankan adat-istiadat, Masyarakat Tengger dikenal jujur, patuh, dan rajin bekerja. Mereka hidup sederhana, tenteram, dan damai. Nyaris tanpa adanya keonaran, kekacauan, pertengkaran maupun pencurian. Suka bergotong royong dengan didukung oleh sikap toleransi yang tinggi, disertai sesuatu yang khas, karena senantiasa mengenakan “kain sarung” kemanapun mereka pergi. Tidak terbatas laki-laki, namun wanitapun juga, yang dewasa maupun anak-anak, semua berkain sarung. Masyarakat Tengger masih percaya dengan roh halus, benda-benda gaib, tempat-tempat keramat serta berbagai mitos.

Tempat tinggal Masyarakat Tengger di kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru. Program jangka panjang Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru akan dikembangkan berbagai jenis tumbuhan penyangga sebagai daerah “*buffer zone*” untuk pelestarian alam serta keindahan dan populasinya, sangat diperlukan kondisi yang terjaga dan kepedulian masyarakat yang tinggal di lingkungannya. Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, bukan hanya menjadi kekayaan Nusantara, namun akan menjadi kebanggaan dunia Internasional. Masyarakat Tengger dengan “kondisi khasnya” sangat ideal untuk mendukung usaha-usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, sebagai “*buffer zone*” bagi kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru.

Gambar 22
Upacara adat tengger



2. Kesenian Kuda Kecak

Satu jenis kesenian yang paling unik dan menarik dari Probolinggo adalah tarian Kuda Kencak. Kata “kencak” sendiri berarti mengangkat kaki berulang kali. Satu gerakan indah dan jenaka yang dilakukan oleh kuda mengiringi irama bunyi-bunyian dari gamelan yang ditabuh oleh beberapa orang. Sang kuda diberi hiasan warna-warni. Seorang anak yang duduk dipunggungnya juga memakai pakaian yang tidak kurang gemerlapannya, diberi untaian bunga sekeliling kepalanya, dipayungi dengan payung berwarna serta diarak dan diperlakukan bagai pengantin. Tradisi ini sebenarnya dilakukan dalam upacara mengkhitankan seorang anak. Tetapi perkembangan menunjukkan bahwa kebiasaan ini juga dilaksanakan sebagai penebus nazar atau niat seseorang. Misalnya saja seseorang akan mempagelarkan Kuda Kencak apabila anaknya sembuh dari sakit. Maka bila anaknya benar-benar telah sembuh, si anak akan menari bersama kuda kencak dan diarak beramai-ramai.

Gambar 23
Kesenian Kuda Kekak



3. Tari Glipang

Merupakan sebuah tari yang bersumber dari kesenian rakyat Probolinggo yang hidup tumbuh dan berkembang ditengah kehidupan rakyat dan tarian ini diiringi dengan musik tradisional yang dinamakan “Glipang”. Tari Kiprah Glipang ini menggambarkan betapa gagah dan terampilnya para pemuda yang sedang berlatih olah keprajuritan. Perkumpulan Tari Kiprah Glipang yang terkenal berada di Desa Pendil – Banyuwangor hingga banyak orang berkeyakinan bahwa desa inilah tempat asal muasalnya kesenian ini.

Gambar 24
Kesenian Tari Gelipang



(Data Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo:2012)

4.1.11 Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Probolinggo dengan Ibukota Kraksaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2/2010 dibentuk secara resmi tanggal 18 april 1746 dan kini telah berusia 265 tahun. Secara administrative Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 Kecamatan,325 desa, 5 kelurahan, 1425 dusun, 1.581 RW dan 6.035 RT. Dilihat dari komposisi jumlah desa, Kecamatan Paiton memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 20 desa sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Kuripan yaitu 7 desa.

Selama tahun anggaran 2010 DPRD Kbupaten Probolinggo telah menghasilkan sebanyak 30 produk yang terdiri dari 6 Peraturan Daerah, 18 Keputusan DPRD dan 6 Keputusan Pimpinan. Sedangkan kegiatan peninjauan daerah telah dilakukan sebanyak 56 kali peninjauan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, Kabupaten Probolinggo mempunyai visi:

Terwujudnya Kabupaten Probolinggo Yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan dan Berakhlak Mulia. Adapun misinya adalah:

- a. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
- b. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

4.2 Profil BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Probolinggo

4.2.1 Kondisi Umum BPBD Saat Ini

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, baru dibentuk setelah terjadinya bencana erupsi Gunung Bromo pada tanggal 23 Nopember 2010, yang menimbulkan kerugian materi khususnya masyarakat di sekitar Lereng Gunung Bromo, walaupun disini tidak memakan korban jiwa. Kantor BPBD Kabupaten Probolinggo berada di Jl. Raya Soekarno-Hatta No. 27 Kota Probolinggo.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir BPBD Kabupaten Probolinggo akan melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Bupati dalam penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Probolinggo. Tolok ukur hasil kinerja BPBD tersebut dapat diketahui dari dokumen-dokumen perencanaan dan strategi dalam menangani serta mengatasi dan mencegah terjadinya bencana.

4.2.2 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

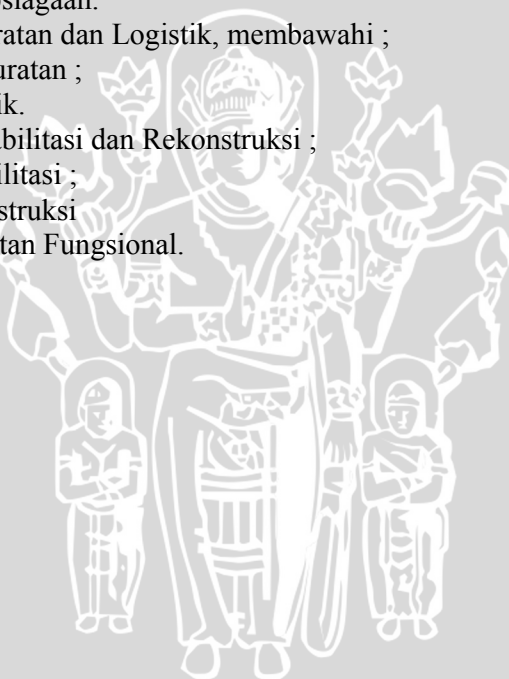
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Probolinggo serta Uraian Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD mempunyai tugas pokok membantu Bupati Probolinggo dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

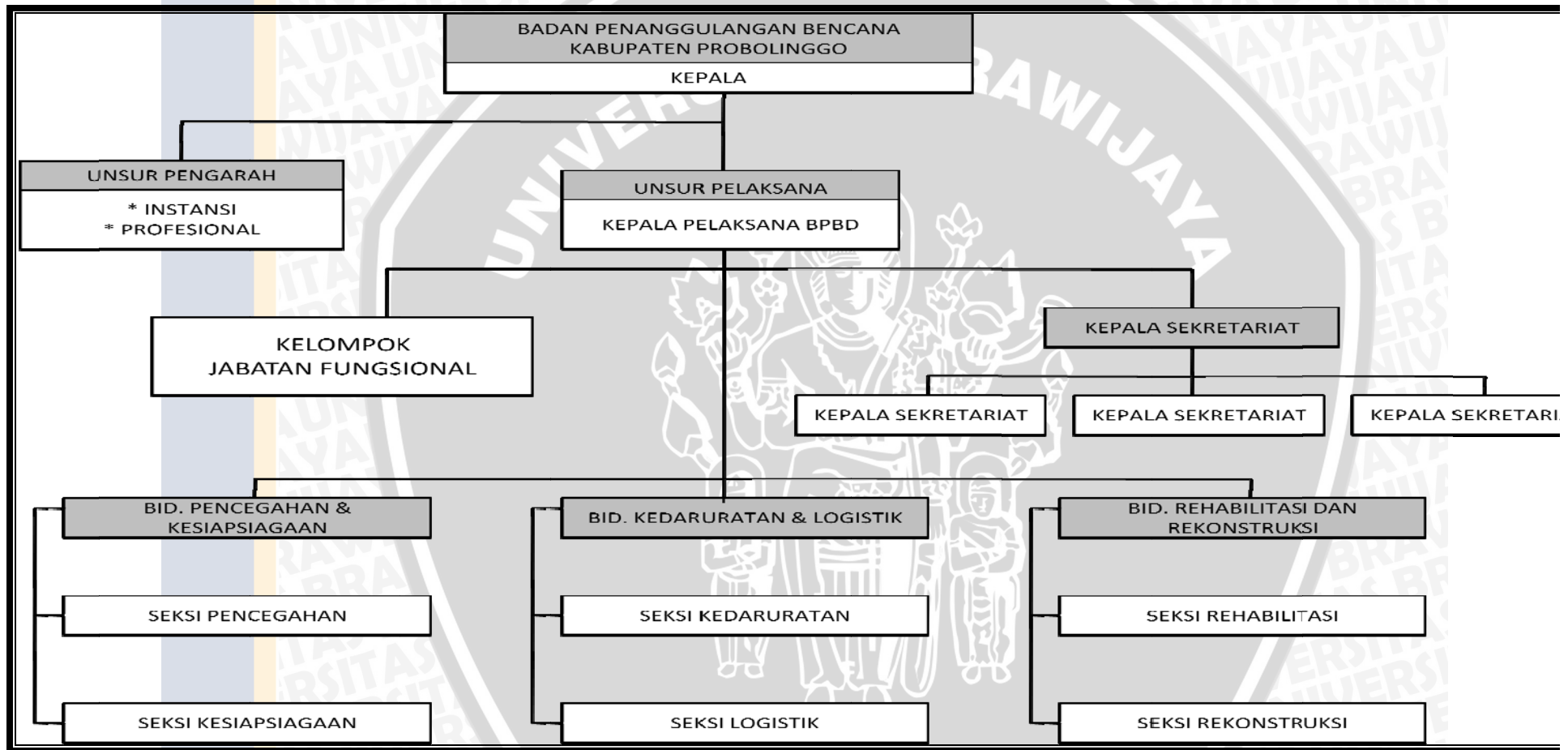
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPBD mempunyai fungsi dalam hal:

- a) Perumusan serta penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluru dan ;
- c. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
- d. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyusun dan menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
- f. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penangganan bencana ;
- g. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
- h. Mengendalikan pengumpulan serta penyaluran uang dan barang yang terkait dengan bencana ;
- i. Mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan anggaran yang diterima sesuai dengan ketentuan ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk itu secara garis besar susunan organisasi BPBD terdiri dari:

- a. Kepala Badan ;
- b. Unsur Pengarahan, meliputi :
 1. Instansi terkait ;
 2. Profesional/Ahli/Tokoh masyarakat.
- c. Unsur pelaksana, meliputi :
 1. Kepala Pelaksana ;
 2. Kepala Sekretariat, membawahi ;
 - Sub Bagian Perencanaan ;
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, membawahi :
 - Seksi Pencegahan ;
 - Seksi Kesiapsiagaan.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi ;
 - Seksi Kedaruratan ;
 - Seksi Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
 - Seksi Rehabilitasi ;
 - Seksi Rekonstruksi
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.





Gambar 25 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

Sumber: Data Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Probolinggo 2012 Dengan Modifikasi Penulis

4.2.3 Visi Dan Misi Renstra BPBD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Probolinggo mempunyai Rencana Strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2008 – 2013, yang telah memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Strategi BPBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 – 2013 sebagai berikut :

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

“Terwujudnya Upaya Penanggulangan Bencana Secara Cepat, Tepat, Efektif dan Efisien Terpadu dan Akuntabel Melalui Koordinasi”

Pengertian secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Terwujudnya** : makna upaya dan peran BPBD dalam mewujudkan perencanaan Penanggulangan bencana secara Siaga, Cepat dan Tanggap.
2. **Penanggulangan Bencana** : merupakan suatu proses untuk menentukan langkah Penanggulangan bencana secara terencana tepat dan tanggap.
3. **Cepat** : terkandung makna bahwa BPBD mengambil langkah secara cepat dalam mengatasi bencana daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada korban bencana.
4. **Tepat** : terkandung makna bahwa setiap kejadian alam / atau bencana alam harus tanggap dan dapat mengambil langkah pengamanan dan membantu masyarakat sebagai korban bencana.

5. **Efisien dan Efektif** :terkandung makna bahwa dalam pelaksanaan penanggulangan bencana segera mengambil kebijakan agar korban bencana mendapat perhatian dan pertolongan.
6. **Terpadu dan Akuntabel** : yaitu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana BPBD selalu mengadakan koordinasi dengan dinas instansi terkait dalam setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara cepat dan benar agar korban bencana segera mendapat pertolongan.

Untuk mewujudkan Visi BPBD Kabupaten Probolinggo di masa mendatang, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. **Meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).**

Misi pertama ; Peran BPBD dalam rangka pengembangan sumberdaya yang tersedia di BPBD Kabupaten Probolinggo. Pada masa mendatang tuntutan akan kualitas SDM aparatur penaggulangan bencana semakin tinggi, seiring dengan adanya kejadian alam yang tidak terduga. Adapun yang dimaksud dengan profesionalitas adalah suatu sifat dari aparatur yang dalam menjalankan tugasnya, selalu bekerja sesuai prosedur, memiliki kemampuan yang berlandaskan ilmu dan berkompeten.

2. Meningkatkan koordinasi secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Misi kedua ; mengacu kepada peran BPBD yang bersifat koordinasi dengan semua dinas instansi terkait dalam proses penanggulangan bencana dalam membantu korban bencana untuk melakukan tindakan yang cepat dan tepat.

3. Meningkatkan peran kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Misi ketiga ; sesuai dengan peran BPBD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana secara dini.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana

Misi keempat ; pada misi ini BPBD harus mampu dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara luas untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menjaga alam dengan baik agar tidak terjadi bencana.

4.2.4 Pembagian Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan

Pengungsi

1. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pengurangan resiko bencana;

- 3) Pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang kedaruratan dan logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik, mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 3) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 4) Pelaksanaan kerja sama dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsian dan dukungan logistik;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 3) Pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

4.2.5 Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Probolinggo

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat kabupaten.

Program Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan BPBD Kabupaten Probolinggo, yaitu:

1. *Program* Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan-kegiatan pendukung rutinitas aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

- a. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
- b. Penyediaan jasa Administrasi kepegawaian
- c. Penyediaan sarana dan prasarana kantor
- d. Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

2. *Program* Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana pendukung rutinitas aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

- a. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. *Program* Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan-kegiatan dalam upaya penguatan kelembagaan tim pengarah BPBD dalam mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana.

- a. Penguatan Kelembagaan Tim Pengarah BPBD

4. *Program* Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan-kegiatan dalam upaya penyusunan rencana program dan kegiatan BPBD.

- a. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan BPBD

5. *Program* Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan-kegiatan dalam usaha untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menjaga alam secara baik agar tidak terjadi bencana, serta memberikan pertolongan secara cepat pada daerah yang terjadi bencana.

- a. Bintel Pencegahan Dini dan Pengurangan Resiko Bencana (Mitigasi)
- b. Aktivasi Relawan dan Tim Reaksi Cepat
- c. Kesiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
(Sosialisasi, Desa Tangguh dan Pena Sekolah)
- d. Bintel Tim Reaksi Cepat BPBD (Simulasi Penanggulangan Bencana)
- e. Mitigasi dan Penyebaran Informasi Daerah Rawan Bencana
- f. Papan "Posko Penanggulangan Bencana" di Kecamatan
- g. Penanganan Pencegahan Kawasan Rawan Bencana
- h. Penyusunan Peta Rawan Bencana Kabupaten Probolinggo
- i. Rakor dan Sinkronisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

6. *Program* Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pasca Bencana).

Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan-kegiatan dalam usaha untuk memberikan Sosialisasi Pemulihan kembali dan Aktivasi masyarakat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.

- a. Sosialisasi, Penyuluhan dan Pemulihan kembali desa Terkena Bencana
- b. Aktivasi masyarakat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis masyarakat (Bakti Desa)
- c. Penunjang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (*Sharing Dana RR BNPB*)

7. Program Kedaruratan dan Logistik

Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan-kegiatan dalam pengadaan peralatan dan perlengkapan logistik serta untuk penanganan tanggap darurat.

- a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat
- b. Penanganan Siaga Darurat Bencana (banjir, longsor, kekeringan, kebakaran, angin puting beliung)
- c. Perlindungan Masyarakat Rentan Bencana (Sosialisasi)
- d. Bintek Kelogistikan Darurat Bencana
- e. Pemulihan Dini Kedaruratan
- f. Penunjang Tanggap Darurat Kerusakan Konstruksi Akibat Bencana (*Sharing Dana DSP BNPB*)

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Probolinggo terletak di Lereng gunung-gunung yang membujur dari Barat ke Timur, yaitu Gunung Semeru, Argopuro, Tengger, dan Lamongan. Selain itu terdapat gunung lainnya, yaitu

Gunung Bromo, Widodaren, Gilap, Gambir, Jombang, Cemoro Lawang, Malang, dan Batujajar. Kabupaten Probolinggo memiliki 2 buah gunung berapi yang berpotensi menimbulkan bencana yaitu Gunung Bromo dan Gunung Lamongan. Gunung Bromo merupakan gunung api yang sering meletus lemah, berupa letusan freatik atau magmatik tipe Stromboli. Material yang diletuskan berupa batu (pijar) dan hembusan gas beracun hanya terbatas disekeliling kawah atau dasar kaldera Lautan Pasir. Ancaman hujan abu lebat tidak lebih dari jarak 6 Km dari kawah Gunung Bromo.

Gunung Bromo merupakan gunung berapi yang masih aktif mempunyai potensi disamping sebagai obyek wisata, juga dapat menimbulkan bencana letusan gunung berapi. Wilayah-wilayah yang masih berada dalam jangkauan letusan gunung berapi seperti Kecamatan Sukapura dan Kecamatan Sumber perlu mewaspadaai aktifitas yang terjadi di kawah Gunung Bromo. Melihat keadaan yang demikian Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu menangani secara serius terhadap akibat dan dampak bencana yang akan mengganggu tingkat kesejahteraan masyarakat.

4.3 Gunung Bromo dan Tingkat Bahayanya

Gunung Bromo adalah kerucut gunung api aktif yang paling muda paska pembentukan Kaldera Lautan Pasir dari Kompleks Gunung Tengger. Kerucut ini tercatat sebagai salah satu gunung api yang sering mengalami erupsi dari 129 gunung api aktif di Indonesia. Tenggang waktu antara satu erupsi dengan erupsi lainnya terjadi kurang dari satu tahun sampai dengan 16 tahun sejak pertama kali

tercatat tahun 1804. Pada waktu sebelum tahun tersebut bukannya gunung api ini tidak pernah mengalami erupsi, tetapi pencatatan erupsinya baru dimulai pada 1804 oleh Belanda.

Aktivitas Gunung Bromo yang terjadi saat ini tidak terlepas dari catatan sejarah geologi Kompleks Tengger itu sendiri. Endapan-endapan jatuhan abu atau jatuhan piroklastik yang didominasi oleh pasir halus merupakan ciri khas kompleks gunung api ini. Batuan di sekitar dan di dalam Kaldera Lautan Pasir terbentuk dari endapan abu dan pasir yang berhubungan dengan pembentukan Kaldera Lautan Pasir dan kawah Gunung Widodaren (Zaennudin, 1990). *Menurut legenda dan sejarah gunung bromo* diterangkan perihal asal usul suku tengger gunung bromo ini. dahulu di pulau jawa di perintah oleh raja brawijaya dari majapahit yang memiliki anak wanita bernama rara anteng yang menikah dengan joko seger, keturunan brahmana. saat berlangsung pergolakan di pulau jawa, beberapa masyarakat yang setia pada agama hindu melarikan diri ke pulau bali. beberapa yang lain menarik diri dari dunia keramaian serta bermukim di sesuatu dataran tinggi di kaki gunung bromo, dipimpin oleh roro anteng serta joko seger, jadilah mereka suku tengger, kependekan dari anteng serta seger.

Selama abad ke-20, gunung yang terkenal sebagai tempat wisata gunung bromo itu meletus sebanyak tiga kali, dengan interval waktu yang teratur, yaitu 30 tahun. Letusan terbesar terjadi 1974, sedangkan letusan terakhir terjadi pada 2004.

2004, 2001, 1995, 1984, 1983, 1980, 1972, 1956, 1955, 1950, 1948, 1040, 1939, 1935, 1930, 1929, 1928, 1922, 1921, 1915, 1916, 1910, 1909, 1907, 1908, 1907, 1906, 1907, 1896, 1893, 1890, 1888, 1886,

1887, 1886, 1885, 1886, 1885, 1877, 1867, 1868, 1866, 1865, 1865, 1860, 1859, 1858, 1858, 1857, 1856, 1844, 1843, 1843, 1835, 1830, 1830, 1829, 1825, 1822, 1823, 1820, 1815, 1804, 1775, dan 1767.

4.3.1 Legenda Masyarakat

Bromo berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *Brahma*, yang merupakan salah seorang Dewa Utama Hindu("Bromo" dalam bahasa jawa kawi kuno), di situ di sebutkan bahwa gunung bromo adalah merupakan tanah suci (hila-hila) tanah wangi (harum) dan merupakan pelinggih / tempat beristananya Shang Hyang Brahma yang di gunakan sebagai tempat pemujaan oleh Ulun Hyang (Abdi Dewata) dari situlah nama gunung bromo berasal.

Cerita menurut masyarakat sekitar konon jaman dahulu kala di daerah pegunungan sekitar pelabuhan Gunung Bromo berdiam seorang putri dari keturunan Brahmana dan seorang putra bernama Jaka Seger juga keturunan Brahmana. Keduanya di tempat yang baru ini menjalin asmara dan ingin membentuk rumah tangga yang bahagia. Setelah perkawinannya diresmikan oleh Resi Dadap Putih, pegunungan ini dinamakan "Tengger".

4.3.2 Karakter dan ciri letusan

Bromo adalah gunungapi tipe A Gunung berapi yang pernah mengalamierupsi magmatik sekurang-kurangnya satu kali sesudah tahun 1600 dan berjenis cinder cone, gunungapi yang terutama dibentuk oleh litifikasi abu gunungapi, yang berada di dalam kaldera Tengger. Gunung berapi jenis ini terbentuk dari ledakan yang sangat kuat yang melempar ujung atas gunung

sehingga membentuk cekungan. Gunung Bromo terletak sekitar 42 km dari pusat Kota Probolinggo.

Beberapa potensi bahaya yang terjadi sehubungan dengan aktivitas vulkanik Gunung Bromo diantaranya:

1. Lontara Batu (Pijar)

Lontaran batu merupakan pecahan batuan gunung api, berupa bongkah atau bom gunung api (berdiameter 64 mm), dan lapili (berdiameter 2-64 mm) yang dilontarkan dari kawah pada saat gunung api tersebut meletus. Pada saat letusan freatik, lontaran batu ini tidak membara, tetapi pada letusan magmatic material tersebut berpijar.

2. hujan abu

Hujan abu adalah hujan rempah gunung api berbutir halus, lempung pasir berdiameter 2mm, hujan abu lebat dan lembab atau basah dengan ketebalan lebih dari 4 cm. saat terjadi hujan abu, sebaiknya masyarakat berlindung dibawah bangunan yang kuat dan kokoh serta selalu memakai pelindung mata dan kain basah penutup hidung. Atap bangunan yang tertutup endapan abu harus segera dibersihkan untuk menghindari kerusakan yang lebih parah atau robohnya atap bangunan. Hujan abu dapat terjadi disekeliling Gunung Bromo dengan jari-jari 6 km dari kawah.

3. bahaya gas beracun

Pada keadaan aktif normal maupun sedang meletus Gunung Bromo dapat mengeluarkan bahan gas gunung api yang beracun dan berbahaya bagi kehidupan. Gas yang umumnya keluar menyertai terjadinya letusan adalah mofet, solfatara

dan furmarol. Mofet adalah hembusan gas gunung api terutama mengandung CO dan CO₂ yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Konsentrasi gas beracun ini meningkat di dalam kawah pada saat meletus, atau cuaca mendung, berkabut, hujan dan tidak ada angin (direktorat vulkanologi: 1996)

Solfatara adalah hembusan gas gunung api yang banyak mengandung gas belerang. Gas ini mudah dikenal karena berbau seperti telur busuk. Biasanya disekitar lubang. Gas ini mudah dikenal karena berbau seperti telur busuk. Biasanya disekitar lubang hembusan gas belerang membentuk endapan belerang berwarna kuning dan berasa asam. Fumarol adalah hembusan gas gunung api yang banyak mengandung uap air (H₂O). Periode kegiatan Gunung Api Bromo berlangsung beberapa hari hingga satu tahun. Jarak letusan satu ke letusan lainnya bervariasi dari 1-12 tahun. Kegiatan letusan umumnya diawali dengan suara desisan atau gemuruh dari dalam kawah, diikuti hembusan asap hitam berketinggian lebih dari 100 m dari puncak gunung api dan akhirnya terjadi hujan abu di daerah sekitarnya (Sulistyo: 2002).

Ciri lain dari letusan Gunung Bromo adalah berdasarkan bentuknya Gunung Bromo termasuk ke dalam jenis kaldera, yaitu gunung api yang terbentuk dari erupsi kecil Gunung Bromo yang kemudian melempar ujung atas gunung itu sendiri. Hal itu disebabkan aktivitas vulkaniknya yang tidak terlalu besar seperti Gunung Merapi dan juga erupsinya tergolong erupsi kecil. Selain itu, Gunung Bromo juga berada di dalam kawasan kaldera Pegunungan Tengger sehingga menyebabkan aktivitas vulkanik pada magma chamber menjadi terbagi dengan gunung api lainnya.

Tabel 9

Data Letusan Gunung Bromo

No	Urutan Letusan	Keterangan
1.	1804	Bulan September
2.	1815	-
3.	1820	-
4.	1822-1823	28 Desember-Januari
5.	1825	5-8 Nopember
6.	1829	3 Maret dan 15-16 Desember
7.	1830	3 Maret dan 15-16 Desember
8.	1835	-
9.	1842	24 Januari-Juni
10.	1843	24 Januari-Juni
11.	1844	9 Nopember
12.	1856	-
13.	1857	-
14.	1858	4 Maret dan 1-18 Desember
15.	1859	-
16.	1860	12-14 Juni
17.	1865	April, Mei, dan 1-18 Desember
18.	1866	Juli
19.	1867	13 Desember
20.	1868	12 Januari
21.	1877	14 April
22.	1885	Juni ?, 31 Oktober- 30 Desember
23.	1886	1-10 Januari; 15-26 April, Nopember dan 31 Desember
24.	1887	9-25 Januari
25.	1888	27 Pebruari
26.	1890	Mei-September
27.	1893	Januari-27 Maret
28.	1896	-
29.	1906	25 September – 26 Desember
30.	1907	11-15 Januari, 19 Maret, 18 Mei, 28 Agustus, 14-26 Desember
31.	1908	12 Pebruari
32.	1909	12-14 Januari
33.	1910	18-21 Januari
34.	1915	Nopember dan Desember
35.	1916	Januari-Juni
36.	1921	Juni-17 Oktober
37.	1922	5-17 Pebruari; 14 april, 10-20 Juni
38.	1928	April-Juli; 16 Desember
39.	1929	7 Agustus-8 September
40.	1930	30 Mei-25 Juni
41.	1930	29 Juni-Juli
42.	1935	Juli
43.	1940	25 April-2 Mei, 3 Juli
44.	1948	15 Pebruari-25 April

45	1949	Duragukan
46	1950	27-29 Mei
47	1956	?
48	1972	26 Januari diawali dengan terdengarnya suara gemuruh dari dalam bumi, kemudian disusul oleh munculnya tiang asap yang warnanya agak gelap. Hujan terus menerus dari 26 Januari-13 Pebruari, selanjutnya hujan abu turun kadang-kadang saja
49	1980	<p>Hembusan asap selama 1-2 hari saja, kemudian diikuti oleh suara dentuman dan lemparan material gunung api pijar ke uadara. Kegiatan terus meningkat sampai pada tanggal 21 Juni 1980 yang merupaka puncak kegiatan berupa letusan-letusan kecil terus berlangsung, setiap menit terjadi 2-3 kali letusan.</p> <p>Letusan besar terjadi pada selang waktu setiap 2-3 menit yang menyemburkan abu, pasir, dan bonkahan lava bergaris tengah 1-1,7 meter, tersebar di sekitar bibir kawah bagian luar. Penyebaran abu kea rah barat laut sejauh lebih kurang 5 kilometer di daerah kampung Tosari. Lemparan material bergaristengah 10-25 cm mencapai jarak lebih kurang 1.700 meter di kaki G. Batok</p> <p>Pada tangal 11-14 Juli terjadi peningkatan lagi berupa semburan asap berwarna hitam setinggi lebih kurang 800-1.500 meter di atas kawah. Hujan abu terjadi di daerah Ngadisari yang berjarak lebih kurang 5 kilometer dari kawah.</p> <p>Pada tanggal 24 Juli terlihat pertumbuhan sumbat lava di dasar kawah.</p>
50	1984	12-31 Mei, terjadi peningkatan kegiatan G. Bromo titik letusan diperkirakan di dasar kawah bagian utara dengan lobang letusan berdiameter lebih kurang 7 meter.
51	1995	9 maret, terjadi letusan asap disertai hujan abu dengan ketinggian asap berkisar 80-250 meter di atas puncak. Penyebaran abu halus mencapai jarak lebih kurang 20 kilometer terutama kea rah tenggara sesuai dengan arah angin mengakibatkan lebih kurang 1.000 hektar perkebunan rusak, kegiatan ini masih berlangsung sampai pada bulan mei.
52	2004	Setelah beristirahat lebih kurang 3,5 bulan pada tanggal 9 september, G. Bromo kembali menunjukkan peningkatan kegiatan berupa hembusan asap disertai abu setinggi lebih kurang 70 meter. Kegiatan hembusan ini makin meningkat dan mencapai puncaknya pada tanggal 25 september dengan ketinggian asap mencapai 700 meter di atas puncak. Gempa hembusan terjadi terus menerus dan diselingi oleh gempa letusan dengan aplitudo maksimal mencapai 51 mm. kegiatan ini berangsur-

		angsur menurun dan berakhir pada bulan desember
		8 juni 2004, terjadi letusan freatik dengan tinggi asap 3000 m dari bibir kawah. Akibat letusan itu telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 2 orang dan 5 luka-luka. Sampai saat ini 9 juli 2004 gempa-gempa

Sumber: Dongeng Geologi 2010

UNIVERSITAS BRAWIJAYA





Gambar 27 Gunung Bromo Dari Penanjakan
Sumber : Foto Peneliti Tanggal 17 Oktober 2013



Gambar 28Kawah Gunung Bromo

Sumber: Foto Peneliti Tanggal 17 Oktober 2013

4.3.3 Daerah Rawan Bahaya Letusan Gunung Bromo

Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi bertujuan untuk memberikan informasi di dalam pengembangan wilayah dan perencanaan tata ruang wilayah. Peta tersebut berisi informasi mengenai pembagian tingkat kerawanan bencana yang berdasarkan pada gejala geologi, bentang alam, dan aktifitas gunungapi yang bersangkutan. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang diakibatkan oleh aktifitas gunungapi, sangat diperlukan pengetahuan secara umum tentang gunungapi dan pengetahuan lainnya yang sangat berkaitan dengan bencana gunungapi, terutama kepada penduduk yang berdomisili di daerah rawan bencana, yaitu dengan memberikan penyuluhan/bimbingan kepada penduduk, sehingga dapat menghindarkan diri atau menjauh dari wilayah gunungapi sebelum terjadi letusan atau pada saat aktifitas gunungapi meningkat.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah memetakan daerah-daerah rawan bahaya letusan Gunung Bromo yang berdasarkan pada peta rawan bencana meliputi:

- a. Kawasan Rawan Bencana I (KRB I) kawasan ini berpotensi terlanda hujan abu lebat dan kemungkinan lontaran batu (pijar) terutama apabila tingkat letusan Gunung Bromo membesar atau mencapai puncaknya. Kawasan ini meliputi daerah mulai dari pematang kaldera lautan pasir hingga jari-jari 6 km berpusat di kawah Gunung Bromo. Luas Kawasan Rawan Bencana Gunung Bromo ini adalah 63 km² dengan penduduk berjumlah 4.626 jiwa (data sensus 1994). Selain kompleks pariwisata Bromo-Tengger di Cemorolawang, maka desa-desa yang termasuk di

dalam Kawasan Rawan Bencana I adalah Ngadisari,, Jetak, Wonotoro dan Wonokerto.

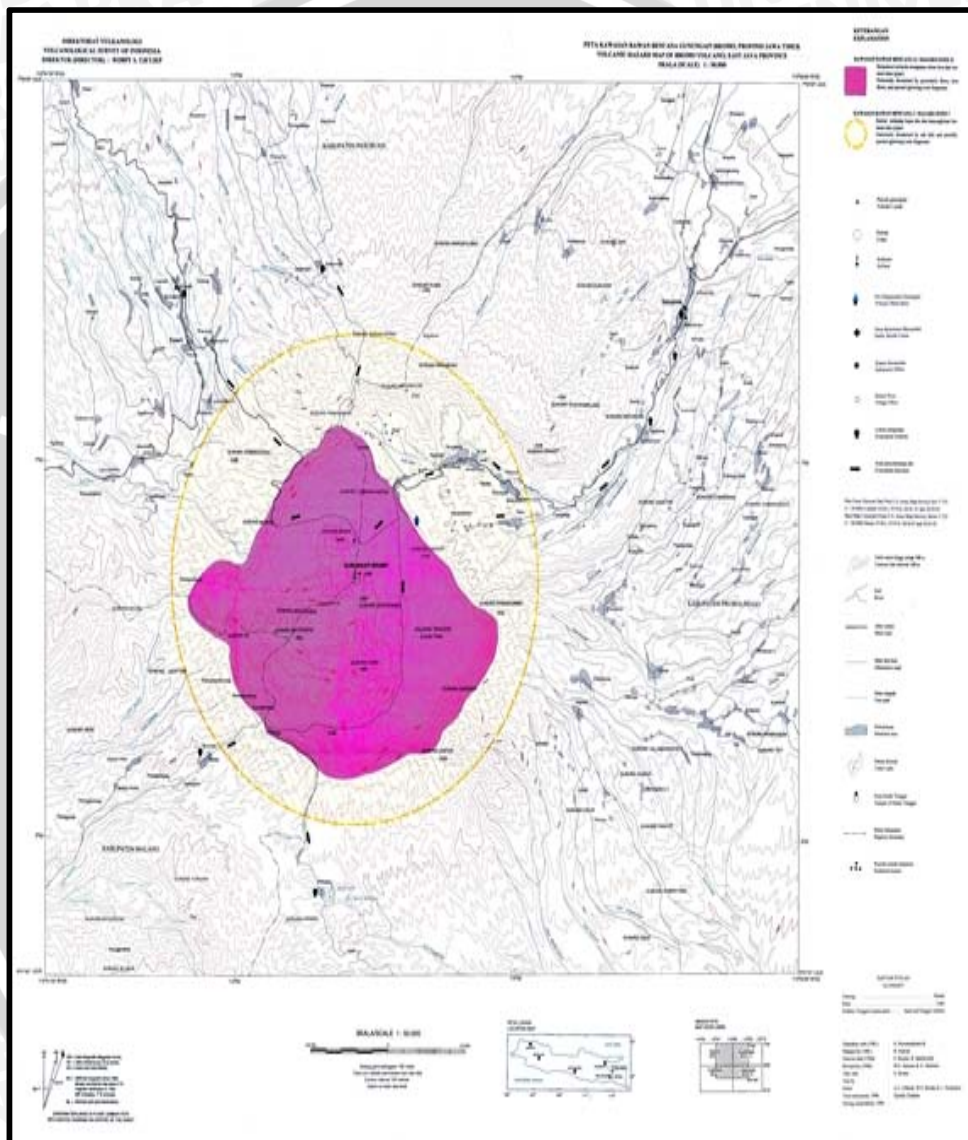
Apabila terjadi peningkatan kegiatan/letusan Gunung Bromo maka penduduk, wisatawan dan para pengelola pariwisata di Kawasan Rawan Bencana I ini harus meningkatkan kewaspadaan dengan memperhatikan dan mematuhi perintah dari pihak berwenang.

Dalam keadaan memaksa penduduk di Kawasan Rawan Bencana I ini dapat diperintahkan untuk mengungsi oleh pihak berwenang. Untuk itu penduduk harus mengetahui dan memperhatikan arah/jalur penyelamatan diri serta lokasi pengungsian seperti tercantum dalam peta.

- b. Kawasan Rawan Bencana II (KRB II) ini lebih tinggi daripada Kawasan Rawan Bencana I, yaitu berupa lontaran batu (pijar), aliran lava dan gas beracun. Kawasan ini meliputi seluruh dasar dan tebing kaldera tengger dengan luas 50 km² dan radius 2-5,5 km berpusat di kawah Gunung Bromo. Sehingga Kawasan Rawan Bencana Gunung Bromo ini juga meliputi Gunung Batok, Gunung Segorowedi, Gunung Kursi, dan Gunung Widodaren.

Apabila terjadi peningkatan kegiatan/letusan Gunung Bromo maka penduduk dan wisatawan dilarang turun ke dasar kaldera apalagi mendekati Gunung Bromo dan gunung api- gunung api lain disekitarnya. Bagi mereka yang terlanjur sudah berada dipuncak Gunung Bromo dan dasar kaldera harus segera naik sesuai arah/jalur penyelamatan diri yang tertera di dalam Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Bromo ini.

Mereka yang turun ke dasar kaldera dan ke puncak Gunung Bromo juga diharuskan melengkapi diri dengan helm penyelamat kepala dari benturan/lontara kerikil dan batu, serta masker gas debu.



Gambar 20 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Bromo

Sumber : Data Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo 2012

4.3.4 Letusan Gunung Bromo 10 Tahun Terakhir

A. Letusan Tahun 2004

Menurut catatan, letusan Gunung Bromo pada tahun 2004 dengan tinggi letusan abu panas mencapai 3 kilometer. Saat itu 2 wisatawan asal Singapura, yang tengah menikmati pemandangan di kawasan kawah, meregang nyawa. Mereka tewas akibat lontaran material vulkanik berupa batu dan kerikil panas. Letusan pada 2004 berlangsung singkat dengan karakter letusan freatik (ringan sampai sedang) dengan ciri awal yang kurang jelas. Gunung Bromo memiliki potensi letusan freatik tiba-tiba, dan asap dengan ketinggian 100-150 meter.



Gambar 21 Erupsi Gunung Bromo 2004

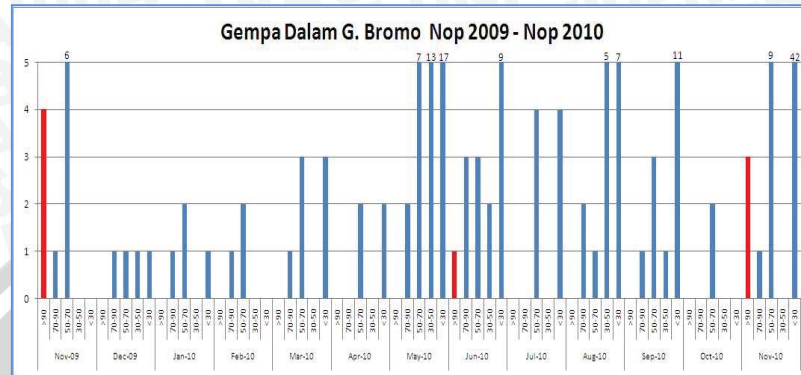
Sumber : Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo 2012

Berhubung jarak letusan Gunung Bromo 2004 ini sudah lama terjadi, peneliti sempat kesulitan dalam mencari narasumber yang bisa menjelaskan tentang kronologis letusan Gunung Bromo Tahun 2004. Namun, setelah beberapa kali berkeliling desa, peneliti bertemu dengan seorang warga di Desa Sukapura yaitu Bapak Untung yang baru saja pulang dari ladang mengungkapkan:

“letusan 2004 waktu itu terjadi sekitar jam 13.30 mbak, tapi saya lupa tanggal terjadinya. Hanya saja seingat saya memang ada korban jiwa, bahkan korbannya ada yang warga asing. Sebenarnya letusan 2004 itu tidak besar, karena proses letusannya hanya berlangsung 1 jam saja dan lontaran batu pijar hanya berada di wilayah kaldera saja. Cuma permasalahannya hingga bisa timbul korban itu karena letusannya yang dadakan, tidak ada tanda-tanda meletus sebelumnya.”(interview Tanggal 16 Oktober 2013 di Desa sukapura)

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa keadaan tenang Gunung Bromo bukan berarti aman dari bencana erupsi Gunung Api Bromo. Mengingat status Gunung Bromo merupakan gunung api aktif yang setiap saat dapat menghamburkan batu pijar dan abu vulkanik yang merupakan kegiatan dari erupsi gunung api sehingga dapat menimbulkan bencana bagi lingkungan sekitar khususnya penduduk sekitar kawasan rawan bencana Gunung Bromo.

B. Letusan Tahun 2010



Gambar 22 Gempa vulkanik dalam Gunung Bromo antara November 2009 sampai dengan November 2010.

Keterangan : Garis Merah = Gempa Vulkanik Kedalaman > 9.000 M, Yang Diinterpretasikan Bahwa Ada Gerakan Magma Dari Suatu Kedalaman Ke Arah Permukaan

Sumber : Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi

Letusan Gunung Bromo terjadi pada hari jumat tanggal 26 November 2010 pukul 17.22 WIB. Letusan tersebut terjadi setelah 4 hari berada dalam status awas terhitung mulai tanggal 23 November 2010 pukul 15.30 WIB. Letusan Gunung saat itu hanya mencapai 600 meter saja dan diawali dengan gempa tremor dengan amplitudo sekitar 35 milimeter, jadi letusan vulkaniknya masih berada di sekitar kawasan kaldera (lautan pasir) Bromo saja.

Erupsi yang terjadi hingga pertengahan bulan Desember 2010 ini disertai angin ke arah barat dan barat laut, sehingga wilayah tersebut sampai ke Malang bagian barat dan Pasuruan bagian barat laut dihujani abu Gunung Bromo. tiupan angin berubah arah ke arah utara, timurlaut, timur, dan kadang-kadang ke tenggara, sehingga daerah di wilayah tersebut selalu dihujani abu vulkanik Bromo. Ke arah utara dikabarkan endapan abu tipis mencapai pantai selatan Pulau Madura,

Situbondo di sebelah timur, dan Jember di sebelah tenggara. Penjelasan kronologi letusan Gunung Bromo 2010 ini dijelaskan juga oleh Bapak Abdul Ghofur selaku Kepala Sekolah Sekolah Dasar Ngadirejo saat itu mengatakan:

“pada waktu terjadinya erupsi 2010 saat itu kira-kira tanggal 28 November mbak, saat murid-murid sedang libur sekolah. Seminggu sebelum kejadian tersebut sudah ada tanda-tanda seperti adanya hujan debu tapi tipis-tipis. Istilahnya Gunung Bromo sedang “batuk”. Sebelumnya saya dan masyarakat lain tidak mengira kalau akan terjadi letusan yang separah ini. Kondisinya gelap gulita. Dan tiba-tiba saat itu ketebalan abu vulkanik mencapai 50-70 cm.” (Interview tanggal 17 Oktober di Desa Ngadirejo)





Gambar 23 Erupsi Gunung Bromo 2010

Erupsi abu Gunung Bromo pada November 2010. Pada saat itu angin bertiup ke arah barat dan barat laut dilihat dari arah timur.

Foto Oleh : Fajidi dalam Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi, Vol. 2 No. 1

Erupsi Gunung Bromo memiliki dampak bencana di 4 kecamatan di kabupaten Probolinggo meliputi:

1. Wilayah Kecamatan Sukapura meliputi 12 desa
2. Wilayah kecamatan lumbang meliputi 10 desa
3. Wilayah kecamatan sumber meliputi 8 desa
4. Wilayah kecamatan kuripan meliputi 7 desa

Kerusakan bencana erupsi Gunung Bromo tersebut meliputi : penduduk, tanaman perkebunan dan kehutanan, pertanian, peternakan, perumahan dan fasum, jalan dan jembatan, dam dan sungai.

Dengan rincian rumah rusak sebagai berikut:

1. Rusak ringan : 8 rumah
2. Rusak sedang : 292 rumah
3. Rusak berat : 30 rumah

Total : 330 rumah

Pada sektor pengairan mengalami kerusakan 7 dam dan pengikisan tebing kanan dan kiri hulu hilir jembatan sebanyak 7 buah serta terjadi sedimentasi hulu hilir jembatan sebanyak 1 buah. Tidak ada korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Korban yang dirawat inap 1 (satu) orang di Puskesmas dan telah pulang sembuh. Korban luka ringan 1 (satu) orang.

C. Letusan Tahun 2011

Erupsi bromo tahun 2011 merupakan kelanjutan dari erupsi 2010 yang berlangsung secara fluktuatif dan terus-menerus. Dimana terjadi erupsi besar di awal februari sehingga fragmen yang berukuran 50 cm terlempar sampai sejauh 1.300 m. Oleh karena itu wilayah di dalam kaldera tersebut merupakan daerah rawan terhadap lemparan batu pijar. Gunung api ini terus menerus mengeluarkan material vulkanik, bergumpal-gumpal menembus udara setinggi 400 – 1.000 m berupa abu-pasir kasar. Dalam seismogram kondisi ini terekam berupa gempa *tremor* terus menerus dengan amplitudo antara 5 mm sampai 30 mm. Apabila erupsi disertai oleh suara gemuruh dan dentuman maka amplitudonya meningkat melebihi 40 mm.

Erupsi yang disertai oleh suara dentuman merupakan erupsi magmatik melemparkan fragmen-fragmen baru (*juvenile*) yang berukuran *lapilli* (> 6 mm) sampai bongkah yang berukuran > 2 m. Fragmen-fragmen tersebut terlemparkan hanya di dalam Kaldera Lautan Pasir. Pada 5 Februari 2011 terjadi erupsi cukup besar sehingga fragmen yang berukuran 50 cm terlempar sampai sejauh 1.300 m. Oleh karena itu wilayah di dalam kaldera tersebut merupakan daerah rawan terhadap lemparan batu pijar.

Erupsi Gunung Bromo 2011 diceritakan oleh Bapak Subur selaku warga di Desa Jetak Kabupaten Sukapura:

“Erupsi Gunung Bromo 2011 terjadi hingga Bulan Juni 2011 mbak, setiap harinya pemandangan yang kami lihat adalah hujan debu dan pasir koral, selain itu kegiatan kami sehari-hari hanya membersihkan genting dari debu pakai cangkul mbak, upaya antisipasi biar rumah kami tidak roboh.” (*Interview 16 Oktober 2013 di Desa Jetak*)

4.4 Penyajian data

4.4.1 Upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mitigasi bencana di wilayah Kabupaten Probolinggo

Beberapa komponen yang perlu ditelaah dan menjadi perhatian peneliti terkait upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dilakukan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Probolinggo dalam mitigasi bencana erupsi Gunung Bromo diantaranya adalah regulasi, sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan satgas penanggulangan bencana, dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana.

A. Regulasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam Penanggulangan bencana

Dalam upaya penanggulangan bencana, termasuk yang terkait dengan program mitigasi bencana erupsi Gunung Bromo, Pemerintah Kabupaten Probolinggo memiliki 2 (dua) produk hukum di tingkat daerah yaitu berupa Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda).

Pertama, Peraturan Bupati Probolinggo no. 6 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo. Dimana produk hukum tersebut merupakan acuan dari perundang-undangan tingkat nasional yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Bencana.

Hal tersebut dikemukakan oleh Kasubag Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Bapak Kukuh berikut:

“Dasar hukum keseluruhan pelaksanaan penangulangan bencana di Kabupaten Probolinggo untuk sementara ini hanya ada satu ini mba, Peraturan Bupati Probolinggo nomor 6 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo. Karena memang terbentuknya BPBD di Kabupaten Probolinggo ini masih baru. Susunan organisasi BPBD yang lebih rinci ada di dalam Perbup tersebut dan dalam bagan struktur organisasi yang nanti akan saya beri datanya.” (*interview* hari senin tanggal 29 Juli 2013)

Pernyataan Bapak Kukuh di atas memperjelas bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Probolinggo mengacu pada Peraturan Bupati Probolinggo nomor 6 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo. Dalam pasal 4 Peraturan Bupati Probolinggo No. 6 Tahun 2011 menyebutkan demikian:

Susunan Organisasi BPBD, Terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah terdiri dari:
 1. Instansi terkait;
 2. Profesioanal/Ahli/Tokoh Masyarakat.
- c. Unsur Pelaksana Terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat;
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Perihal lingkup mitigasi bencana, dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, kegiatan mitigasi bencana memang tidak dijelaskan secara terperinci di dalam pasal-pasal yang terdiri dari 17 pasal tersebut. Mitigasi bencana terdapat di Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tertuang dalam Pasal 11 Tentang Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dimana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat prabencana serta pengurangan resiko bencana.

Dengan demikian sudah jelas bahwa pelaksanaan mitigasi bencana di Kabupaten Probolinggo memiliki landasan hukum di tingkat wilayah Kabupaten Probolinggo yaitu Peraturan Bupati Probolinggo No. 6 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo.

Selain dua regulasi diatas, Pemda Probolinggo dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo merancang Perda baru penanggulangan bencana yang mana belum disertai nomor Perda yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di Kabupaten Probolinggo yang masih dalam pembahasan dan rapat lanjut oleh Badan Penanggulangan Bencana serta dinas terkait lainnya. Mengenai hal ini Bapak Kukuh selaku Kasubag Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo mengungkapkan:

“Regulasi baru sudah dirancang mbak untuk Tahun 2014 ini tapi masih belum diberi nomer. Hal ini masih akan dirapatkan kembali oleh dinas-dinas terkait yang nantinya juga akan terjun dalam penangulangan bencana. Diharapkan dari adanya Perda baru ini pengorganisdasian dan penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo ini menjadi lebih baik lagi.” (*interview* tanggal 13 Januari 2014 di BPBD Kabupaten Probolinggo)

Kedua, Peraturan Daerah No. 3 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029. Perda ini merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Kukuh selaku kasubag Perencanaan di BPBD Kabupaten Probolinggo yang mengatakan:

“untuk kegiatan penanggulangan bencana khususnya mitigasi bencana, Kabupaten Probolinggo memiliki Perda Penataan Ruang yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang berkaitan kawasan rawan bencana alam.” (*interview* hari senin tanggal 29 Juli 2013)

Mengenai penetapan dan pengelolaan kawasan rawan bencana letusan Gunung Bromo termasuk peta rawan bencana secara garis besar telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 perihal pemanfaatan tata ruang wilayah untuk mitigasi bencana, khususnya di kawasan rawan bencana letusan Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Lutfi Imam selaku seksi Logistik Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Probolinggo yaitu:

“Di dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 terdapat ketentuan mengenai zonasi dan pengelolaan Kawasan Rawan Bencana termasuk wilayah yang masuk dalam daerah rawan bencana letusan Gunung Bromo.” (*interview* hari senin tanggal 29 Juli 2013)

Dalam Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 tersebut tertulis bahwa upaya pengelolaan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi (Gunung Bromo) di wilayah Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup ;
2. Meningkatkan kualitas kawasan yang member perlindungan di bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan ;
3. Memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta penetapan kawasan lindung spiritual ;
4. Memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya ;
5. Menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam serta pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung ;
6. Memantapkan wilayah kawasan lindung geologi yang terdiri dari cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah disertai dengan pemantapan zonasi di kawasan dan wilayah sekitarnya serta pemantapan pengelolaan kawasan secara partisipatif ; dan
7. Memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha pelestarian alam.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 khususnya pasal 6 ayat (6) merupakan satu-satunya pasal yang memuat mengenai landasan hukum bagi ketentuan zonasi di dalam mitigasi bencana perihal penggunaan tata ruang dan wilayah yang masuk dalam kawasan rawan bencana (KRB) letusan Gunung Bromo. Penentuan Kawasan Rawan Bencana (KRB) mengacu pada peta rawan bencana yang dibuat oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dengan diperdetail oleh BPBD Kabupaten Probolinggo.

Dari keterangan di atas, sampai tulisan ini dibuat hanya ada 2 (dua) landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yaitu:

1. Peraturan bupati probolinggo no 6 tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029.

Dengan produk hukum yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam Upaya penangulangan bencana, baik itu tahap pra bencana yang di dalamnya terdapat kegiatan mitigasi bencana diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif/ kerugian dari segi korban jiwa, harta benda penduduk, dan lingkungan serta mempercepat penanganan kibat bencana di wilayah Kabupaten Probolinggo.

B. Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana Gunung Bromo

Instrumen penting dalam tercapainya suatu progam yang efektif adalah pendanaan yang memadai khususnya penangulangan bencana. Tanpa adanya dana yang memadai, maka pelaksanaan penanggulangan bencana akan terhambat untuk membiayai penanggulangan bencana Gunung Bromo. Pada saat terjadinya erupsi Gunung Bromo alokasi dana bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN yang total alokasi dananya secara keseluruhan pada Tahun 2011 berjumlah Rp. 4.427.059.150,-. (Data dari BPBD Kabupaten Probolinggo)

Anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana Kabupaten Probolinggo selama ini belum secara khusus tetapi hanya berupa dana sisa atau dana cadangan yang jumlahnya sangat minim. Anggaran khusus untuk mitigasi bencana Gunung Bromo dapat dikatakan belum ada karena dana yang ada dipersiapkan untuk kegiatan lain yang berarti untuk kegiatan penanggulangan bencana, BPBD sulit untuk menangani bencana dengan cepat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kukuh bahwa:

“Komitmen anggaran Pemkab Probolinggo terhadap penanganan bencana hanya mengalokasikan Rp 2.000.000.000,00 per tahunnya (diluar gaji). Alokasinya untuk membiayai banyak program termasuk pelatihan pra bencana. Khususnya dalam penanganan bencana Bromo kemarin. Proses pencairan dananya tidak bisa cepat, karena tidak ada anggaran khususnya. Yang ujung-ujungnya kami harus *ngebond* dulu. Jumlah tersebut tentunya sangat minim dibandingkan potensi-potensi bencana di Kabupaten Probolinggo termasuk Gunung Bromo.” (Hasil *interview* kepada staff pada BPBD Kabupaten Probolinggo 15 Desember 2013)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa alokasi anggaran dalam proses penangulangan bencana selama ini sangat terbatas yang tentunya berdampak akan adanya penanganan yang lambat bagi korban bencana alam. Sementara penanganan bencana harus segera ditangani dengan dana yang mencukupi. Melihat potensi bencana alam di Kabupaten Probolinggo sangat beragam yang berdampak dengan adanya kerugian harta benda yang cukup besar.

C. Upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo Mensosialisasikan Produk Hukum Penanggulangan Bencana dan Pentingnya Mitigasi Bencana

Ada beberapa upaya bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam hal ini BPBD Kabupaten Probolinggo dalam mensosialisasikan produk hukum/regulasi penanggulangan bencana, termasuk pemahaman mengenai pentingnya mitigasi bencana letusan Gunung Bromo baik kepada masyarakat umum (publik) terutama masyarakat yang tinggal didaerah rawan bencana alam.

Berdasarkan penjelasan dari seksi logistik pada DPBD Kabupaten Probolinggo yaitu Bapak Lutfi mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan sosialisasi produk hukum penanggulangan bencana dan penanganan kebencanaan, kami melakukan sosialisasi dengan melalui media elektronik, banner, dan sosialisasi langsung ke lapangan. Untuk brosur biasanya pos pantau membuatnya.” (interview tanggal 18 Desember 2013 di BPBD Kabupaten Probolinggo)

Pernyataan dari Pak Lutfi tersebut diperkuat juga oleh pernyataan Pak Triono selaku Ketua Kampung Siaga Bencana di Desa Ngadirejo Kecamatan Sukapura kepada peneliti ketika bermalam dirumahnya yaitu:

“sosialisasi pemerintah terkait penanggulangan bencana kepada masyarakat sekitar kawasan rawan bencana Gunung Bromo salah satunya adalah ketika ada perkumpulan warga di kelurahan dan pada saat pembagian sembako kepada penduduk sekitar.” (Interview tanggal 19 Desember 2013)

Sosialisasi produk hukum kepada masyarakat luas terkait kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Probolinggo, khususnya Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dan Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029

serta pemahaman pentingnya mitigasi bencana telah dilakukan oleh Pemkab Probolinggo.

D. Pembentukan satgas

Dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana pasti ada pelaksanaannya. Pelaksanayang berperan dalam penangulangan bencana khususnya bencana Gunung Bromo di wilayah Kabupaten Probolinggo lebih kearah masing-masing instansi. Bapak Kukuh mengemukakan:

“Dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana (mitigasi bencana Gunung Bromo) dilapangan hal ini tidak ada struktur yang jelas mbak. Semua instansi menangani kekurangan yang ada” (*interview* tanggal 18 Desember 2013 di BPBD Kabupaten Probolinggo)

Pendapat sejenis juga dinyatakan oleh Bapak Aris menyatakan:

“keadaan Erupsi Bromo saat itu benar-benar mendesak mbak, jadi tidak sempat terfikir untuk membuat struktur organisasi penanganan yang berkaitan dengan instansi lain, yang ada hanya kesadaran masing-masing elemen untuk melakukan penanganan setanggap mungkin, seperti adanya tim orari, PMI, Dinas Kesehatan yang menangani penyakit yang dialami penduduk, aparat TNI yang bahu membahu membangun tenda-tenda evakuasi, dan lain sebagainya.” (*interview* tanggal 18 Desember 2013 di BPBD Kabupaten Probolinggo)

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa saat itu (erupsi Gunung Bromo yang lalu) belum ada struktur organisasi formal dalam penanggulangan bencana Gunung Bromo. Namun, jika merujuk pada Perbup Probolinggo No. 6 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo pasal 2 : “BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.” Maka, aktor utama dari penanggulangan bencana Kabupaten Probolinggo adalah BPBD Kabupaten Probolinggo.

4.4.2 Sinergi Antara Pemerintah Dengan Masyarakat, dalam mitigasi bencana Gunung Bromo

Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek utama dalam penanggulangan bencana khususnya erupsi Gunung Bromo yaitu meliputi penanggulangan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

a. Penanggulangan Pra Bencana

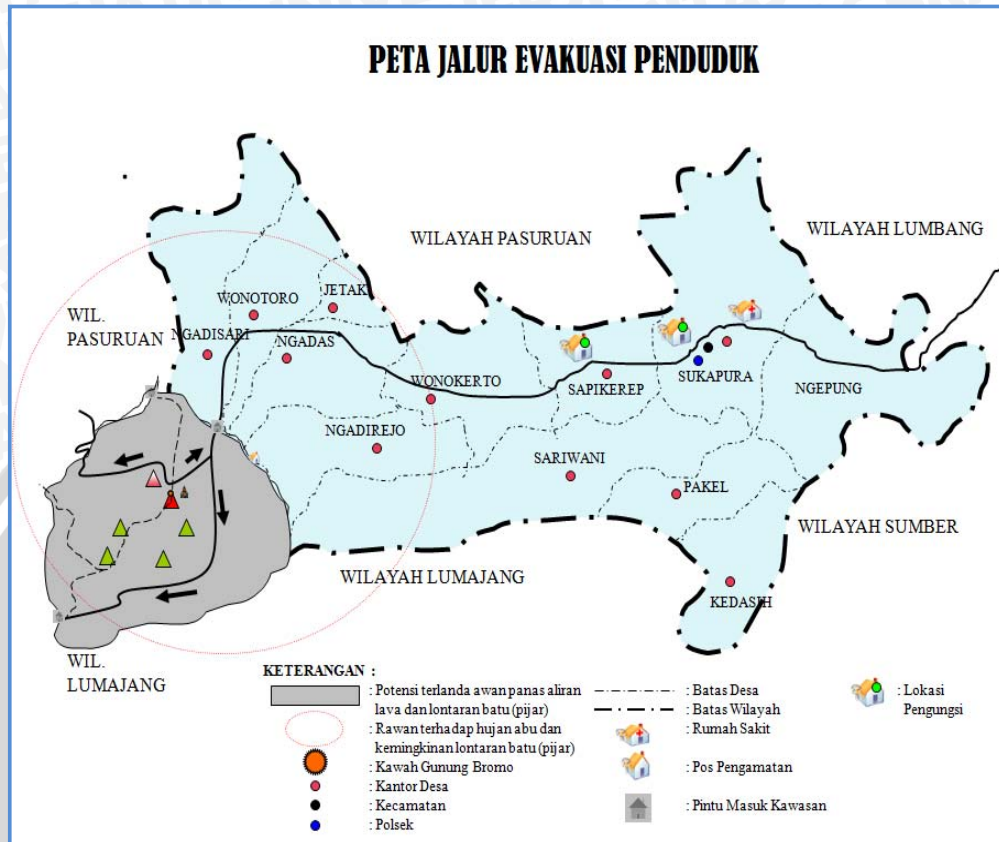
Penanggulangan pra bencana Gunung Bromo selama ini kurang begitu diprioritaskan sehingga kegiatan penanggulangan pra bencana di Kabupaten Probolinggo hanya meliputi tindakan dalam perencanaan daerah penampung sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana dan pemantauan aktifitas gunung secara berkala khususnya bencana erupsi Gunung Bromo seperti yang dijelaskan oleh Bapak Lutfi yang mengatakan:

“penanggulangan pra bencana memang tidak secara khusus dilakukan ya mbak, khususnya disaat Gunung Bromo dalam masa tenangnya, kami jarang sekali dan hamper tidak ada kegiatan yang dilakukan hanya beberapa hal saja yaitu perencanaan pembuatan peta lokasi evakuasi korban dan pemantauan kegiatan gunung yang kami dapatkan informasinya melalui PVMBG Gunung Bromo yang ada di Dusun Cemorolawang.” (interview 18 oktober 2013 di BPBD Kabupaten Probolinggo)

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Moh. Safi'ibahwa:

“tindakan mitigasi bencana dalam penanggulangan bencana Gunung Bromo yaitu kami setiap hari mengukur status tingkat kegiatan Gunung Bromo langsung disekitar kawah gunung. Setiap kali Gunung Bromo mengalami peningkatan status, selalu kami laporkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo dan segala keputusan tindakan berada di tangan BPBD selaku badan penanggulangan bencana.”(interview16 Oktober 2013)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui akan peran pemerintah daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo sebagai penggerak penanggulangan bencana guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh letusan Gunung Bromo. Tidak kalah penting, peran masyarakat dalam penanggulangan pra bencana ini sangat berpengaruh karena kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam penanggulangan bencana, termasuk upaya mitigasi bencana di kawasan rawan bencana Gunung Bromo.



Gambar 24 Peta Evakuasi Korban Bencana Erupsi Gunung Bromo

Sumber: Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Dengan Modifikasi Penulis

Dimana masyarakat sebagai korban utama dalam bencana tersebut. Namun, permasalahan yang timbul dalam penanggulangan bencana Gunung Bromo dalam tahap pra bencana ini kurang melibatkan peran masyarakat. Adapun penyebabnya diungkapkan oleh Bapak Kukuh bahwa:

“kegiatan pra bencana seperti penyuluhan pendidikan penanggulangan kepada masyarakat sejauh ini belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan dana anggaran, dimana tidak adanya anggaran khusus untuk kegiatan pra bencana.” (interview pada Tanggal 19 Desember 2013 di BPBD Kabupaten Probolinggo)

Diperkuat pula oleh pernyataan dari Bapak Triono selaku Ketua Kelompok Desa Tanggap Bencana di Desa Ngadirejo yang menyatakan :

“saya sebagai masyarakat sekitar Gunung Bromo, bahkan kampung terdekat dengan Gunung Bromo mengharapkan agar pemerintah benar-benar bertindak serius dalam penanganan bencana Gunung Bromo khususnya penanggulangan pra bencana. Karena penduduk disekitar sini sangat membutuhkan pendidikan kebencanaan baik berupa sosialisasi dan pelatihan.” (*interview* pada Tanggal 16 Oktober 2013)

Dari peristiwa tersebut, dapat dilihat bahwa penanggulangan bencana khususnya penanggulangan pra bencana di kawasan rawan bencana Gunung Bromo kurang melibatkan peran masyarakat. Dampak dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pra bencana ini dapat berakibat tidak maksimalnya upaya penanggulangan bencana secara keseluruhan. Sehingga meminimalisir dampak bencana menjadi tidak maksimal.

b. Penanggulangan Saat Bencana

Upaya penanggulangan bencana khususnya pada saat bencana di kawasan rawan bencana Gunung Bromo yaitu berupa evakuasi dan tanggap darurat beberapa kegiatan penanggulangan bencana dijelaskan oleh Bapak Lutfi yaitu:

“beberapa peran Pemerintah Daerah saat peningkatan status erupsi Gunung Bromo ketika itu adalah dengan mengevakuasi korban secara paksa untuk tinggal di tempat pengungsian yang sudah disiapkan, selebihnya Pemerintah Daerah memberikan sembako kebutuhan makanan sehari-hari dan pelayanan kesehatan mbak” (*interview* tanggal 19 Desember 2013)

Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Aminah selaku istri dari Bapak Triono di Desa Ngadirejo:

“pelayanan dari pemerintah berupa pemberian sembako sudah bagus mbak. Bayangkan erupsi lebih dari dua bulan sembako selalu ada buat masyarakat disini.” (*interview* tanggal 16 Oktober 2013 di rumah yang bersangkutan)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peran pemerintah ketika terjadi bencana sudah baik. Namun tidak demikian dengan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana Erupsi Gunung Bromo. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Aris menyatakan:

“warga itu susah di evakuasi mbak, walaupun mau di evakuasi hanya satu hari saja. Mereka khawatir meninggalkan rumah karena kepikiran sama harta benda serta ternak yang ditinggalkan” (*interview* Tanggal 19 Desember 2013 di BPBD Kabupaten Probolinggo)

Diperkuat pula oleh pernyataan dari Bapak Moh. Safi’i mengungkapkan:

“masyarakat disini kebanyakan susah diatur mbak, sudah tau dalam keadaan darurat tapi masih saja meremehkan bencana, menganggap bahwa bencana Gunung Bromo ini tidak akan mengakibatkan dampak yang besar” (*interview* pada tanggal 17 Oktober 2013 di pos pemantau Gunung Bromo)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam hal penanggulangan saat bencana sangat minim, bahkan ketika di arahkan oleh pemerintah untuk mengungsi, masyarakat tidak menjalankannya. Hal ini merupakan bentuk akan kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak bencana yang dapat menghilangkan nyawa masyarakat sekitar kawasan rawan bencana.

c. Penanggulangan pasca bencana

Penanggulangan bencana dalam penanggulangan pra bencana Gunung Bromo meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Masing-masing penjabaran tentang rehabilitasi dan rekonstruksi diungkapkan oleh Bapak Lutfi bahwa:

“penanggulangan bencana khususnya penanggulangan pra bencana Badan Penanggulangan Bencana daerah sini untuk penanganan pasca Erupsi Gunung Bromo ada dua bagian yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah dengan memperbaiki fasilitas umum seperti Sekolah Dasar Ngadirejo dan perbaikan jembatan serta pembersihan jalan dari debu. Untuk rekonstruksi, fokus ke tanaman dan sumber pangan yang mati dengan mendistribusikan bantuan kepada petani berupa pupuk, bibit dan yang berhubungan dengan pertanian seperti obat hama juga diberi dari pemerintah.” (*Interview Tanggal 19 Desember 2013*)

Sementara pesan masyarakat ketika pasca bencana tersebut tidaklah banyak seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Ghufur yang ketika itu menjabat sebagai kepala sekolah di SD Ngadirejo mengatakan:

“Peran masyarakat ketika pasca bencana itu tidaklah banyak mbak, karena sibuk masing-masing membenahi harta benda yang rusak terkena abu vulkanik. Termasuk lading.” (*Interview Tanggal 16 Oktober 2013*)

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam penanggulangan bencana khususnya penanggulangan bencana Gunung Bromo sangat minim dan tidak dominan. Karena upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi justru seluruhnya ditangani oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo.

4.4.3 Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dalam sinergi dengan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana gunung Bromo

A. Faktor Pendukung Internal

1. Keanggotaan di BPBD Kabupaten Probolinggo Menyeluruh Dalam Berbagai Bidang

Struktur organisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo mulai dari kepala, unsur pengarah, unsur pelaksana, hingga kelompok jabatan fungsional sangat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana mulai dari kegiatan pra bencana, saat bencana, dan sesudah bencana. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Arisbahwa:

”keanggotaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari berbagai bidang saling terkait satu sama lain sehingga memberikan keuntungan pada peran masing-masing bidang organisasi. Sehingga kegiatan penanggulangan bencana tidak hanya terletak pada penanggulangan pada saat bencana saja, tapi ada pelatihan tertentu untuk penanganan pra bencana.” (*Interview* tanggal 18 Januari 2014 di BOBD Kabupaten Probolinggo)

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo bersifat mencakup seluruh kegiatan penanggulangan bencana dari kegiatan pra bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Dimana kebutuhan masyarakat saat bencana dapat terpenuhi. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Lutfi bahwa:

”meskipun Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Probolinggo Baru terbentuk, namun struktur organisasi yang jelas sangat membantu dalam proses penanggulangan bencana. Sehingga proses pengendalian bencana di saat pra bencana, saat bencana, dan setelah bencana dapat terlaksana dengan rapi sesuai tugas masing-masing.” (*Interview* Tanggal 18 Januari 2014 di BPBD Kabupaten Probolinggo)

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa keanggotaan di setiap bidang struktur organisasi dalam Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Probolinggo memiliki tugas dan wewenang yang menyeluruh di berbagai aspek penanggulangan bencana dari kegiatan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana yang membutuhkan koordinasi yang efektif sehingga meminimalisir dampak dari adanya bahaya bencana alam dapat diminimalisir sedini mungkin.

2. Komitmen BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Bromo

Penanggulangan bencana khususnya mitigasi bencana Gunung Bromo dapat dilihat dari pedoman Mitigasi bencana berupa kegiatan pemetaan kawasan rawan bencana, meskipun dalam pedoman itu belum dapat menjawab tantangan penanganan mitigasi bencana secara utuh, akan tetapi pembuatan pedoman tersebut sudah menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo selaku aktor utama dalam penanggulangan bencana di wilayahnya. seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kukuh bahwa:

”kegiatan penanggulangan bencana tak lepas dari pemetaan kawasan rawan bencana, dengan pemetaan yang telah dilakukan, kami dapat dengan mudah memberikan rambu-rambu bahaya serta penempatan lokasi evakuasi korban bencana alam, walaupun belum secara rinci, yaitu tentang standar kualitas bangunan misalnya.” (*Interview* tanggal 18 Januari 2014 di BPBD Kabupaten Probolinggo)

Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dalam memaksimalkan pelaksanaan mitigasi bencana termasuk kawasan rawan bencana Gunung Bromo dapat menjadi acuan untuk terus melakukan upaya mitigasi bencana yang telah dilakukan di kawasan rawan bencana Kabupaten Probolinggo. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih ada niatan baik Badan

Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan penanggulangan bencana, khususnya mitigasi bencana Gunung Bromo.

B. Faktor Pendukung Eksternal

1. Adanya Organisasi Eksternal Pendukung Yang Bertugas Khusus Dalam Bidang Kegunungapian Terkait Pengaman Bahaya Letusan Gunung Bromo

Untuk organisasi yang bertugas secara khusus mengamati kegiatan gunung berapi telah dibentuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di bawah Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Untuk Gunung Bromo sendiri telah memiliki 1 (satu) buah pos pengamatan sehingga kegiatan pemantauan Gunung Bromo dapat berlangsung secara rutin.

Mengenai hal ini Bapak Moh. Safi'i menyatakan bahwa ;

“Untuk kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana letusan gunung berapi memang ada organisasi tersendiri yang bertugas yaitu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang berkantor pusat di Bandung. Kemudian di sekitar gunung berapi didirikan pos-pos pengamatan untuk memudahkan kegiatan pengamatan suatu gunung berapi, di Gunung Bromo terdapat satu buah pos pengamatan.”(Interview tanggal 17 Oktober 2013 di Pos Pengamatan Gunung Bromo)

Organisasi yang bertugas khusus dalam penanganan dan pengamatan Gunung Bromo dengan anggota pengamat yang bertugas paling tidak telah menciptakan sedikit rasa aman dan mengurangi rasa khawatir akan ancaman letusan Gunung Bromo yang terjadi sewaktu-waktu. Manfaat yang paling terasa bahwa hasil pengamatan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dapat dijadikan suatu rekomendasi bagi Pemkab Probolinggo dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Probolinggo dalam

melakukan upaya mitigasi bencana letusan Gunung Bromo. Dengan demikian adanya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dalam hal ini Pos Pengamatan Gunung Bromo merupakan faktor pendukung eksternal jelas "amat" membantu Pemkab Probolinggo dalam upaya penanggulangan bencana, dalam hal ini implementasi program-program mitigasi bencana di kawasan rawan bencana Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo.

2. Dukungan Anggaran Penanggulangan Bencana Dari Pemerintah Pusat

Salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan mitigasi bencana letusan Gunung Bromo dapat berjalan lancar karena ada dukungan dana. Kegiatan pemantauan Gunung Bromo yang dilakukan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mengenai hal tersebut Bapak Moh. Safi'i menyatakan bahwa ;

"Kami disini sebagai petugas dan semua kegiatan pengamatan Gunung Bromo di pos pengamatan seluruhnya dibiayai oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang mendapat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah pos Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)." (*Interview* tanggal 17 Oktober 2013 di Pos Pengamatan Gunung Bromo)

Dengan demikian pendanaan upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo ternyata juga didukung oleh pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data anggaran menunjukkan nilai nominal dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih besar dari dana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo sendiri (lihat di data fokus sub-bab anggaran).

3. Kontrol Media Massa Cukup Efektif

1. Bromo Terus Erupsi dan Melontarkan Material Pijar

Dari Pos Gunung Bromo dilaporkan suara gemuruh dan dentuman dari dalam kawah jelas terdengar dengan kekuatan sedang hingga kuat. Terlihat pula lontaran material pijar setinggi lebih kurang 300 meter dan jatuh sejauh 500 meter dari pusat letusan. Pos Gunung Bromo di Dusun Cemoro Lawang Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dilaporkan juga terkena hujan abu vulkanik. Rabu (16/3). (Sumber : Tempo, Rabu, 16 Maret 2011)

2. Bromo Bahayakan 4.849 Warga

Kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo tak dikelilingi permukiman penduduk yang padat. Walaupun Bromo benar-benar meletus, ada 4.849 warga yang permukimannya berjarak lima kilometer dari puncak Bromo, harus diungsikan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Sahrul Arifin, Rabu (24/11) mengatakan, warga itu ada di Desa Ngadisari sebanyak 1.556 jiwa, Desa Jetak 594 jiwa, Wonoroto 1.290 jiwa, Wonokerto 730 jiwa, dan Ngadas 679 jiwa. Seluruh desa ini berada di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Warga yang bermukim di radius 5 km dari puncak Gunung Bromo dikhawatirkan terkena awan abu panas dan hujan kerikil ketika Bromo benar-benar meletus. Tapi, sekiranya kekuatan letusan Bromo tahun ini seperti 2004 lalu, warga sekitar Bromo tak harus mengungsi. Letusan Bromo 2004 lalu mengakibatkan dua wisatawan tewas. (Sumber : Suara Merdeka, 25 November 2010)

Melihat fakta dan fenomena sosial yang dimuat di media massa tersebut menunjukkan bahwa peran media massa dalam mendukung upaya Pemkab Probolinggo dalam penanggulangan bencana khususnya di wilayah sekitar Gunung Bromo dapat dikatakan aktif. Hal senada diungkapkan oleh Bapak Lutfi, seksi logistic BPBD Kabupaten Probolinggo yang mengatakan ;

“Terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan Pemkab Probolinggo khususnya pada Gunung Bromo, pada pengalaman tahun 2010-2011 kemarin sebenarnya memberikan gambaran tindakan apa yang perlu dibenahi untuk penanggulangan bencana di kemudian hari apabila Gunung Bromo kembali aktif lagi. Dalam hal ini peran media massa dapat menjadi kontrol upaya kami dan sekaligus sebagai masukan, terlebih melalui media massa pula masyarakat akan dapat belajar lebih baik terkait penanggulangan bencana letusan Gunung Bromo. Dari pemberitaan berbagai media massa pula dapat menjadi media sosialisasi dan pembelajaran bagi semua pihak terkait dengan penanggulangan bencana.”(*Interview* tanggal 18 Oktober 2013 di BPBD Kabupaten Probolinggo)

Media massa amat memberikan andil besar bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penanggulangan bencana tahun 2010-2011 kemarin. Dengan media massa diharapkan tindakan yang salah tidak akan terulang lagi dengan memberikan masukan-masukan pada aktor pelaksana di lapangan. Peran media massa dalam mitigasi bencana paling tidak sebagai peringatan bagi Pemkab Probolinggo dan penduduk sekitar lereng Gunung Bromo akan bahaya dan kerugian yang ditimbulkan saat Gunung Bromo meletus.

C. Faktor Penghambat Internal

1. Koordinasi Antar Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo Masih Lemah

Dari penelitian yang dilakukan peneliti Anggota Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Probolinggo belum menyadari peran masing-masing yang terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana. Akibatnya koordinasi antar anggota Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Probolinggo masih lemah. Kecenderungan mereka tidak memahami apa yang harus dilakukan saat bertugas di lapangan khususnya dalam tahap pra bencana. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Moh. Safi'i bahwa ;

“Kegiatan penanggulangan bencana pada dasarnya adalah persoalan kita semua dan bukan hanya tanggung jawab dari satu atau dua instansi saja. Yang seharusnya mereka menyadari akan kecenderungan Gunung Bromo untuk meletus karena statusnya yang masih aktif, seharusnya mereka tetap melakukan pengawasan tanpa kami harus menunggu kami terlebih dahulu yang menginformasikan. Ini yang belum banyak disadari oleh sebagian besar pihak-pihak yang terkait.” (*Interview* tanggal 17 Oktober 2013 di Pos Pantau Gunung Bromo)

Menambahkan pernyataan Bapak Moh. Safi'i di atas mengenai lemahnya koordinasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo untuk itu Bapak Lutfi, mengatakan bahwa;

“Menyoal penanggulangan bencana letusan Gunung Bromo, kalau ditanya kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat tidak terjadi bencana atau waktu Gunung Bromo pada masa tenangnya, kami jarang sekali bahkan hampir tidak ada kegiatan semacam koordinasi antar anggota dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kegiatan koordinasi baru mulai diadakan saat Gunung Bromo diinformasikan akan segera meletus tapi ya sebatas kegiatan perencanaan evakuasi dan penyaluran bantuan. Bahkan selama ini hampir tidak ada kegiatan koordinasi menyangkut mitigasi bencana letusan Gunung Bromo. Tapi kami juga memahami mungkin disebabkan juga karena minimnya anggaran. (*Interview* tanggal 18 Oktober 2013 di BPBD Kabupaten Probolinggo)

Dari pernyataan di atas, anggota Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo menganggap kerja utama dari penanggulangan bencana hanya tertumpu pada kegiatan pada saat bencana dan pra bencana saja, sehingga koordinasi dari setiap tim tidak tersusun dengan matang. Akibatnya penanganan bencana menjadi amburadul dan tidak efektif. Hal demikian jelas akan mempengaruhi upaya-upaya penanggulangan bencana berikutnya.

2. Orientasi Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo Sebatas Bersifat Tanggap Darurat/Mendadak

Orientasi kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Probolinggo dapat dikatakan terkesan mendadak, tanpa ada persiapan.

Ini terlihat dari rapat koordinasi penanganan bencana khususnya letusan Gunung Bromo yang dilakukan jika ada peningkatan status dari aktif normal ke level waspada. Jika kondisi Gunung Bromo masih pada level aktif normal tidak ada upaya koordinasi dari Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo pada tahap pra bencana terutama pelaksanaan mitigasi bencana letusan Gunung Bromo. Namun sebaliknya, persiapan akan dilakukan dengan mendadak oleh Pemkab Probolinggo jika Gunung Bromo dinyatakan "krisis".

Menguatkan pernyataan di atas Bapak Moh. Safi'I mengungkapkan bahwa;

"Sudah menjadi rahasia umum bahwa penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemda biasanya mulai ikut aktif jika Gunung Bromo aktivitasnya juga naik. Mereka belum menyadari jika akar masalah penanggulangan bencana, segala jenis bencana baik dari letusan gunung api sampai kerusakan sosial pun adalah pada tahap pra bencana, bukan cuma persoalan evakuasi." (*Interview* tanggal 17 Oktober 2013 di Pos Pengamatan Gunung Bromo)

Dari pernyataan-pernyataan di atas jelas bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa upaya penanggulangan bencana akan dimulai saat Gunung Bromo telah dinyatakan bahaya oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Hal ini terlihat dari meningkatnya kegiatan penanggulangan bencana Gunung Bromo ketika status bromo meningkat menjadi "awas".

3. Anggaran Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Probolinggo Masih Minim

Anggaran penanggulangan bencana khususnya ancaman bahaya letusan Gunung Bromo oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum secara khusus

dialokasikan tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo, tetapi hanya berupa dana sisa atau dana cadangan yang jumlahnya sangat minim.

Hal ini diperkuat oleh Bapak Kukuh yang mengatakan bahwa:

“Tetapi untuk pedoman mitigasi bencana letusan gunung berapi dalam hal ini Gunung Bromo kita belum punya, jangankan Gunung Bromo untuk setiap bencana pun kita harus ngebond dulu karena tidak ada anggaran untuk bencana dari daerah, dimana anggaran bencana itu termasuk dalam non anggaran dalam APBD.” (*Interview* tanggal 18 Oktober 2013 di BPBD Kabupaten Probolinggo)

Minimnya anggaran dalam upaya penanganan mitigasi bencana di wilayah Gunung Bromo juga diutarakan oleh Bapak Lutfiberikut ;

“Jika ditanya kenapa rambu evakuasi dibuat tidak permanen, kami hanya bisa menjawab karena keterbatasan anggaran itu saja.”(*Interview* tanggal 18 Oktober 2013 di BPBD Kabupaten Probolinggo)

Anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo memang relatif masih minim. Sedangkan ketergantungan Pemkab Probolinggo terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tinggi, meskipun dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan mitigasi bencana letusan Gunung Bromo juga terbatas. Dengan demikian anggaran Pemkab Probolinggo yang kecil dan tidak jelas masuk pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo serta ketergantungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan bencana khususnya erupsi Gunung Bromo yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi.

4. Minimnya Sarana Dan Prasarana Mitigasi Bencana

Sarana dan prasarana yang terbatas merupakan salah satu faktor penghambat bagi Pemkab Probolinggo dalam upaya penanggulangan bencana letusan Gunung Bromo. Minimnya sarana ini diperjelas oleh Bapak Lutfi mengatakan ;

“Rambu-rambu bahaya atau larangan di kawasan rawan bencana sebenarnya ada tapi tidak banyak. Khusus untuk rambu di daerah rawan bencana letusan Gunung Bromo memang masih sangat terbatas.”(Interview tanggal 18 Oktober BPBD Kabupaten Probolinggo)
Mendukung pernyataan Bapak Lutfi di atas maka Bapak Bapak Triono

mengungkapkan ;

“Rambu-rambu di daerah rawan bencana letusan Gunung Bromo mungkin ada tapi jumlahnya terbatas sekali. Berdasarkan pengalaman tahun 2010 kemarin ada rambu-rambu evakuasi tetapi bersifat sementara dan tidak permanen yang dibuat pada saat Gunung Bromo sedang krisis saja untuk memudahkan proses evakuasi.”(Interview tanggal 17 Oktober 2013 di rumahnya)

Dari data wawancara tersebut jelas bahwa sarana dan prasarana yang terbatas amat dikeluhkan oleh anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di lapangan dan masyarakat sekitar Gunung Bromo. Minimnya sarana prasarana mitigasi bencana yang dimiliki Pemkab Probolinggo juga terlihat pada tabel di bawah ini.

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Tenda Posko	1
2.	Tenda Pleton	2
3.	Tenda Keluarga	6
4.	Temda regu	3
5.	Velbelt	10
6.	HT IC V-80	1 set
7.	SSB Lengkap	1 set
8.	Perahu Karet Kapasitas 10 Orang	1

9.	Mesin Perahu Karet UK 18 PK	1
10.	Grenset Tropik 7850s UK 5KVA	2
11.	Center Rescue HD Search Light	1
12.	Water Treatment Portable	1
13.	Mobil Resque B 9501 PSC	1
14.	Motor Resque B 6614 POQ	1
15.	Motor Resque B 6615 POQ	1
16.	Mobil Dapur Lapangan B 9278 PQU	1

Tabel 10 *Bufferstock* Peralatan Bantuan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Probolinggo

Sumber: Data Badan Penanggiulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Probolinggo

Dari table tersebut terlihat bahwa minimnya sarana prasarana seperti adanya hanya ada 1 mobil pemadam kebakaran yang harus mengkover wilayah Kabupaten Probolinggo yang sangat luas. Minimnya sarana dan prasarana memang berhubungan dengan terbatasnya anggaran penanggulangan bencana. Pasalnya, keterbatasan sarana dan prasarana tersebut akan menghambat upaya mitigasi bencana khususnya erupsi Gunung Bromo yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

D. Faktor Penghambat Eksternal

1. Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Setempat Mengenai Bahaya Letusan Gunung Bromo Masih Rendah

Pengetahuan masyarakat sekitar Gunung Bromo tentang bencana Gunung Bromo masih berdasar pengalaman nenek moyang saja disertai akan kesadaran akan bencana masalah bencana yang masih rendah pula. Sesuai yang diungkapkan oleh Bapak subur, warga Desa Jetak Kecamatan Sukapura:

“Letusan Gunung Bromo biasanya diawali oleh betuknya gunung mbak, gak langsung besar. Hujan abu tipis-tipis dulu baru setelah itu meningkat letusannya.” (interview Tanggal 17 Oktober 2013 di rumahnya)

Didukung oleh pernyataan Bapak Moh. Safi’i yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat sini cenderung menyepelkan erupsi Gunung Bromo mbak. Menganggap kalau letusan Gunung Bromo gak akan besar. Ternyata

malah terbukti di erupsi Gunung Bromo 2010-2011 kemarin yang cukup besar sampai hujan pasir koral serta gempa yang dirasakan juga cukup besar.”(Interview tanggal 17 Oktober 2013 di pos pantau Gunung Bromo)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengetahuan yang mereka miliki masih rendah, terutama terkait isu bencana serta penanggulangan bencana. Umumnya masyarakat sekitar lereng Gunung Bromo memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman pribadi dan orang-orang terdahulu yang tinggal di area tersebut. Hal demikian tentu akan menjadi penghambat bagi Pemkab Probolinggo dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo dalam upaya penanggulangan bencana yang didalamnya terdapat penanggulangan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

2. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Salah satu yang menjadi factor penghambat dari upaya penanggulangan bencana, khususnya mitigasi bencana Gunung Bromo ialah kurangnya keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memantau pelaksanaan program penanggulangan bencana khususnya pra bencana. Mininnya peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan keterlibatannya dalam pelaksanaan program-program mitigasi Bencana dikemukakan oleh Bapak Rudi Cahyono selaku sekretaris Kecamatan Sukapura:

“saat erupsi Gunung Bromo kemarin kami kedatangan semacam LSM dari kawasan Gunung Merapi juga mbak. Tapi itupun hanya sebentar saja, tidak sampai pada kegiatan rehabilitasi daerah dampak erupsi Gunung Bromo.”(Interview Tanggal 16 Oktober 2013 di Desa Sukapura)

Meskipun ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pernah membantu

Pemkab Probolinggo dalam kegiatan penanganan bencana Gunung Bromo pada

saat bencana, namun kegiatan LSM tersebut tidaklah memberikan kontribusi yang besar terhadap kegiatan penanggulangan bencana Gunung Bromo. Karena aktifitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut hanya terbatas pada saat bencana saja.

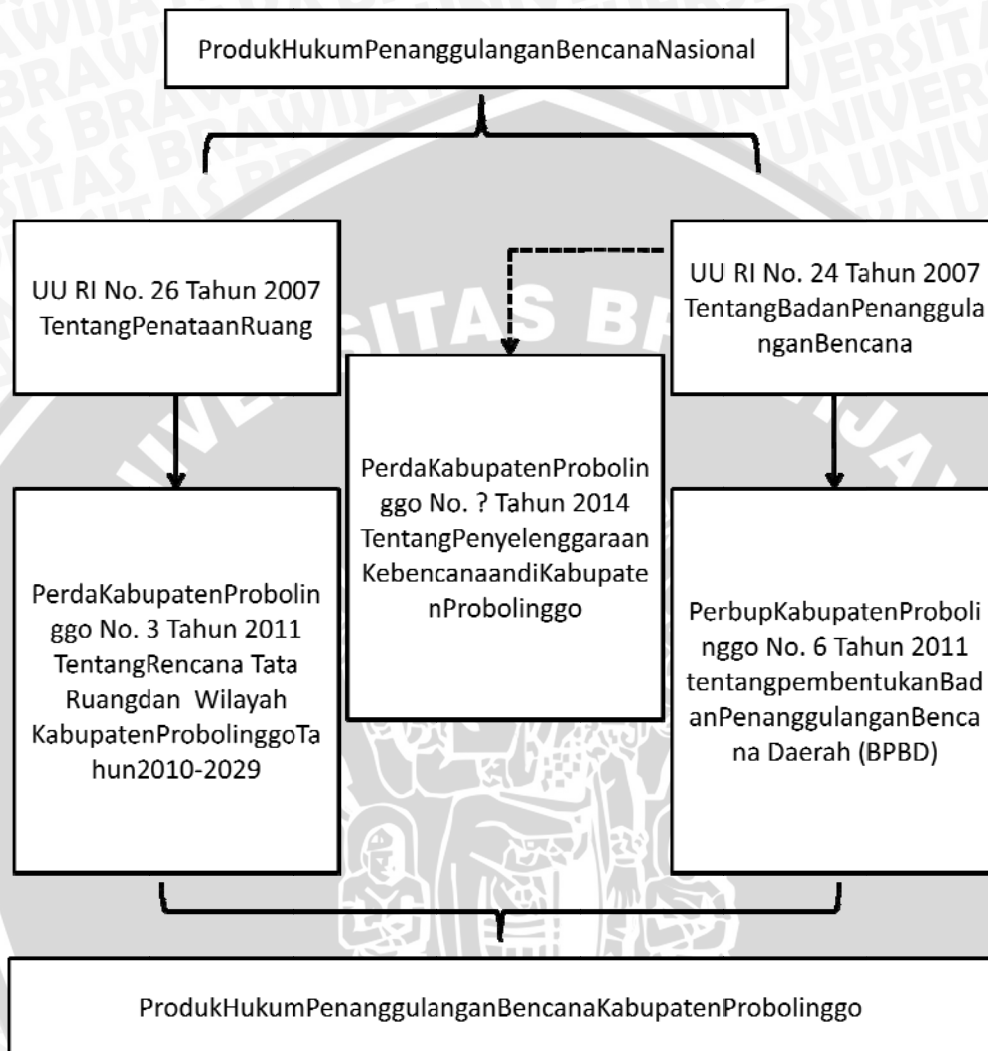
4.5 Analisis dan Interpretasi

4.5.1 Upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mitigasi bencana di wilayah Kabupaten Probolinggo

Beberapa komponen yang perlu ditelaah dan menjadi perhatian peneliti terkait upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dilakukan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Probolinggo dalam mitigasi bencana erupsi Gunung Bromo diantaranya adalah regulasi, sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan satgas penanggulangan bencana, dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana.

A. Regulasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam Penanggulangan bencana

Dalam pelaksanaan upaya program pemerintah daerah, harus dilandasi dengan produk hukum yang tertuang dalam bentuk peraturan. Begitu pula penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo, khususnya di Kawasan Rawan Bencana (KRB) letusan Gunung Bromo, Pemkab Probolinggo memiliki regulasi daerah yang bertujuan agar penanganan bencana tersebut dapat dikelola dengan baik. Sebagaimana susunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, peraturan daerah tersebut mengacu pada peraturan pemerintah pusat. Perhatikan bagan di bawah ini.



Gambar 25 Produk Hukum Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo

Keterangan :

———— = Aturan yang dipakai

----- = Aturan yang belum dipakai (Perda masih dalam pembahasan)

Sumber: BPBD Kabupaten Probolinggo dengan modifikasi penulis

Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa produk hukum tersebut berupa Peraturan Bupati (Perbup) No. 6 Tahun 2011 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Bencana. Berikutnya adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo No. 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Sedangkan Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di Kabupaten Probolinggo yang mana Nomor Peraturannya belum ditentukan ini merupakan turunan dari Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Bencana masih belum dapat digunakan sebagai acuan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam melakukan penanggulangan bencana yang lebih matang. Dengan adanya Perda baru ini diharapkan adanya pengaturan dalam penangulungan bencana yang lebih baik lagi.

B. Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana Gunung Bromo

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan pasti memerlukan anggaran, tidak terkecuali implementasi kebijakan penanggulangan bencana. Pemerintah Kabupaten Probolinggo memiliki anggaran kerja sebagaimana pemerintah daerah lainnya yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan masing-masing dinas/ instansi di daerah telah memiliki biaya belanja rutin setiap tahun. Sama halnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang dirancang oleh Pemerintah Pusat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo juga merupakan hasil musyawarah bersama, antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo, yang diwakili oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan pejabat daerah terkait dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo.

Menurut Merille S. Grindle dalam Soenarko (2005 : 193) ada tiga hal pokok dalam pelaksanaan kebijakan yaitu :

1. Merinci tujuan-tujuan yang hendak dicapai
2. Membentuk program-program kegiatan
3. *Mengalokasikan dana untuk pembiayaan-pembiayaan.*

Dalam wacana ini alokasi dana pada penanggulangan bencana menjadi perhatian semua pihak, yaitu Pemerintah Pusat, Pemkab Probolinggo, maupun masyarakat Kabupaten Probolinggo khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana alam.

Sementara dari segi pembiayaan untuk penanggulangan bencana Gunung Bromo, Pemda Kabupaten Probolinggo belum mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan penanggulangan bencana khususnya penanggulangan pra bencana Gunung Bromo. Pendanaan hanya dilakukan pada saat bencana terjadi dan itupun dari anggaran sisa. Fakta ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 60 Ayat (1) yang menyebutkan “Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan pemerintah pusat.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa

dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo belum begitu mendukung upaya dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo dalam kegiatan penanggulangan bencana khususnya kegiatan penanggulangan pra bencana.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan salah satu kabag bagian Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Probolinggo dari segi nominal, anggaran penanggulangan bencana Kabupaten Probolinggo amat minim. Seperti anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan penanggulangan bencana kabupaten probolinggo hanya Rp. 2.000.000.000,00pertahun. Jumlah tersebut terlalu kecil mengingat kegiatan yang harus dilakukan dalam penanggulangan bencana sangat beragam dengan kondisi wilayah kabupaten yang sangat luas dengan potensi bencana alam yang beragam.

Direktur Bandung Institute For Governance Studies (BIGS) Fatimah (2009) mengungkapkan bahwa anggaran bagi penanggulangan bencana alam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah juga mesti mulai di prioritaskan. Selama ini, ada kesan pengabaian pos ini, baik berupa peniadaan maupun pemberian nominal yang sedikit.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fatimah diatas, bahwa pemda di Indonesia tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten probolinggo cenderung mengabaikan alokasi anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana, khususnya mitigasi bencana. Belum adanya pos khusus penanggulangan bencana yang otomatis juga belum ada pos pendanaan untuk program mitigasi bencana dan minimnya anggaran menjadikan proses penanggulangan bencana akan mengalami

banyak kendala. Selain dari segi laporan pertanggung jawaban yang akan menuai masalah, juga akan berdampak pada minimnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan di lapangan.

Dari hasil analisis di atas, peneliti dapat menilai bahwa sementara ini Pemkab Probolinggo belum serius dalam melaksanakan penanggulangan bencana di kawasan rawan bencana Gunung Bromo. Minimnya anggaran yang hanya merupakan dana sisa atau dana tidak tersangka dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo. Berdasar dari belum adanya alokasi pendanaan khusus penanggulangan bencana dan minimnya nominal anggaran dana tak terduga untuk penanggulangan bencana, maka dapat diartikan bahwa penganggaran mitigasi bencana jelas belum menjadi prioritas utama Pemkab Probolinggo dalam upaya penanggulangan bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten Probolinggo.

a. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Salah satu peran pemerintah lokal yang sangat penting adalah bagaimana melakukan sosialisasi dan edukasi kepada setiap warga masyarakat, terhadap semua aturan dan perundangan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. (Hasniati, 2008 : 837). Suatu produk hukum apapun tidak akan berjalan dengan baik jika belum disosialisasikan oleh instansi yang bersangkutan kepada *publik*. Maka daripada itu Pemkab Probolinggo dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo telah melakukan upaya sosialisasi peraturan-peraturan penanggulangan bencana dan informasi kegiatan pra bencana

(termasuk mitigasi bencana), kegiatan yang harus dilakukan saat bencana terjadi, setelah bencana terjadi, termasuk kawasan rawan bencana (KRB).

Dr. Mardiyono memberi contoh upaya sosialisasi program mitigasi bencana di Kanada bahwa keberhasilan penting dalam rangka strategi mitigasi nasional di Kanada adalah *prediction and warning systems*. Sistem ini lebih banyak berhubungan dengan akurasi informasi, estimasi, dan diseminasi kepada masyarakat luas. (Mardiyono, 2008 : 867). Merujuk pernyataan tersebut, bahwa salah satu faktor keberhasilan upaya mitigasi bencana adalah bagaimana program-program mitigasi bencana dapat didiseminasi/ disebarluaskan atau lazimnya disosialisasikan kepada masyarakat luas.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Seksi Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo Bapak Lutfi bahwa Pemkab Probolinggo telah melakukan upaya sosialisasi peraturan dan informasi bahaya kebencanaan ke masyarakat khususnya yang berada di kawasan rawan bencana letusan Gunung Bromo melalui penyuluhan, pamflet dan media massa kepada masyarakat.

Sosialisasi produk hukum dan pengetahuan pentingnya mitigasi bencana oleh Pemkab Probolinggo dapat dinilai *belum efektif*. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) fakta di lapangan yaitu, wawancara penduduk di sekitar kawasan rawan bencana Gunung Bromo, dan ungkapan dari staff di BPBD Kabupaten Probolinggo.

Pertama, pernyataan dari Bapak Triono bahwa :

“saya sebagai masyarakat sekitar Gunung Bromo, bahkan kampung terdekat dengan Gunung Bromo mengharapkan agar pemerintah benar-benar bertindak serius dalam penanganan bencana Gunung Bromo khususnya penanggulangan pra bencana. Karena penduduk disekitar sini sangat membutuhkan pendidikan kebencanaan baik berupa sosialisasi dan pelatihan.” (*interview* pada Tanggal 16 Oktober 2013)

Kedua, diungkapkan oleh Bapak Kukuh bahwa:

“kegiatan pra bencana seperti penyuluhan pendidikan penanggulangan kepada masyarakat sejauh ini belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan dana anggaran, dimana tidak adanya anggaran khusus untuk kegiatan pra bencana.” (*interview* pada Tanggal 19 Desember 2013 di BPBD Kabupaten Probolinggo)

Melihat dua fakta tersebut, maka belum ada satu kesepahaman dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo kepada masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan rawan bencana letusan Gunung Bromo tidak mengetahui aturan dan kurang paham mengenai mitigasi bencana.

Pejabat dan badan-badan pemerintah masih lemah sekali dalam mendiseminasikan (menyebarkan) kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru kepada anggota masyarakat. Jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektifitas pelaksanaan kebijakan. (Islamy, 1991 : 107-108). Apa yang dikatakan Islamy tersebut mengindikasikan lemahnya upaya sosialisasi produk hukum penanggulangan bencana dan pengetahuan mitigasi bencana yang dilakukan oleh Pemkab Probolinggo kepada masyarakat memang lumrah terjadi di pemerintah daerah di Indonesia.

Dengan adanya standar tanggap bencana yang sebaiknya ditetapkan oleh pemerintah dan disosialisasikan kepada publik, diharapkan dapat melatih

masyarakat, baik sebagai komunitas maupun kelompok selalu siap siaga menghadapi yang terburuk dan agar tidak terjadi kepanikan masal. Karena kepanikan bisa menimbulkan efek yang lebih mematikan daripada bencana itu sendiri. (Carter, 1991)

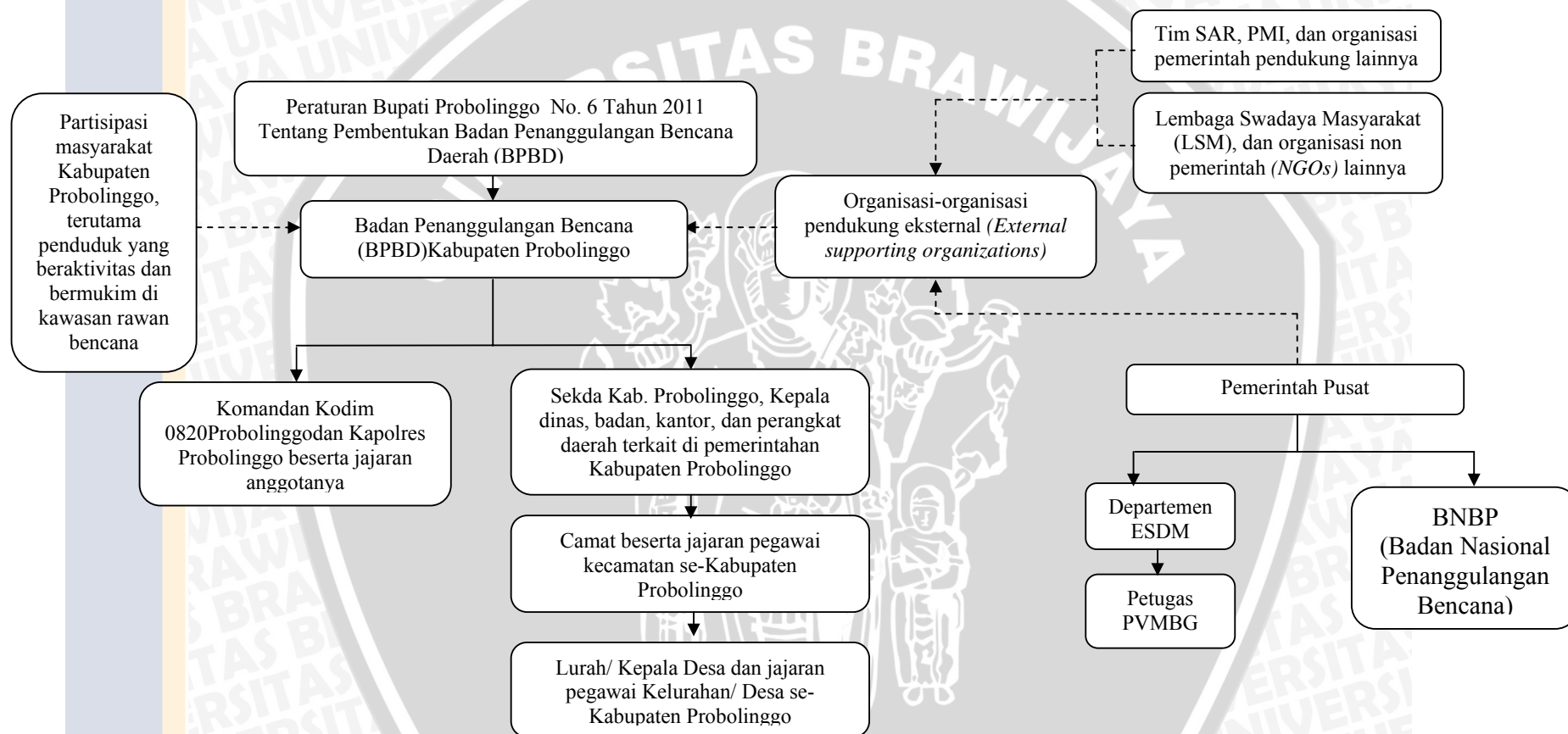
Merujuk pada Carter (1991) dan Islamy (1991) di atas, *belum efektifnya sosialisasi* produk hukum mengenai kebencanaan dan pemahaman pentingnya mitigasi bencana baik bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggodan masyarakat kawasan rawan bencana. Terlebih lagi saat ancaman letusan Gunung Bromo tinggal menunggu hitungan menit. Korban terbesar dari belum maksimalnya sosialisasi ini adalah dipertaruhkannya nyawa dan harta benda milik penduduk yang tinggal di sekitar Gunung Bromo itu sendiri. Mereka pasti dibuat bingung dan resah saat terjadi proses evakuasi bencana saat hari-H menjelang letusan Gunung Bromo seperti yang terjadi pada akhir tahun 2010 lalu.

b. Aktor Pelaksana

Dalam penanggulangan bencana pasti ada aktor yang terlibat di dalamnya dari proses formulasi, implementasi, hingga evaluasi. Terlebih lagi dalam proses implementasi kebijakan aktor tersebut pasti memegang peranan penting. Dalam lingkup yang lebih khusus, yaitu implementasi program-program, maka akan melibatkan aktor dari berbagai bidang keahlian yang dimiliki. Tak hanya itu beberapa pihak terkait dengan tujuan kepentingan mereka juga berusaha melibatkan diri di dalam penanggulangannya.

Dalam proses implementasi setiap program, banyak aktor yang terlibat dalam penentuan pilihan-pilihan mengenai alokasi sumber-sumber publik tertentu serta banyak pihak yang mungkin berusaha keras untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. (Wahab, 2008 : 194). Bagi pelaksanaan program-program mitigasi bencana letusan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo tentunya aktor yang terlibat tidak hanya Pemerintah Kabupaten Probolinggo saja, akan tetapi pasti ada pihak-pihak lain yang juga turut "berperan" dalam proses ini.





Gambar 26. Aktor Pelaksana Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo

Keterangan :

- : Garis komando hierarki BPBD Kab. Probolinggo/ Aktor pelaksana
- - - - - : Garis pendukung BPBD Kab. Probolinggo/ Aktor pelaksana

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana letusan Gunung Bromo di lapangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Kabupaten Probolinggo) sebagai aktor di lapangan tidak berjalan sendiri. Organisasi seperti Tim SAR (*search and rescue*), Palang Merah Indonesia (PMI), dan lainnya turut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana, khususnya letusan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo. Selain itu juga organisasi non pemerintah atau lazim disebut dengan *non government organizations (NGOs)*, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) turut bergerak sebagai aktor pendukung kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo. Seperti yang diungkapkan oleh kedua narasumber.

Pertama, Bapak Kukuh yang mengatakan bahwa:

“Dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana (mitigasi bencana Gunung Bromo) dilapangan hal ini tidak ada struktur yang jelas mbak. Semua instansi menangani kekurangan yang ada” (*interview* tanggal 18 Desember 2013 di BPBD Kabupaten Probolinggo)

Kedua, Bapak Aris selaku mengungkapkan bahwa:

“keadaan Erupsi Bromo saat itu benar-benar mendesak mbak, jadi tidak sempat terfikir untuk membuat struktur organisasi penanganan yang berkaitan dengan instansi lain, yang ada hanya kesadaran masing-masing elemen untuk melakukan penanganan setanggap mungkin, seperti adanya tim orari, PMI, Dinas Kesehatan yang menangani penyakit yang dialami penduduk, aparat TNI yang bahu membahu membangun tenda-tenda evakuasi, dan lain sebagainya.” (*interview* tanggal 18 Desember 2013 di BPBD Kabupaten Probolinggo)

Sehingga, dari kedua pernyataan tersebut adapat disimpulkan bahwa koordinasi penanggulangan bencana kurang berjalan dengan baik khususnya penanggulangan bencana erupsi Gunung Bromo yang lalu. Yang dapat berujung pada tumpang tindihnya tugas penanggulangan bencana. Dari analisa di atas,

lemahnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo sebagai aktor utama dalam penanggulangan bencana. Mengenai hal ini, Hasniati (2008:873) menyatakan bahwa sebaik apapun kebijakan yang dibuat oleh tingkat pusat, apabila pemerintah lokal selaku agen pelaksana tersebut tidak akan mampu menjabarkannya dengan baik di lapangan, maka semuanya akan sia-sia.

4.5.2 Sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, dalam mitigasi bencana Gunung Bromo

Untuk mengetahui model kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, dapat dilihat dari tahap penanggulangan bencana meliputi penanggulangan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

a. Penanganan Pra Bencana

Memang Pemkab Probolinggo dalam menghadapi tanggap bencana sudah menyiapkan peraturan di daerah sebagai payung hukum dan juga kelembagaan yang harus dibentuk sesuai amanat Peraturan Bupati Probolinggo No. 6 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo. Namun badan tersebut dalam kerjanya terkendala dengan lemahnya koordinasi antar satuan unit kerja dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo sendiri. Hal ini jelas berdampak pada buruknya kinerja Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan tugasnya yaitu melindungi masyarakat (*target groups*) dari ancaman bahaya letusan Gunung Bromo. Supriyono (2008 : 879) menguatkan analisis peneliti dengan mengatakan bahwa selama ini pemerintah telah berupaya melakukan

pengendalian bencana melalui berbagai lembaga yang dibentuk dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat. Meskipun demikian, upaya tersebut belum menuai hasil sebagaimana harapan masyarakat.

Bahkan dalam upaya mitigasi bencana letusan Gunung Bromo, koordinasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo tidak dilakukan. Mengulang pernyataan dari Bapak Lutfi bahwa:

“penanggulangan pra bencana memang tidak secara khusus dilakukan ya mbak, khususnya disaat Gunung Bromo dalam masa tenangnya, kami jarang sekali dan hamper tidak ada kegiatan yang dilakukan hanya beberapa hal saja yaitu perencanaan pembuatan peta lokasi evakuasi korban dan pemantauan kegiatan gunung yang kami dapatkan informasinya melalui PVMBG Gunung Bromo yang ada di Dusun Cemorolawang.” (interview 18 oktober 2013 di BPBD Kabupaten Probolinggo)

Pernyataan di atas menguatkan bahwasanya tidak dilakukan koordinasi dari Pemda kepada masyarakat saat pra-bencana, koordinasi dilakukan saat bencana sudah di depan pintu, yaitu saat Gunung Bromo akan meletus. Hal ini mengartikan bahwa koordinasi dalam upaya mitigasi bencana letusan Gunung Bromo antar instansi di jajaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga belum dilakukan. Mengenai hal ini Hermawan (2008 : 904) mengatakan bahwa pemerintah dalam manajemen bencana di negeri ini juga masih belum menyatu (terintegrasi) dan tidak fokus.

Dari fakta dan analisa di atas amat jelas koordinasi pada saat penanggulangan pra bencana tersebut tidak terjalin dengan baik sehingga partisipasi dari masyarakatpun juga rendah. Yang berakibat akan kurangnya informasi tentang penanggulangan bencana dari masyarakat kawasan rawan bencana Gunung Bromo. Entah karena terbatasnya anggaran, kurang informasi

dan kesadaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggosendiri, yang pasti koordinasi dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo yang lemah akan menghambat upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo) dalam mengimplementasikan program-program mitigasi bencana di kawasan rawan bencana letusan Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo.

Dari sini memang dapat diketahui bahwa dampak dari mitigasi bencana belum dapat dirasakan secara langsung daripada proses evakuasi. Akan tetapi apa salahnya kalau pencegahan dilakukan di awal, terlebih itu memang sebuah kewajiban, guna menekan kerugian dari suatu fenomena alam agar tidak menjadi sebuah bencana yang jelas-jelas akan terjadi dan merugikan masyarakat dan pemerintah di suatu waktu, ibarat pepatah "lebih baik mencegah daripada mengobati". Inilah mengapa mitigasi bencana merupakan suatu keharusan yang wajib segera dilaksanakan (*urgent*) oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

b. Penanganan Saat Bencana

.Sebuah kebijakan tidak akan pernah sukses dengan baik tanpa dukungan atau partisipasi dari masyarakat. (Hasniati, 2008 : 834). Peran masyarakat amat penting guna mendukung peran pemerintah dalam mitigasi bencana karena keterbatasan sarana dan prasarana internal yang dimiliki oleh pemerintah. Kausar (2008 : 799) mengemukakan menyadari akan berbagai keterbatasan pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, dalam pengadaan sarana

dan prasarana, anggaran dan personel, maka kepedulian masyarakat sangat diharapkan dalam rangka menggalang seluruh gagasan, potensi dan kemampuan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam proses peningkatan partisipasi di bidang penanganan bencana.

Sementara di lapangan, khususnya dalam penanggulangan saat bencana terjadi peran masyarakat sangat minim dimana masyarakat yang berpotensi untuk tidak mengikuti proses evakuasi yang disarankan oleh Pemda Kabupaten Probolinggo. Padahal peran masyarakat untuk penanggulangan bencana Gunung Bromo merupakan kebutuhan bagi setiap pemerintah daerah sebagai wujud tanggungjawab bersama. Mengingat wawancara dengan oleh Bapak Moh. Safi'i menyatakan bahwa:

“warga itu susah di evakuasi mbak, walaupun mau di evakuasi hanya satu hari saja. Mereka khawatir meninggalkan rumah karena kepikiran sama harta benda serta ternak yang ditinggalkan”(interview Tanggal 19 Desember 2013 di BPBD Kabupaten Probolinggo)

Langkah tersebut paling tidak sudah menunjukkan bahwa kemitraan antara kedua belah pihak sedikit terbentuk, karena komponen kemitraan sudah terpenuhi. Seperti yang dikemukakan oleh Sulistiyani (2004:129) bahwa kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi komponen sebagai berikut: ada dua pihak atau lebih, memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, ada kesepakatan, serta saling membutuhkan. Kemitraan dalam hal ini penanggulangan pada saat bencana Gunung Bromo yang mana kerjasama masyarakat sedikit terlihat dalam proses evakuasi dan tanggap darurat bencana alam Gunung Bromo.

c. **Penanggulangan Pasca Bencana**

Penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekontruksi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam hal ini sangat dibutuhkan peran masyarakat guna mendukung proses rehabilitasi sarana prasarana umum yang dibutuhkan. Kausar (2008:799) mengemukakan menyadari akan berbagai keterbatasan pemerintah, khususnya Pemerintah daerah , dalam pengadaan sarana dan prasarana, anggaran dan personel, maka kepedulian masyarakat sangat diharapkan dalam rangka menggali seluruh gagasan, potensi, dan kemampuan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam proses peningkatan partisipasi di bidang penanganan bencana.

Fakta lapangan selama peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat sekitar Gunung Bromo banyak sekali dari mereka yang memang tidak ikut andil dalam rehabilitasi sarana dan prasarana umum. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap ini sangatlah minim. Hal ini bertolak belakang dari pendapat Susanto (2008:908) yang mengemukakan manajemen bencana yang efektif mensyaratkan partisipasi masyarakat luas dan dukungan pemerintah. Karena peran dan dukungan masyarakat tidak hanya melulu pada penanggulangan pra bencana dan penanggulangan pada saat bencana saja.

Sehingga dapat disimpulkan dari ketiga kegiatan penanggulangan bencana di atas, baik penanggulangan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana Gunung Bromo antara pemerintah dan masyarakat membentuk tipe model kemitraan semu. Dimana menurut Sulistyani (2004:129) dalam Marshiatanti (2011:56) Kemitraan

semu adalah merupakan suatu kerjasama yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama yang seimbang antara satu dengan lainnya. Bahkan pada satu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna kerjasama yang dilakukan dan untuk apa itu semua dilakukan serta disepakati ada sesuatu yang unik dari kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum mengerti dan memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

Kemitraan semu semacam ini dalam penanggulangan bencana Gunung Bromo sangat terlihat antara pemerintah dan masyarakatnya dalam penanggulangan bencana. Dimana posisi pemerintah sebagai aktor utamalah yang cenderung “beraktivitas” didalamnya sedangkan penanggulangan bencana dan masyarakat tidak bertindak banyak, kurang berpartisipasi dan bahkan kurang mengerti akan pentingnya kerjasama dalam penanggulangan bencana.

4.5.3 Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dalam sinergi dengan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana gunung Bromo

a. Faktor Pendukung Internal

1. keanggotaan di BPBD Kabupaten Probolinggo Menyeluruh Dalam Berbagai Bidang

Data wawancara di lapangan memang menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo yang dibentuk berdasar Peraturan Bupati Probolinggo No. 6 Tahun 2011 Tentang uraian tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah. tidak hanya anggota dari Pemkab Probolinggo dan jajarannya. Akan tetapi juga dari TNI, POLRI sebagai

anggota keamanan dan pendukung sarana-prasarana umum juga dilibatkan. Didukung oleh anggota Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang menangani pemantauan aktivitas Gunung Api Bromo serta pembangunan sarana infrastruktur guna kepentingan mitigasi bencana letusan Gunung Bromo.

Dalam pengendalian bencana sebenarnya tidak hanya dibutuhkan keterlibatan aparat yang bekerja atas dasar perintah melainkan dibutuhkan pekerja terampil maupun pekerja berpengetahuan yang memiliki kreativitas untuk mengatasi persoalan secara cepat dan tepat. (Supriyono, 2008 : 882). Pendapat Supriyono menegaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo harus mereka yang memahami dan mampu melaksanakan berbagai tuntutan perihal kebencanaan di lapangan.

Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo dari berbagai bidang, jelas komposisi anggotanya amat beragam dengan pengetahuan dan keahlian yang berbeda-beda tiap bidang. Kegiatan penanggulangan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo sebagai aktor utama dan dari Pemkab Probolinggo dengan beberapa jajaran dinas pemerintahan baik dinas sosial, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan, Bakesbangpolinmas, BAPPEDA, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Ditambah lagi dengan bantuan dari pihak TNI AD dan Polri setempat sebagai pendukung keamanan dan pelaksanaan umum di lapangan, termasuk Tim SAR (*search and rescue*) dalam membantu mencari korban dan kegiatan pelaksanaan saat bencana terjadi sudah mencirikan bahwa

keanggotaan penanggulangan bencana Kabupaten Probolinggo sifatnya heterogen dengan kapasitas masing-masing bidang/ satuan kerja dalam menangani berbagai persoalan di lapangan terkait penanggulangan bencana, yaitu dari proses pra-bencana (termasuk mitigasi bencana), saat bencana, dan pasca bencana.

2. Komitmen BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Bromo

Komitmen pejabat pemerintah sebagai pengambil keputusan/ kebijakan amat dibutuhkan saat keputusan/ kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Komitmen dalam bentuk kebijakan tersebut haruslah konsistensi saat diimplementasikan di lapangan. Edwards (1980 : 40) mengemukakan *Implementation orders must be consistent as well as clear if policy implementation is to be effective.*

Umumnya komitmen pemerintah diwujudkan dengan produk hukum sebagai landasan suatu kebijakan diimplementasikan. Demikian pula dengan komitmen Pemkab Probolinggo dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana, termasuk di dalamnya upaya pelaksanaan program-program mitigasi bencana di kawasan rawan bencana letusan Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo. Menguatkan hal ini Dr. Bambang Supriyono selaku pengajar di jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah semakin diperlukan mengingat saat ini mobilitas masyarakat dalam berbagai aktivitas sering kali terkendala oleh gangguan bencana yang belum dapat dikendalikan. (Supriyono, 2008 : 879)

Dalam komitmen upaya mitigasi bencana ini, Pemkab Probolinggo memiliki dua produk hukum yang telah jadi acuan yaitu Peraturan Bupati Probolinggo No. 6 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029, selain itu ada satu produk hukum daerah masih dalam rancangan Tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di Kabupaten Probolinggo. Meskipun yang dipakai sekarang dalam penanggulangan bencana masih Peraturan Bupati Probolinggo No. 6 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo. Namun diharapkan dengan adanya perda baru yang masih berupa rancangan, penanggulangan bencana akan datang mengalami peningkatan yang lebih baik termasuk mitigasi bencana di kawasan rawan bencana (KRB) letusan Gunung Bromodi daerah otonom Kabupaten Probolinggo.

Meskipun fakta di lapangan menunjukkan bahwa program-program mitigasi bencana oleh Pemkab Probolinggo sekaligus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo masih belum berjalan dengan efektif. Namun komitmen Pemkab Probolinggo akan upaya mitigasi bencana dapat dikatakan "cukup serius", mengingat mitigasi bencana menjadi wacana baru bagi Indonesia, saat negeri ini dilanda musibah alam yang tak kunjung henti, sedangkan sifatnya bencana merupakan hal yang tak dapat diduga kapan terjadi, sebagaimana yang dikatakan Kausar (2008 : 795) bencana adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau

perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan yang terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya.

Dengan demikian bercermin pada program mitigasi bencana di kawasan rawan bencana letusan Gunung Bromo yang dirasa belum optimal, maka komitmen Pemkab Probolinggo dalam upaya penanggulangan bencana di daerah otonomnya harus senantiasa ditingkatkan agar tujuan mitigasi bencana dapat tercapai meskipun tidak 100%.

b. Faktor Pendukung Eksternal

1. Adanya Organisasi Eksternal Pendukung Yang Bertugas Khusus Dalam Bidang Kegunungapian Terkait Pengaman Bahaya Letusan Gunung Bromo

Adanya organisasi eksternal sebagai agen pendukung kebijakan pastilah dibutuhkan oleh pemerintah sebagai aktor implementasi kebijakan. Hogwood dan Gunn dalam Parsons (2008 : 467-468) memberikan sepuluh kondisi agar implementasi kebijakan pemerintah dapat berjalan baik salah satunya ialah ada satu agen implementasi yang tidak selalu tergantung kepada agen lain agar bisa sukses. Jika agen lain harus dilibatkan, hubungan ketergantungan itu minimal dalam hal jumlah dan arti pentingnya.

Merujuk konsep faktor pendukung implementasi kebijakan oleh Hogwood dan Gunn di atas, sangat jelas bahwa keberadaan organisasi khusus di bidang kegunungapian dan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan rawan bencana letusan Gunung Bromo amat menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam implementasi program-program mitigasi bencana

ini. Konsep pendukung lainnya yaitu dalam petisi seruan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) sebuah *NGOs* lingkungan hidup nasional terkait seruan kepada pemerintah agar mengurangi dampak negatif bencana pada poin ke-7 menyatakan mengevaluasi dan menyiapkan kelembagaan penanganan bencana untuk mempunyai kemampuan dan sistem penanganan bencana yang efektif. (Hasniati, 2008 : 837)

Saat ini telah ada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Di Gunung Bromo sendiri telah memiliki 1 (satu) pos pengamatan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang terletak di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo yang tugasnya adalah untuk memantau aktivitas Gunung Bromo.

Adanya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) amat penting keberadaannya dalam membantu Pemkab Probolinggo dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo guna mengimplementasikan program-program mitigasi bencana di kawasan rawan bencana letusan Gunung Bromo di wilayah Kabupaten Probolinggo. Pasalnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang bertugas memberi informasi tentang aktivitas Gunung Bromo akan menjadi kontribusi nyata bagi Pemkab Probolinggo dalam penanggulangan bencana termasuk mitigasi bencana. Jadi jelas bahwa organisasi di atas bertujuan agar upaya mitigasi bencana di kawasan rawan bencana letusan Gunung Bromo wilayah Kabupaten Probolinggo dapat berjalan optimal.

2. Dukungan Anggaran Penanggulangan Bencana Dari Pemerintah Pusat

Dalam berbagai teori kebijakan publik, dukungan sumber daya anggaran memang sangat penting kedudukannya dalam pelaksanaan penentu kebijakan. Bahkan dana dapat dikatakan sebagai pendukung utama (*main supplier*) dalam hal kebijakan itu dijalankan. Hampir semua kegiatan akan berjalan dengan baik jika dananya jelas dan sebaliknya, hanya gara-gara dana yang minim atau tidak jelas jangan harap kebijakan akan berjalan dengan baik.

Di era desentralisasi sekarang merupakan hal yang wajar bagi pemerintah daerah dalam meminta dan/atau menerima bantuan dari pemerintah pusat. Karena sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga berasal dari sumber-sumber di daerah yang kemudian dikembalikan ke daerah dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 60 ayat (1) menjelaskan bahwa dana penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tekad terhadap tanggungjawab fiskal akan menuntut pemerintah untuk mengikuti kebijakan mitigasi pra-musibah, yang hampir selalu lebih murah dibanding pertolongan dan pemulihan pasca musibah. (Mardiyono, 208 : 863). Bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui program pemerintah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), kegiatan proyek, hibah,

atau lainnya merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam mendukung upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo penanggulangan bencana khususnya mitigasi bencana di kawasan rawan bencana (KRB) letusan Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo.

Di lapangan bantuan anggaran dari pemerintah pusat diturunkan saat Gunung Bromo sudah keadaan krisis seperti kejadian November 2010 kemarin. Sedangkan dalam upaya mitigasi bencana ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Lutfi (petugas BPBD Kabupaten Probolinggo) anggaran dari pemerintah pusat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)) diturunkan langsung ke organisasi tersebut sebagai pembiayaan operasional. Meskipun demikian, kucuran anggaran dari pemerintah pusat amat membantu Pemkab Probolinggo penanggulangan bencana letusan Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo.

3. Dukungan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Dari Pemerintah Pusat

Terpenuhinya sarana dan prasarana amat mendukung suatu implementasi kebijakan itu dapat diterapkan dengan baik atau sebaliknya. Hogwood dan Gunn dalam Parsons (2008 : 467-468) mensyaratkan salah satu faktor agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik ialah waktu yang cukup dan sumber daya yang memadai harus tersedia. Sumber daya yang dimaksud disini adalah sarana dan prasarana penunjang. Hasil temuan di lapangan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemkab Probolinggo guna tujuan mitigasi bencana amat minim mengingat terbatasnya anggaran untuk penanggulangan bencana.

Bukanlah suatu kekeliruan bagi Pemkab Probolinggo sebagai daerah otonom yang merupakan bagian dari pemda lain di Indonesia di bawah naungan

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk meminta dan/ atau menerima bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat guna pelaksanaan program-program mitigasi bencana letusan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo. Mendukung analisa penulis, Susanto (2008 : 910) mengemukakan bahwa ada beberapa isu utama dalam mitigasi bencana yang salah satunya yaitu peralatan, "power", dan anggaran. Dalam hal ini pemerintah dapat memanfaatkan berbagai peralatan dan wewenang menetapkan peraturan, fungsi administratif, pengeluaran, usulan proyek bagi sarana yang dimilikinya untuk menjamin keselamatan masyarakat.

4. Kontrol Media Massa Cukup Efektif

Di era yang informasi telah menjadi suatu kebutuhan (*need*) seperti saat ini, media massa memberikan peranan yang amat besar dalam proses penanggulangan bencana. Meminjam teori media massa seperti teori jarum hipodermik, bahwasanya apa yang disampaikan oleh media massa memiliki dampak langsung yang dapat menyebar luas ke masyarakat, termasuk dalam hal pemberitaan bencana. Hasniati (2008 : 837) mengatakan ketika terjadi bencana, peran media massa sangat besar artinya dalam memberikan informasi yang secepat mungkin kepada warga masyarakat.

Dalam implementasi program-program mitigasi bencana letusan Gunung Bromo oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, media massa memberikan sumbangsih tersendiri saat Gunung Bromo menunjukkan keaktifannya seperti pada November 2010 lalu. Media massa menjadi salah satu sarana pembelajaran baik mengenai bahaya letusan Gunung Bromo bagi jiwa dan materi penduduk, baik

oleh Pemkab Probolinggo. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo selaku aktor utamadan masyarakat Kabupaten Probolinggo khususnya yang bermukim dan beraktivitas di kawasan rawan bencana letusan Gunung Bromo.

C. Faktor Penghambat Internal

1. Koordinasi Antar Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo Masih Lemah

Koordinasi memang dibutuhkan dalam melakukan kebijakan dari saat kebijakan itu dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Dalam upaya penanggulangan bencana letusan Gunung Bromo sebagaimana hasil wawancara peneliti di lapangan dengan berbagai pejabat terkait di jajaran Pemkab Probolinggo bahwasanya koordinasi yang dilakukan antar instansi di Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penanggulangan bencana masih belum baik/ lemah.

Koordinasi penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo dinilai masih lemah. Beberapa instansi dan organisasi dalam penanggulangan bencana masih mengalami kebingungan saat bertugas di lapangan. Mereka kadang merasa tidak tahu akan wewenang mereka di lapangan. Tidak hanya dalam upaya menegakkan zonasi tata ruang untuk kepentingan mitigasi bencana, tapi juga upaya penanganan saat terjadi bencana dan pasca bencana, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo masih dinilai kurang maksimal.

Selaku *leader*, BPBD yang diwakili oleh Bapak Lutfi selaku seksi logistik mengungkapkan, masih minimnya kesadaran dari masing-masing instansi dalam penanganan bencana. Hal ini juga dikuatkan oleh Bapak Kukuh, selaku Kepala Bagian Perencanaan bahwasanya di lapangan menemui berbagai persoalan

diakibatkan mereka tidak memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing, sehingga koordinasi internal antar anggota masih kurang.

Pada saat terjadi bencana, kurangnya koordinasi antar tataran pemerintah menghambat pemberian tanggapan yang cepat, optimal, dan efektif. (Kausar, 2008:799). Mengutip pernyataan Kausar bahwa lemahnya koordinasi antar penanggulangan bencana khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo yang berarti juga antar instansi di jajaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam hal penanggulangan bencana pasti akan menghambat implementasi program-program mitigasi bencana di kawasan rawan bencanaletusan Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo. Mengenai hal ini Hermawan (2008:904) mengatakan bahwa pemerintah dalam manajemen bencana di negeri ini juga masih belum menyatu (terintegrasi) dan tidak fokus.

Dari fakta dan analisa di atas amat jelas koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo amat lemah, bahkan saat Gunung Bromo sedang "tidur", tidak ada koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo. Beberapa ketentuan yang seharusnya menjadi prioritas ternyata dalam praktek diabaikan. Entah karena terbatasnya anggaran, kurang informasi dan kesadaran dari Pemda dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo mengimplementasikan program-program mitigasi bencana di kawasan rawan bencanaletusan Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo.

2.Orientasi Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo Sebatas Bersifat Tanggap Darurat/Mendadak

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana memang terkesan bergerak saat bencana sudah di depan mata. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo bekerja bukan pada upaya penjinakan atau pengurangan (mitigasi) dampak bahaya letusan Gunung Bromo, tapi dilakukan saat Gunung Bromo sudah masuk status “Waspada” seperti November 2010 lalu. Jadi saat Gunung Bromo “krisis” muncullah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo yang bertugas mengevakuasi atau dalam bahasa lain “mengoprak-oprak penduduk” yang bermukim dan beraktivitas di kawasan rawan bencana letusan Gunung Bromo.

Penanganan bencana terkesan tidak siap dan seolah-olah antisipasi hanya dilakukan setelah terjadinya bencana. (Kausar, 2008:796). Sebagaimana yang diungkapkan Kausar bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo melakukan tugasnya hanya “jika” terjadi letusan Gunung Bromo dan sesudahnya. Saat awal/ mitigasi bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo tidak dapat berbuat banyak atau dapat dikatakan tidak melakukan apa-apa termasuk pengawasan tata ruang guna kepentingan mitigasi bencana letusan Gunung Bromo, orientasinya hanya bersifat pas hari-H atau H plus.

3. Anggaran Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Probolinggo Masih Minim dan Sebagian Besar Menggantungkan Dari Pemerintah Pusat

Salah satu faktor penghambat kebijakan ialah adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantuan (waktu, uang, dan sumber daya manusia). Soenarko (2005:185). Rendahnya anggaran yang dimiliki Pemkab Probolinggo dalam penanggulangan bencana merupakan hambatan serius dalam implementasi program-program mitigasi bencana di kawasan rawan bencana letusan Gunung Bromo daerah otonom Kabupaten Probolinggo.

Alokasi anggaran Pemkab Probolinggo dalam penanggulangan bencana amat minim. Sebagai contoh untuk keseluruhan program penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo, Pemkab Probolinggo hanya mengalokasikan dana Rp 2.000.000.000,00 per tahun. Dana tersebut belum diposkan secara khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo. Bayangkan saja berapa anggaran bagi penanggulangan bencana letusan Gunung Bromo. Maka tak heran jika beberapa program Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait penanggulangan bencana letusan Gunung Bromo, termasuk mitigasi bencananya belum dapat berjalan optimal, seperti sarana dan prasarana mitigasi bencana yang minim akibat minimnya anggaran.

Di samping itu Pemkab Probolinggo cenderung menggantungkan anggaran dan bantuan sarana serta prasarana dari pemerintah pusat baik itu dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) manakala bencana letusan Gunung Bromo terjadi, tidak terkecuali

pemeliharaan bangunan pendukung program-program mitigasi bencana. Bahkan Pemkab Probolinggo kalau boleh dibilang “mengandalkan” Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta bantuan lain dari pemerintah pusat yang jumlah nominal terbatas dan peruntukannya juga harus jelas.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sering kali tidak diiringi dengan pengalihan tanggung jawab pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Akibatnya, saat bahaya menjadi bencana, tanggapan daerah cenderung lambat dan sering kali mengharapkan tanggapan langsung dari pemerintah pusat. (Kausar, 2008:799)

Sikap ketergantungan seperti ini mencerminkan bahwa belum ada kemandirian anggaran yang diposkan khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo bagi pembiayaan penanggulangan bencana. Jika Pemkab Probolinggo tidak ada pembenahan dan peningkatan nominal anggaran penanggulangan bencana, maka dapat dipastikan pelaksanaan program-program mitigasi bencana di kawasan rawan bencana letusan Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo tidak akan dapat berjalan optimal.

4. Minimnya Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana

Suatu kebijakan tidak mungkin tidak menggunakan sarana dan prasarana dalam mencapai *goal* kebijakan itu sendiri. Bahkan tak jarang gara-gara sarana yang minim kebijakan tidak berjalan dengan efektif. Soenarko (2005:185) mengemukakan penyebab gagalnya implementasi kebijakan diantaranya karena 1) sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif dan 2) sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyadari akan berbagai keterbatasan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dalam pengadaan sarana dan prasarana.....(Kausar, 2008 : 799). Sebagaimana yang dikemukakan Bapak Lutfi (seksiperlengkapan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo) dan Bapak Kukuh (kepala pelaksana Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Probolinggo) serta pengamatan peneliti di lapangan, memang sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program-program mitigasi bencana amat terbatas. Sebagai contoh rambu-rambu larangan beraktivitas di kawasan rawan bencana letusan Gunung Bromo jumlahnya minim. Hal ini jelas akan mempengaruhi Pemkab Probolinggo dalam mencapai tujuan mitigasi bencana di wilayahnya.

D. Faktor Penghambat Eksternal

1. Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Setempat Mengenai Bahaya Letusan Gunung Bromo Masih Rendah

Pengetahuan yang dimiliki setiap orang pasti penting dalam mendukung suatu kebijakan, termasuk penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemkab Probolinggo. Dalam hal ini Kausar (2008 : 796) mengatakan bahwa memang kesadaran dalam menanggulangi bencana saat ini dirasakan belum sepenuhnya disadari oleh seluruh elemen masyarakat. Seperti pernyataan Bapak Moh. Safi'i selaku koordinator pos pemantau Gunung Bromo yang menyatakan:

“Masyarakat sini cenderung menyepelekan erupsi Gunung Bromo mbak. Menganggap kalau letusan Gunung Bromo gak akan besar. Ternyata malah terbukti di erupsi Gunung Bromo 2010-2011 kemarin yang cukup besar sampai hujan pasir koral serta gempa yang dirasakan juga cukup besar.”(Interview tanggal 17 Oktober 2013 di pos pantau Gunung Bromo)

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana, khususnya mitigasi bencana akan memberi dampak buruk lain pada pemerintah setempat sebagai *implementator of policy*. Bagi masyarakat, hidup akrab dengan alam menjadi konsekuensi yang mesti diambil. Mau tinggal di kawasan rawan bencana, yang notabene subur, warga mesti sadar dengan risikonya, seperti siap mengungsi setiap waktu, tanpa paksaan. Mental menyalahkan pemerintah tidak terus-terusan dikedepankan. Kesadaran masyarakat juga menjadi keharusan. Jangan kalau kena bencana, terus merengek-rengok menanyakan bantuan atau menyalahkan pemerintah. Kesadaran hidup di kawasan bencana itu mesti tumbuh mandiri. "Itu masyarakat yang dewasa". (www.bataviase.co.id)

Pemaknaan kejadian bencana cenderung disalahartikan/ bias menjadi urusan pemerintah. Paradigma selama ini yang menyebutkan bahwa bencana itu takdir, berdampak pada sulitnya menggalang partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya antisipasi dan penanggulangan bencana. Mardiyono (2008 : 867) mengatakan bahwa pendidikan masyarakat dapat membantu mereka menjadi sadar terhadap kerawanan, mengenalkan kepada mereka strategi alternatif untuk mengatasi bahaya dan mendorong kepentingan bersama dalam mitigasi bencana sebagai prioritas masyarakat.

Berdasar observasi di lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak terkait memang rendahnya pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mitigasi bencana menjadi kendala (*handicap*) bagi Pemkab Probolinggo dalam implementasi program-program mitigasi bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten Probolinggo. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat

yang rendah mengenai mitigasi bencana jika dibiarkan akan menambah masalah yang lebih serius bagi Pemkab Probolinggo dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan mitigasi bencana, dalam hal ini mitigasi bencana letusan Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo.

2. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masih Kurang Aktif

Peran *Non Government Organizations (NGO's)* salah satunya berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak dapat dipandang sebelah mata. Tidak ubahnya seperti media massa yang senantiasa memberikan informasi sekaligus pencitraan terhadap suatu hal, baik yang bersifat positif maupun negatif, maka peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai *Non Government Organizations (NGO's)* merupakan hal yang penting di era reformasi yang sedang bergulir di negeri ini. Hasniati (2008 : 837) mengungkapkan bahwa peran *NGOs (Non Government Organizations)*, akademisi, dan swasta dapat mengambil peran yang tidak dapat dilakukan pemerintah. *Non Government Organizations (NGO's)* dapat menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat.

Mengenai peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam keterlibatannya terhadap penanggulangan bencana letusan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo sebagaimana yang telah diungkapkan Bapak Triono Ngadiasri bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seakan-akan muncul di tengah-tengah masyarakat saat bahaya letusan Gunung Bromo sudah di depan mata. Namun saat Gunung Bromo normal, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak mendorong upaya mitigasi bencana yang di Probolinggo. Inilah yang

kemudian menjadi salah satu kendala (*handicap*) bagi Pemkab Probolinggo dalam melakukan implementasi program-program mitigasi bencana letusan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang muncul dari kesadaran masyarakat sendiri baik mulai dari pembentukannya, operasional pelaksanaan, pendanaan, hingga laporan pertanggungjawaban dilakukan secara swadaya seharusnya dapat lebih memberikan peran penting sebagai mitra Pemkab Probolinggo guna menjalankan penanggulangan bencana termasuk program-program mitigasi bencana. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak hanya "tampil" saat bencana akan terjadi, saat terjadi, dan pasca bencana, namun juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus menjadi "provokator" bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengkampanyekan bahwa dampak kerugian bencana dari segi jiwa dan materi dapat diminimalisir bahkan dapat dicegah.

.....untuk mendukung kegiatan ini, tentunya peran "masyarakat luar" masih dimungkinkan dan diperlukan. Sesuai dengan kemampuannya, lembaga-lembaga kemasyarakatan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dapat mencari peluang untuk ikut berperan. Program diharapkan dapat dilaksanakan dengan asas kerakyatan dan kejujuran. (Sukowati, 2008 : 851) Pernyataan Sukowati di atas menegaskan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat harus berani "tampil" tidak hanya saat ada bencana, namun juga penting untuk implementasi program-program mitigasi bencana agar berjalan efektif. Selain itu dengan asas kerakyatan dan kejujuran, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan

lebih mendapat tempat di hati masyarakat dan pemerintah, bahwasanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bukanlah sebuah *forced profit organization* (organisasi profit paksaan) yang hanya mengejar “uang” dengan mencari “celah” atas “kegagalan” kebijakan pemerintah yang selama ini ramai diperbincangkan publik.

Mengenai kasus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang “muncul” saat Gunung Bromo sudah status “awas” menjadi sorotan bagi peneliti untuk memberi penilaian apakah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut sebagai *forced profit organization* atau *The Real NGO's*. Pemberian nilai ini tentunya butuh penelitian lanjutan terhadap *goal* dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini serta bagaimana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut bermitra dengan Pemkab Bromo.

Berkaitan dengan sinergitas, menurut Deardorff dan Williams (2006) sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar 2 dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Megacu pada sejauh upaya mana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten probolinggo dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana dan masyarakat Kabupaten Probolinggo kurang tercipta interaksi dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Bromo. Terlihat dari beberapa kegiatan yang meliputi penanggulangan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana yang masih terkesan “egois” dari masing-masing pihak pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Seperti kegiatan pra bencana yang mana pemerintah daerah kurang memberikan informasi tentang kebencanaan kepada

masyarakat sekitar, saat bencana yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam program evakuasi dan rehabilitasi ketika pasca bencana menunjukkan pengaruh yang tidakimbang dari kedua domain tersebut.

Menurut Corning (1995) ...Sinergi merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, batu dapat digunakan untuk membuat berbagai struktur seperti rumah, tembok, jalan, dan sebagainya. Tidak tekecuali penanganan bencana Gunung Api Bromo yang terbukti penanganan hanya fokus terhadap penanggulangan pada saat bencana saja. Jika interaksi antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana dan masyarakat Kabupaten Probolinggo yang lemah ini diteruskan, penanggulangan bencana dari kegiatan pra bencana, saat bencana, hingga pasca bencana tidak akan “menciptakan” sinergi yang baik dan dampaknya tentu saja program mitigasi bencana tidak akan berjalan dengan maksimal.

Tidak maksimalnya penanggulangan bencana ini juga didukung dengan adanya ketidaktanggapan Pemerintah Daerah dalam kegiatan penanggulangan bencana Gunung Bromo. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 6 yang salah satu poinnya menyebutkan bahwa,....pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai... sebagaimana yang diungkapkan Pak Kukuh bahwa pengalokasian dana anggaran APBD dalam penanggulangan bencana alam Gunung Bromo tidak ada anggaran khusus, sehingga dalam penanganan penanggulangan bencana tidak bisa “sigap”, sementara terjadinya bencana alam tidak dapat ditunda. Yang mana semakin lambannya proses pendanaan dari APBD

akan berdampak semakin tingginya resiko kegagalan dalam mitigasi bencana.

Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Probolinggo masih minim dalam menghadapi datangnya bencana alam khususnya bencana Gunung Api Bromo.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

